PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR - ISI

I. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

II. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

III. LAMPIRAN I : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

IV. LAMPIRAN II : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

V. LAMPIRAN III : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VI. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

VII. LAMPIRAN V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

VIII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

IX. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

X. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DENGAN PPAS DENGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

XI. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

XII. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

XIII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH

XIV. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

XV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN

XVI. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2023

XVII. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN

XVIII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6332 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa sesuai hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, telah mendapat persetujuan bersama untuk penyempurnaan dan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijkan keuangan negara untuk penanganan Pandemi *Corona Viruses Diesease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6514) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijkan Keuangan Negara Untuk Pennagan Pandemi *Corona Viruses Desease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
21. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 46);
22. Peraturan DPRD Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 47).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 29 Desember 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

KETUA,

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.	I NYOMAN SUYASA, ST	TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota Se- Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se- Bali;
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	HASIL PENYEMPURNAAN EVALUASI RANCANGAN APBD 2023
I.	**TUJUAN EVALUASI**	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan: A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. Kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	

II.	**KEBIJAKAN UMUM**	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1), dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur, meliputi: A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:	

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	80 Tahun 2022	27 Juni 2022	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	B.13.908/8792/Bid.PADFE-BPKAD	8 Juli 2022	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.13.050/8930/Bid.PADFE-BPKAD	14 Juli 2022	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	B.13/900/4516/PADFE/BPKAD B.09/910/20872/Keu/Setwan dan B.13/900/4517/PADFE/BPKAD B.09/910/20873/Keu/DPRD	8 Agustus 2022	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	B.13.045.2/5773/PADFE/BPKAD	26 September 2022	Sesuai, (paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	B.13.900/7399/PADFE/BPKAD B.08.900/82448/Keu/DPRD	22 November 2022	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan)
Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi	B.13.900/7410/PADFE/BPKAD	22 November 2022 Disampaikan ke Kemendagri 24 November 2022	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mempertahankan konsistensi pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran	

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan: 1. Kebijakan Pendapatan Daerah a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. b. Penganggaran target Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal	

	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. 2. Kebijakan Belanja Daerah a. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

		b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. d. Penganggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi	

	sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	
III.	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**	
	A. Kebijakan Pendapatan Daerah Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.632.763.558.000,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:	

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	5.995.467.392.837,00	5.596.479.850.692,00	6.632.763.558.000,00
Pendapatan Asli Daerah	3.178.019.403.737,00	3.494.115.418.572,00	4.426.194.300.000,00
Pajak Daerah	2.640.212.076.975,00	2.879.557.806.488,00	2.918.212.968.500,00
Retribusi Daerah	12.602.157.400,00	10.738.252.500,00	63.557.355.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	160.711.862.041,00	220.323.008.100,00	810.711.860.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	364.493.307.321,00	383.496.351.484,00	633.712.116.000,00
Pendapatan Transfer	2.811.739.989.100,00	2.047.466.392.120,00	2.150.861.258.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.811.739.989.100,00	2.047.466.392.120,00	2.150.861.258.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	54.898.040.000,00	55.708.000.000,00
Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	54.898.040.000,00	55.708.000.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3
Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	%
2021	3.178.019.403.737,00	5.995.467.392.837,00	53,01
2022	3.494.115.418.572,00	5.596.479.850.692,00	62,43
2023	4.426.194.300.000,00	6.632.763.558.000,00	66,73

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.426.194.300.000,00 atau 66,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.918.212.968.500,00 atau 44,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
        a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.455.094.698.500,00;
        b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp757.265.417.800,00;
        c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp390.000.000.000,00;
        d) Pajak Air Permukaan Rp3.200.000.000,00; dan
        e) Pajak Rokok Rp312.652.852.200,00.

	2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp63.557.355.500,00 atau 0,96% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp63.557.355.500,00 atau 0,96% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp63.557.355.500,00 atau 0,96% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut: a) Retribusi Jasa Umum Rp3.946.319.000,00; b) Retribusi Jasa Usaha Rp55.405.036.500,00; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.206.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Bali serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian dampak pandemi COVID-19.	Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Provinsi Bali dan juga memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Covid-19* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

	Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menetapkan: PBBKB untuk Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5% (lima persen), serta PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan: a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan b) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; b. kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;	

	c. insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan d. pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen). Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir1).a) harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hak provinsi, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target PKB dimaksud harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sedangkan, untuk penggunaan Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari target Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah dialokasikan sesuai Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program JKN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran target pendapatan pajak rokok sebagaimana tercantum pada butir 1).e) harus menyesuaikan dengan alokasi pajak rokok yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2023 Rp354.877.734.289,00.	Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok akan disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp354.877.734.289,00.

	b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp810.711.860.000,00 atau 12,22% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari: 1) PT. BPD Bali Rp158.436.630.000,00 atau 25,77% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp614.912.000.000,00; 2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp1.279.822.000,00 atau 1,07% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp120.000.000.000,00; 3) PT. Puri Raharja Rp823.182.000,00 atau 9,42% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp8.736.000.000,00; dan 4) PT. Asuransi Bangun Askrida Rp172.226.000,00 atau 14,98% dari total penyertaan modal daerah mulai Tahun Anggaran 1990 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp1.150.000.000,00.	

	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 kepada: 1) Perusahaan Daerah Provinsi Bali mulai Tahun Anggaran 1974 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp5.282.769.658,00; dan 2) PT. Jasamarga Bali Tol mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 Rp100.000.000.000,00;	

	belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), mengingat tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD. c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp633.712.116.000,00 atau 9,55% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:	Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp390.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp305.562.407.000,00 atau 4,61% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir C.2.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	3) Hasil Kerja Sama Daerah Rp1.402.600.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.a.3).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 4) Jasa Giro Rp10.000.000.000,00 atau 0,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp50.488.986.000,00 atau 0,76% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp200.000,00 atau 0,000003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 7) Pendapatan dari Pengembalian Rp600.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 8) Pendapatan BLUD Rp265.267.923.000,00 atau 4,00% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	2. Pendapatan Transfer Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.150.861.258.000,00 atau 32,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2.150.861.258.000,00 atau 32,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan: a. Dana Perimbangan Rp2.088.460.200.000,00 atau 31,49% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan: 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp136.760.061.000,00 lebih kecil Rp3.631.496.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp140.391.557.000,00; 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.243.564.753.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022;	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp136.760.061.000,00, dimana khusus untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dialokasikan hanya yang menjadi bagian provinsi yaitu sebesar Rp1.320.544.000,00.

	3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp119.564.650.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022; dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp588.570.736.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022. b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp62.401.058.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 dan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-194/PK/2022 tanggal 28 November 2022 Hal Pemberitahuan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), dan butir C.2.b.4).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.	

	Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp55.708.000.000,00 atau 0,84% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Hibah Rp55.708.000.000,00 yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan: a. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp5.708.000.000,00; dan b. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Rp50.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	Berkaitan dengan itu, pendapatan hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Provinsi Bali digunakan: a. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas darat; dan b. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi; sebagaimana dimaksud butir C.2.c.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. B. Kebijakan Belanja Daerah Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.225.307.140.983,00, dirinci sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:	

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	APBD Tahun Anggaran 2022	R-APBD Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	7.903.323.253.052,00	7.541.821.522.461,00	7.225.307.140.983,00
Belanja Operasi	4.576.936.931.777,00	4.076.148.648.130,00	4.304.845.828.025,00
Belanja Pegawai	1.845.863.854.618,00	1.824.026.422.662,00	2.071.941.692.196,00
Belanja Barang dan Jasa	1.693.479.947.279,00	1.838.472.468.548,00	1.336.398.037.673,00
Belanja Bunga	20.375.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	10.350.595.000,00	10.025.000.000,00
Belanja Hibah	1.012.218.129.880,00	403.159.161.920,00	856.759.898.156,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	140.000.000,00	29.721.200.000,00
Belanja Modal	1.735.407.456.122,00	1.800.399.412.612,00	1.188.421.478.020,00
Belanja Modal Tanah	962.184.693.264,00	770.002.219.242,00	2.500.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.575.058.515,00	129.701.330.422,00	219.361.663.247,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.949.836.949,00	413.591.434.404,00	719.116.079.563,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	202.920.131.388,00	452.699.429.919,00	193.659.633.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.777.736.006,00	34.329.998.625,00	53.784.101.710,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	75.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	91.118.471.313,00	7.848.875.371,00	50.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	91.118.471.313,00	7.848.875.371,00	50.000.000.000,00
Belanja Transfer	1.499.860.393.840,00	1.657.424.586.348,00	1.682.039.834.938,00
Belanja Bagi Hasil	1.127.384.356.596,00	1.354.111.107.615,00	1.157.165.031.430,00
Belanja Bantuan Keuangan	372.476.037.244,00	303.313.478.733,00	524.874.803.508,00

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.445.550.377.626,00	764.246.914.440,00	0,00	0,00	3.209.797.292.066,00	44,42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.456.923.957.860,00	373.379.307.980,00	0,00	0,00	1.830.303.265.840,00	25,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	556.911.767.725,00	97.766.645.259,00	0,00	0,00	654.678.412.984,00	9,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	332.270.290.156,00	286.868.704.668,00	0,00	0,00	619.138.994.824,00	8,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.163.303.864,00	0,00	0,00	0,00	2.163.303.864,00	0,03

			Belanja			Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	67.440.022.425,00	2.317.526.500,00	0,00	0,00	69.757.548.925,00	1,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.841.035.596,00	3.914.730.033,00	0,00	0,00	33.755.765.629,00	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	844.538.843.801,00	373.839.357.853,00	0,00	0,00	1.218.378.201.654,00	16,86
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	33.881.892.500,00	365.217.100,00	0,00	0,00	34.247.109.600,00	0,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.306.484.192,00	0,00	0,00	0,00	2.306.484.192,00	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.936.981.156,00	0,00	0,00	0,00	2.936.981.156,00	0,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200,00	0,00	0,00	0,00	311.272.200,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	4.075.716.581,00	106.486.280,00	0,00	0,00	4.182.202.861,00	0,06

			Belanja			Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
LINGKUNGAN HIDUP, URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.868.988,00	0,00	0,00	0,00	326.868.988,00	0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28.923.363.792,00	96.684.200,00	0,00	0,00	29.020.047.992,00	0,40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	603.494.788,00	0,00	0,00	0,00	603.494.788,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	34.797.104.225,00	13.751.876.473,00	0,00	0,00	48.548.980.698,00	0,67
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	70.680.241.526,00	354.284.552.400,00	0,00	0,00	424.964.793.926,00	5,88
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	32.441.566.574,00	56.950.800,00	0,00	0,00	32.498.517.374,00	0,45
URUSAN PEMERINTAHAN	19.222.628.290,00	428.911.400,00	0,00	0,00	19.651.539.690,00	0,27

BIDANG PENANAMAN MODAL			Belanja			Rasio terhadap Total
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	23.959.221.703,00	81.854.700,00	0,00	0,00	24.041.076.403,00	Belanja Daerah (%) 0,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	547.332.940,00	226.179.000,00	0,00	0,00	773.511.940,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	882.829.696,00	272.061.000,00	0,00	0,00	1.154.890.696,00	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	587.529.593.534,00	3.993.584.500,00	0,00	0,00	591.523.178.034,00	8,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	542.052.284,00	175.000.000,00	0,00	0,00	717.052.284,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.198.832,00	0,00	0,00	0,00	570.198.832,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	197.867.259.946,00	9.686.252.500,00	0,00	0,00	207.553.512.446,00	2,87
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	24.916.618.956,00	2.873.500.000,00	0,00	0,00	27.790.118.956,00	0,38
URUSAN PEMERINTAHAN	14.777.057.388,00	0,00	0,00	0,00	14.777.057.388,00	0,20

BIDANG PARIWISATA			Belanja			Rasio terhadap Total
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	87.649.268.710,00	4.269.723.800,00	0,00	0,00	91.918.992.510,00	Belanja Daerah (%) 1,27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	40.963.976.684,00	982.373.700,00	0,00	0,00	41.946.350.384,00	0,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	536.141.800,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1.036.141.800,00	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.578.388.840,00	1.009.111.000,00	0,00	0,00	21.587.499.840,00	0,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.385.648.568,00	51.544.000,00	0,00	0,00	8.437.192.568,00	0,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	60.159.000,00	0,00	0,00	0,00	60.159.000,00	0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	443.978.931.165,00	18.260.238.175,00	0,00	0,00	462.239.169.340,00	6,40
SEKRETARIAT DAERAH	199.996.880.578,00	17.037.403.175,00	0,00	0,00	217.034.283.753,00	3,00
SEKRETARIAT DPRD	243.982.050.587,00	1.222.835.000,00	0,00	0,00	245.204.885.587,00	3,39
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	299.159.891.764,00	16.147.659.251,00	50.000.000.000,00	1.682.039.834.938,00	2.047.347.385.953,00	28,34

PERENCANAAN	25.039.493.821,00	3.038.909.498,00	Belanja 0,00	0,00	28.078.403.319,00	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
KEUANGAN	191.903.495.422,00	10.967.090.753,00	50.000.000.000,00	1.682.039.834.938,00	1.934.910.421.113,00	26,73
KEPEGAWAIAN Urusan Pemerintahan	48.024.222.099,00	934.658.900,00	0,00	0,00	48.958.880.999,00	0,68
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	877.977.592,00	0,00	0,00	0,00	877.977.592,00	0,01
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.023.045.541,00	799.180.000,00	0,00	0,00	25.822.225.541,00	0,36
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	8.291.657.289,00	407.820.100,00	0,00	0,00	8.699.477.389,00	0,12
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	37.581.069.855,00	5.904.034.301,00	0,00	0,00	43.485.104.156,00	0,60
INSPEKTORAT DAERAH	37.581.069.855,00	5.904.034.301,00	0,00	0,00	43.485.104.156,00	0,60
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	36.169.453.868,00	337.021.500,00	0,00	0,00	36.506.475.368,00	0,51
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.169.453.868,00	337.021.500,00	0,00	0,00	36.506.475.368,00	0,51
	4.304.845.828.025,00	1.188.421.478.020,00	50.000.000.000,00	1.682.039.834.938,00	7.225.307.140.983,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:
   a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

      Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp3.209.797.292.066,00 atau 44,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
      1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.830.303.265.840,00 atau 25,33% dari total belanja daerah;
      2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp654.678.412.984,00 atau 9,06% dari total belanja daerah;
      3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp619.138.994.824,00 atau 8,57% dari total belanja daerah;

	4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2.163.303.864,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp69.757.548.925,00 atau 0,97% dari total belanja daerah; dan 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp33.755.765.629,00 atau 0,47% dari total belanja daerah. b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Rp1.218.378.201.654,00 atau 16,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rp34.247.109.600,00 atau 0,47% dari total belanja daerah; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp2.306.484.192,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp2.936.981.156,00 atau 0,04% dari total belanja daerah; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Rp311.272.200,00 atau 0,004% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rp4.182.202.861,00 atau 0,06% dari total belanja daerah;	

	6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp326.868.988,00 atau 0,005% dari total belanja daerah; 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp29.020.047.992,00 atau 0,40% dari total belanja daerah; 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp603.494.788,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rp48.548.980.698,00 atau 0,67% dari total belanja daerah; 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rp424.964.793.926,00 atau 5,88% dari total belanja daerah; 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Rp32.498.517.374,00 atau 0,45% dari total belanja daerah; 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Rp19.651.539.690,00 atau 0,27% dari total belanja daerah; 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp24.041.076.403,00 atau 0,33% dari total belanja daerah; 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Rp773.511.940,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Rp1.154.890.696,00 atau 0,02% dari total belanja daerah; 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Rp591.523.178.034,00 atau 8,19% dari total belanja daerah; 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rp717.052.284,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; dan 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rp570.198.832,00 atau 0,01% dari total belanja daerah	

	c. Urusan Pemerintahan Pilihan Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan Rp207.553.512.446,00 atau 2,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp27.790.118.956,00 atau 0,38% dari total belanja daerah; 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp14.777.057.388,00 atau 0,20% dari total belanja daerah; 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rp91.918.992.510,00 atau 1,27% dari total belanja daerah; 4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Rp41.946.350.384,00 atau 0,58% dari total belanja daerah; 5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rp1.036.141.800,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rp21.587.499.840,00 atau 0,30% dari total belanja daerah; 7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp8.437.192.568,00 atau 0,12% dari total belanja daerah; dan 8) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Rp60.159.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah. d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Rp462.239.169.340,00 atau 6,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:	

	1) Sekretariat Daerah Rp217.034.283.753,00 atau 3,00% dari total belanja daerah; dan 2) Sekretariat DPRD Rp245.204.885.587,00 atau 3,39% dari total belanja daerah. e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rp2.047.347.385.953,00 atau 28,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari: 1) Perencanaan Rp28.078.403.319,00 atau 0,39% dari total belanja daerah; 2) Keuangan Rp1.934.910.421.113,00 atau 26,78% dari total belanja daerah; 3) Kepegawaian Rp48.958.880.999,00 atau 0,68% dari total belanja daerah; 4) Pendidikan dan Pelatihan Rp877.977.592,00 atau 0,01% dari total belanja daerah; 5) Penelitian dan Pengembangan Rp25.822.225.541,00 atau 0,36% dari total belanja daerah; dan 6) Pengelolaan Penghubung Rp8.699.477.389,00 atau 0,12% dari total belanja daerah. f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Rp43.485.104.156,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah Rp43.485.104.156,00 atau 0,60% dari total belanja daerah.	

g. Unsur Pemerintahan Umum
Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum Rp36.506.475.368,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Rp36.506.475.368,00 atau 0,51% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:
   a. SPM Pendidikan
   Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp354.122.043.948,00 atau 19,35% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.830.303.265.840,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:
      1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp197.654.780.836,00;

	2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp138.226.365.656,00; 3) Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Rp62.262.900,00; dan 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Rp18.178.634.556,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah; 2) 100% Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus; sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. b. SPM Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp168.377.000,00 atau 0,03% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp654.678.412.984,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp59.265.000,00; dan	

	2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp109.112.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan; dan 2) 100% Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan; sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. c. SPM Pekerjaan Umum Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Rp42.053.153.568,00 atau 6,79% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp619.138.994.824,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp31.840.746.668,00; dan 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp10.212.406.900,00;	

	harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp859.469.776,00 atau 39,73% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp2.163.303.864,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rp436.212.688,00; dan 2) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Rp423.257.088,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:	

	1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni; sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018. e. SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp20.907.258.236,00 atau 29,97% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp69.757.548.925,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Rp20.774.858.236,00; dan 2) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Rp132.400.000,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk provinsi yang terdiri dari 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada di provinsi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.	

	f. SPM Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp5.026.318.968,00 atau 14,89% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp33.755.765.629,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rp56.624.400,00; 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Rp1.358.225.668,00; 3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Rp971.133.000,00; 4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Rp2.384.398.100,00; dan 5) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Rp2.640.335.900,00; indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari: 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti; 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti; 4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;	

	sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi. Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah: a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: 1) pertumbuhan ekonomi 5,3% s.d. 5,9%; 2) tingkat pengangguran terbuka 5,3% s.d. 6,0%; 3) rasio gini 0,375 s.d. 0,378; dan 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%. b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator: 1) indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan 2) tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%. Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:	

	a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp232.455.440.886,00 atau 3,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi *global*, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.	

	Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.036.141.800,00; 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp26.480.536.148,00; 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp68.375.437.518,00; 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.991.071.852,00; 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp32.498.517.374,00; 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp27.737.683.954,00;	

	7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp21.737.595.248,00; dan 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp26.598.456.992,00. b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp186.793.173.769,00 atau 2,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Provinsi Bali pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan. c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.608.644.429.476,00 atau 36,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:	

	1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Mengentaskan kemiskinan; dan 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu: 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp603.494.788,00; 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp33.775.765.629,00; 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp654.578.696.184,00;	

	4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.842.907.965.024,00; 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp25.694.460.095,00; 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp16.836.938.156,00; dan 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp34.247.109.600,00. d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp591.523.178.034,00 atau 8,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:	

	1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif. Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp485.017.260.703,00; 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp44.609.945.783,00; 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan	

	4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp61.895.971.548,00. e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp483.369.377.817,00 atau 6,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar; 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan; 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK. Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:	

	1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp109.738.318.099,00; 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp324.290.423.588,00; 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp49.340.636.130,00; 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan 5) Transformasi *Digital* (PP5) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp380.490.741.081,00. f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp71.083.386.791,00 atau 0,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan	

	kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*. Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp46.128.553.245,00; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp24.954.833.546,00; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023.	

	g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp3.051.438.154.210,00 atau 42,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya. Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut: 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;	

	2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu: 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp245.204.885.587,00; 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023; 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp49.127.462.415,00; 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.720.599.330.840,00; dan 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp36.506.475.368,00. Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:	

Tabel. 6

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional	R-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	232.455.440.886,00	3,22
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	186.793.173.769,00	2,59
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	2.608.644.429.476,00	36,10
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	591.523.178.034,00	8,19
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	483.369.377.817,00	6,69
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	71.083.386.791,00	0,98
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	3.051.438.154.210,00	42,23
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.225.307.140.983,00	100,00
	Total Belanja Daerah	7.225.307.140.983,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Provinsi Bali untuk mempertahankan konsistensi penyediaan alokasi anggaran dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Provinsi Bali pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022, meliputi:

	a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali sebesar 5,3% s.d 5,8%; b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Jawa-Bali sebesar 6,9% s.d 7,6%; serta c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Jawa-Bali sebesar 6,0% s.d. 6,7%. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Jawa-Bali sebesar 73,05% s.d 82,43%. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu: a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta *global*; b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM; d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan	

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2023. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 7 sebagai berikut :

Tabel. 7

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pangan, Sandang dan Papan	171.778.978.539,00	2,38
2.	Kesehatan dan Pendidikan	2.510.343.302.299,00	34,74
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	34.454.237.600,00	0,48
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	602.552.292.994,00	8,34
5.	Pariwisata	14.777.057.388,00	0,20
6.	Penguatan Infrastruktur	1.096.647.097.016,00	15,18
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.794.754.175.147,00	38,68
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	7.225.307.140.983,00	100,00
	Total Belanja Daerah	7.225.307.140.983,00	

5. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan

	Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk: a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*; yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	

	Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 Rp35.852.785.316,00 yang diuraikan sebagai berikut: a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan Rp22.095.000.000,00, yang diuraikan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp22.095.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali. b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup Rp8.772.112.448,00, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp263.962.088,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rp111.485.500,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; 3. Program Pengembangan Ekspor Rp14.629.700,00; 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp793.063.540,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp48.385.448,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp7.269.009.772,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; dan 7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Rp271.576.400,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* Rp4.985.672.868,00, yang diuraikan sebagai berikut:	

	1) Program Rehabilitasi Sosial Rp4.726.120.168,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp3.614.900,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; dan 3) Program Penanganan Bencana Rp255.937.800,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud. 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:	

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.882.762.303.131,00 atau 26,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan	R-APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah (Rp)		
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:		1.830.303.265.840,00	97,21
	1) Belanja Operasi:	1.456.923.957.860,00		77,38
	a. belanja pegawai;	1.057.907.216.098,00		56,19
	b. belanja barang dan jasa;	286.178.751.762,00		15,20
	c. belanja hibah;	94.087.990.000,00		5,00
	d. belanja bantuan sosial.	18.750.000.000,00		1,00
	2) Belanja Modal;	373.379.307.980,00		19,83
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:		27.700.908.604,00	1,47
	1) Belanja Operasi:	27.700.908.604,00		1,47
	a. belanja pegawai;	-		-
	b. belanja barang dan jasa;	27.700.908.604,00		1,47
	c. belanja hibah;	-		-
	d. belanja bantuan sosial.	-		-
	2) Belanja Modal;	-		-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:		717.052.284,00	0,04
	1) Belanja Operasi:	542.052.284,00		0,03
	a. belanja pegawai;	-		-

No.	Komponen Perhitungan	R-APBD 2023		% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
		Jumlah (Rp)		
	b. belanja barang dan jasa;	542.052.284,00		0,03
	c. belanja hibah;	-		-
	d. belanja bantuan sosial.	-		-
	2) Belanja Modal;	175.000.000,00		0,01
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:		24.041.076.403,00	1,28
	1) Belanja Operasi:	23.959.221.703,00		1,27
	a. belanja pegawai;	-		-
	b. belanja barang dan jasa;	14.438.021.703,00		0,77
	c. belanja hibah;	8.550.000.000,00		0,4
	d. belanja bantuan sosial.	971.200.000,00		0,05
	2) Belanja Modal;	81.854.700,00		0,004
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		0,00	0,00
	1) Belanja Transfer:	0,00		0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00		0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+e)		1.882.762.303.131,00	
3.	Total Belanja Daerah		7.225.307.140.983,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		26,06%	

		Telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Provinsi Bali. Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk Program pada Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Rp1.882.762.303.131,00 atau 100,00% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp1.079.375.424.058,00 atau 57,33% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan 2) Program Pengelolaan Pendidikan Rp746.593.945.698,00 atau 39,65% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.	

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp735.655.451.492,00 atau 11,23% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

No.	Komponen Perhitungan	R-APBD 2023		% dari total anggaran kesehatan
		Jumlah (Rp)		
1.	a. Urusan bidang Kesehatan:		654.678.412.984,00	88,99
	1) Belanja Operasi:	556.911.767.725,00		75,70
	a. belanja pegawai;	307.380.051.574,00		41,78
	b. belanja barang dan jasa;	249.531.716.151,00		33,92
	c. belanja hibah;	-		-
	d. belanja bantuan sosial.	-		-
	2) Belanja Modal:	97.766.645.259,00		13,29
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		80.977.038.508,00	11,01
	1) Belanja Transfer:	80.977.038.508,00		11,01
	Belanja bantuan keuangan	80.977.038.508,00		11,01
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		735.655.451.492,00	
3.	Total Belanja Daerah		7.225.307.140.983,00	
4.	Gaji ASN		673.467.877.001,00	
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		6.551.839.263.982,00	
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		11,23%	

	Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Provinsi Bali. Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut: 1) Program pada urusan bidang kesehatan Rp654.678.412.984,00 atau 88,99% dari total anggaran kesehatan, antara lain diuraikan dalam: a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp258.712.141.246,00 atau 35,17% dari total anggaran kesehatan; dan b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp39.890.997.316,00 atau 5,42% dari total anggaran kesehatan. 2) Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan Rp80.977.038.508,00 atau 11,01% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan dalam Belanja Transfer Rp80.977.038.508,00 atau 11,01% dari total anggaran kesehatan. Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak	

balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp460.472.400,00 atau 0,06% dari total anggaran kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

c. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	7.225.307.140.983,00
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daeral dan/atau desa:	
	a. belanja bagi hasil	1.157.165.031.430,00
	b. belanja bantuan keuangan	524.874.803.508,00
	Jumlah (a+b)	1.682.039.834.938,00
3.	Selisih (1-2)	5.543.267.306.045,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	2.217.306.922.418,00

Tabel. 11
Belanja Infrastruktur Daerah

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
1	a) Belanja Modal		1.188.421.478.020,00
	1) Tanah	2.500.000.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	219.361.663.247,00	
	3) Bangunan dan Gedung	719.116.079.563,00	
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	193.659.633.500,00	
	5) Aset tetap lainnya	53.784.101.710,00	
	6) Aset lainnya	-	
	b) Belanja pemeliharaan		33.133.860.513,00
2	a) Belanja Hibah	230.135.350.000,00	
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	
	c) Belanja Bantuan Keuangan	355.757.365.000,00	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		1.807.448.053.533,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa Rp2.217.306.922.418,00, sesuai maksud butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027. d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali Rp43.485.104.156,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun 2023, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat Rp7.775.436.084,00 atau 0,11% dari total belanja daerah; dan 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan Rp35.709.668.072,00 atau 0,49% dari total belanja daerah; yang antara lain tercantum pada: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Tertentu Rp3.809.386.648,00; 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp2.099.000.320,00; dan 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp1.949.994.794,00; belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar). Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

	harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan;	

	e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Penyediaan anggaran yang tercantum pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan Rp877.977.592,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp877.977.592,00, belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Bali, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. 7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran TP-PKK Rp9.319.852.032,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim	Pengalokasian anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah tersebut telah memenuhi paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang tidak hanya diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan dan Pelatihan, tetapi juga pada perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM.

		Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp9.319.852.032,00, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui: 1) upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;	

	5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan Pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkoperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat.	

	7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya. 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan anggaran FORKOPIMDA Rp715.092.192,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing, dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp715.092.192,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran FKUB Rp301.239.800,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp301.239.800,00, sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun	Penyediaan alokasi anggaran untuk FKUB sebesar Rp301.239.800,00 telah melalui koordinasi antara SKPD leading dengan FKUB, dan telah mengalami peningkatan dari alokasi anggaran FKUB dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.435.800,00. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

	2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial akan dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

	e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.473.370.019.816,00 atau 58,41% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah Rp2.522.319.515.693,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi alokasi anggaran dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah berkomitmen atas pemenuhan alokasi anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.	

	f. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Rp24.144.100,00 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada: 1) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp15.804.100,00; dan 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp8.340.000,00; agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah. g. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Rp513.318.792,00; dan 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp477.467.440,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Penyediaan alokasi anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku telah melalui koordinasi SKPD leading. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran akan disesuaikan dalam Pergeseran Anggaran dan/atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

	h. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada: 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp426.370.040,00; 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp412.194.900,00; dan 3) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Rp2.000.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. i. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp2.188.361.084,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. j. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda Dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengalokasikan anggaran pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda secara memadai, dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub kegiatan sebagaimana maksud butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan	

	Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi: 1) pembentukan Paskibraka; 2) pelaksanaan tugas Paskibraka; 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila; 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila; 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. k. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: 1) Belanja Pegawai BLUD Rp81.414.557.290,00; 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp119.932.282.011,00; 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp41.555.451.434,00; 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp19.971.588.555,00; 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp520.000.000,00; dan 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp1.874.043.710,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	8. Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp4.304.845.828.025,00 atau 59,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. Belanja Pegawai Jumlah alokasi Belanja Pegawai Rp2.071.941.692.196,00 atau 28,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp926.838.996.361,00 atau 12,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok	

		dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada: a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut: (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp53.210.795.587,00 yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel.12 sebagai berikut:	

Tabel.12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok ASN	673.467.877.001,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	70.897.572.034,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.672.645.290,00
	d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	57.082.297.560,00
	e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.583.930.185,00
	f.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	688.469.791.010,00
2	Jumlah Belanja		1.507.174.113.080,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		60.286.964.523,20
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD		53.210.795.587,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)		(7.076.168.936,20)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp60.286.964.523,20 atau terdapat selisih kurang Rp7.076.168.936,20.

Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN dihitung berdasarkan batas paling tinggi Gaji atau Upah (Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan) ASN per bulan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU (Peserta Penerima Upah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp12.000.000,00, sehingga perhitungan alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp175.000.000,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2023 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.866.203.603,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	200.000.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.550.000.000,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	204.000.000,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	-
2	Jumlah Belanja	4.820.203.603,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	192.808.144,12
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	175.000.000,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	(17.808.144,12)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun

Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggotan DPRD dihitung berdasarkan batas paling tinggi Gaji atau Upah (uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya) bagi pimpinan dan anggota DPRD per bulan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU (Peserta Penerima Upah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp12.000.000,00, sehingga perhitungan alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp192.808.144,12 atau terdapat selisih kurang Rp17.808.144,12.

(3) Belanja /WKDH Rp8.836.800,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan APBD TA 2023 Jumlah (Rp)
1	Belanja		
	a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
	b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.240.000,00
	c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
2	Jumlah Belanja		220.920.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)		8.836.800,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD		8.836.800,00
	Selisih (angka 4 - angka 3)		0,00

	Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut: (1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:	

		(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.541.930.535,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp4.406.501.854,00; belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% dari gaji pokok Rp1.616.322.904,80, atau terdapat selisih kurang Rp74.392.369,80; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp4.848.968.714,41 atau terdapat selisih kurang Rp442.466.860,41. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN akan disesuaikan kembali dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, diuraikan pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp181.440,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp544.320,00; dan (c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp8.850.000,00; (d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp24.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan	

	dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Rp283.069.548,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (termasuk istri/suami dan dua anak) serta Pimpinan dan Anggota DPRD (tidak termasuk istri/suami dan anak) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2018 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain: a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp58.284.033.531,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada: (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.866.203.603,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 15 sebagai berikut:	

Tabel. 15
Belanja Uang Representasi DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023			
	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	2.400.000,00	7.200.000,00
3	Anggota (75% dari uang reprentasi Ketua DPRD)	51	2.250.000,00	114.750.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	55		124.950.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)			1.749.300.000,00
Alokasi uang representasi pada APBD				1.866.203.603,00
Selisih lebih				116.903.603,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, mengingat besaran alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp1.749.300.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp116.903.603,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sesuai amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD telah disesuaikan kembali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

	(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.550.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp204.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 16 sebagai berikut:	Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Tabel. 16
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	55	3.000.000,00	9.900.000.000,00
	Jumlah Pagu			9.900.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD			9.900.000.000,00
3	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mempertahankan konsistensi dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Sedang)	55	3.000.000,00	2.475.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD			2.475.000.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar secara konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp25.690.929.928,00; dan

		(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp14.800.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.	

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	144.000.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 3 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	216.000.000,00
	Jumlah Dana Operasional		360.000.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD		360.000.000,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar secara konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dimaksud dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan

	keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sesuai amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. 4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp13.200.000,00 atau 0,0002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. 5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp6.639.291.450,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target PAD dalam Peraturan	

	Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp4.426.194.300.000,00 yaitu Rp6.639.291.450,00. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. 6) Tambahan Penghasilan ASN Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp688.469.791.010,00 atau 9,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp476.242.285.271,00; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN Rp121.647.250,00; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp51.570.123.841,00; dan d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp160.535.734.648,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Tahun Anggaran 2023 Rp688.469.791.010,00 mengalami peningkatan Rp393.940.143.574,00 dibandingkan dengan TPP ASN Tahun	Alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Tahun Anggaran 2023 Rp688.469.791.010,00 mengalami peningkatan Rp145.032.011.558,00 dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2022 Rp543.437.779.452,00. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali akan mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri mengingat besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 lebih besar dibandingkan dengan alokasi TPP ASN TA 2022, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

	Anggaran 2022 Rp294.529.647.436,00. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri mengingat besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 lebih besar dibandingkan dengan alokasi TPP ASN TA 2022, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selain itu, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 juga memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 dan surat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 7) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp309.674.473.494,00 atau 4,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp62.126.944.500,00; b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp337.470.512,00; c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp215.706.720.000,00;	

	d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp4.237.500.000,00; e) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp20.823.643.482,00; f) Belanja Honorarium Rp5.175.875.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp4.698.145.000,00; (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp472.630.000,00; dan (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp5.100.000,00. g) Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp1.266.320.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada: a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8)	

		Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. b) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan. c) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. d) Butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang melaksanakan pemanfaatan Barang	

	Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.336.398.037.673,00 atau 18,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja: 1) Belanja Barang Penganggaran Belanja Barang Rp184.619.326.458,00 atau 2,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis Rp184.619.326.458,00 atau 2,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp26.762.684.575,00; b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.655.662.300,00:	

		c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp5.707.075.810,00; d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp34.935.805.129,00; e) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp8.984.763.438,00; f) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp6.595.765.500,00; g) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp46.785.145.000,00; h) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.111.974.771,00; dan i) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp6.930.480.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.010.980.000,00; dan b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp109.600.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka	

	melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2) Belanja Jasa Penganggaran Belanja Jasa Rp671.515.712.515,00 atau 9,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor Rp543.175.726.029,00 atau 7,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp9.005.350.000,00; (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp6.439.985.000,00; (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp22.441.434.000,00; (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp59.286.476.800,00; (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp58.185.641.072,00; (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp12.203.720.352,00;	

		(7) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp13.416.150.000,00; (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp164.702.123.356,00; (9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp8.915.382.800,00; (10) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp18.160.092.500,00; (11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp27.175.786.704,00; (12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp26.813.773.120,00; (13) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp12.372.284.384,00; (14) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp6.248.000.000,00; (15) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp6.080.640.248,00; (16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp16.151.050.000,00; (17) Belanja Tagihan Listrik Rp22.317.426.389,00; dan (18) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp17.520.514.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam	

	perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp66.321.907.560,00 atau 0,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja (1) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang tercantum pada Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp37.656.874.480,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana	

	dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. (2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp13.179.444.276,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp791.079.980,00; dan (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp13.165.708.824,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).iv, butir D.16.a.2).c).(2).(d) dan butir D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selain itu, untuk penyediaan alokasi Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.528.800.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Tanah Rp48.000.000,00 atau 0,0007% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran	

		2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp6.000.000,00; dan (b) Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp42.000.000,00. (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp24.916.705.229,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp918.434.000,00; (b) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp9.011.562.000,00; (c) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp4.367.580.256,00; (d) Belanja Sewa System/Power Supply Rp890.000.000,00; (e) Belanja Sewa Peralatan Umum Rp2.296.100.000,00; dan (f) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya Rp3.280.000.000,00. (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp17.941.850.000,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara	

	lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp13.902.500.000,00; (4) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp15.262.457,00 atau 0,00021% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya Rp10.000.000,00; (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp1.469.500.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp596.500.000,00; (6) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp50.000.000,00 atau 0,0007% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise Rp50.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan	

	dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.425.678.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp116.262.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Rp112.778.000,00; dan (c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Rp906.638.000,00. (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp9.017.121.136,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

		Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp1.600.000.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp1.620.000.000,00; dan (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp4.776.892.136,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

		e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp7.133.962.104,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp3.349.457.104,00; (2) Belanja Bimbingan Teknis Rp100.000.000,00; (3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp3.684.505.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Rp14.268.472.376,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii	

		Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	3) Belanja Pemeliharaan Rp33.133.860.513,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp19.353.034.105,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp9.728.780.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.300.000.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp1.145.978.985,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.113.655.000,00; dan (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp1.428.880.000,00. b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.359.325.536,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.609.474.904,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp5.016.000.000,00; dan (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp2.171.850.632,00.	

	c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp4.208.500.872,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp2.760.208.183,00; dan (2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp690.099.108,00. d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp103.000.000,00 atau 0,0014% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman Rp50.000.000,00; e) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp110.000.000,00 atau 0,0015% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp110.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri	

	Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.	
	4) Belanja Perjalanan Dinas Rp168.862.879.500,00 atau 2,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp150.250.589.500,00 atau 2,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp93.034.725.500,00; (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp38.886.597.000,00; dan (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp18.329.267.000,00. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp18.612.290.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Luar Negeri Rp18.612.290.000,00; harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target	Belanja perjalanan dinas dialokasikan berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

		kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah	

		Provinsi Bali dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam rangka mencegah terjadinya penularan COVID-19 Varian Omicron di Indonesia, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a) Sekretariat Daerah Rp14.438.790.500,00 atau 6,61% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp218.321.534.869,00; dan b) Sekretariat DPRD Rp87.670.641.000,00 atau 35,75% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp245.204.885.587,00; dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan	

	alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat. 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp29.892.646.676,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp20.784.586.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp13.604.136.000,00; dan b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp9.108.060.676,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp8.717.470.008,00;	

		dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 6) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp128.441.330.000,00 atau 1,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	c. Belanja Subsidi Penganggaran Belanja Subsidi Rp10.025.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Belanja subsidi dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat agar hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana amanat Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal, belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dianggarkan dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Rp886.481.098.156,00 atau 12,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada: 1) Belanja Hibah Rp856.759.898.156,00 atau 11,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp746.204.053.156,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp476.377.090.756,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp476.377.090.756,00; dan (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp269.826.962.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp205.707.162.400,00. b) Belanja Hibah Dana BOS Rp94.087.990.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp94.087.990.000,00;	

	2) Belanja Bantuan Sosial Rp29.721.200.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp29.721.200.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Rp29.721.200.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya untuk dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata, dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang	Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial telah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

		menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

		Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp16.467.855.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	e. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp1.188.421.478.020,00 atau 16,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada: 1) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD; 2) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; dan 3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur;	

		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada: 1) Belanja Modal Tanah Rp2.500.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp2.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Rp2.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp2.500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp219.361.663.247,00, atau 3,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:	

	a) Belanja Modal Alat Besar Rp2.191.000.000,00, atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.900.000.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Excavator Rp1.300.000.000,00; dan (b) Belanja Modal Compacting Equipment Rp600.000.000,00. (2) Belanja Modal Alat Bantu Rp291.000.000,00, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Bantu Lainnya Rp265.000.000,00; b) Belanja Modal Alat Angkutan Rp18.330.613.000,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp18.330.613.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp10.154.999.000,00; (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp7.501.000.000,00; dan (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp674.614.000,00. c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp288.338.270,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Ukur Rp288.338.270,00, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Ukur Lainnya Rp200.000.000,00. d) Belanja Modal Alat Pertanian Rp4.016.705.800,00, atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun	

	Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp4.016.705.800,00, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp943.925.100,00; dan (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian Rp3.072.780.700,00. e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp13.196.200.133,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Kantor Rp2.164.973.032,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp930.757.500,00; dan (b) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp1.233.298.332,00. (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp10.402.087.101,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Mebel Rp6.064.042.100,00; (b) Belanja Modal Alat Pembersih Rp478.610.000,00; (c) Belanja Modal Alat Pendingin Rp2.444.976.800,00; dan (d) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.238.458.201,00. (3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp629.140.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp237.273.000,00; dan (b) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Rp302.067.000,00.	

		f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp3.875.761.985,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Studio Rp2.384.387.985,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Peralatan Studio Audio Rp1.087.625.000,00; (b) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp1.087.625.000,00; dan (c) Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp963.504.500,00. (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp1.491.374.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp1.470.000.000,00. g) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.889.963.280,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.011.242.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Rp734.242.000,00; dan (2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp6.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp6.000.000.000,00. h) Belanja Modal Komputer Rp14.554.985.272,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

	(1) Belanja Modal Komputer Unit Rp11.438.630.074,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Computer Rp11.313.630.074,00. (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.116.355.198,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp1.925.457.998,00; dan (b) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp1.032.046.000,00. i) Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp221.745.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp221.745.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Elektronik/Electric Rp221.745.000,00. j) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.336.749.773,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp1.336.749.773,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp796.900.000,00; dan (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp539.849.773,00. 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp719.116.079.563,00 atau 9,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung Rp698.944.491.008,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	

	a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp698.519.491.008,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp31.412.253.692,00; (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp781.000.000,00; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp77.699.503.224,00; (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.232.135.407,00; (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp226.061.080.900,00; (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp799.000.000,00; (7) Belanja Modal Bangunan Terbuka Rp936.930.000,00; (8) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp351.223.108.000,00; (9) Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus Rp1.332.000.000,00; (10) Belanja Modal Taman Rp2.018.725.000,00; dan (11) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp3.726.430.835,00. b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp425.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp425.000.000,00. 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp193.659.633.500,00 atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja: a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp163.574.045.000,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Jalan Rp163.574.045.000,00, yang diuraikan ke dalam sub	

	rincian objek Belanja Modal Jalan Provinsi Rp163.494.045.000,00; b) Belanja Modal Bangunan Air Rp24.680.574.000,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp21.196.574.000,00, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja: (a) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi Rp350.000.000,00; dan (b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp20.846.574.000,00. (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.360.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp3.360.000.000,00. c) Belanja Modal Instalasi Rp3.330.494.500,00, yang antara lain diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp2.037.700.000,00, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp2.920.000.000,00; dan (2) Belanja Modal Instalasi Lain Rp231.153.400,00. d) Belanja Modal Jaringan Rp1.554.520.000,00, yang antara lain diuraikan pada rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp911.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp911.000.000,00; dan (2) Belanja Modal Jaringan Listrik Rp462.150.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp462.150.000,00. 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp53.784.101.710,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	

	Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp175.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp175.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum Rp175.000.000,00; dan b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp292.328.000,00, atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp292.328.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Software Rp292.328.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007,	

		sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan kendaraan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp32.772.496.600,00 atau 0,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Rp32.770.696.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Rp20.310.691.117,00; b) Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic Rp1.117.579.600,00; dan c) Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi Rp11.342.425.883,00. 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.889.963.280,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Rp2.800.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya Rp2.800.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.	

	9. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp50.000.000.000,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 10. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp1.682.039.834.938,00 atau 23,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada: a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.157.165.031.430,00 atau 16,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Rp1.455.094.698.500,00 x 30% = Rp436.528.409.550,00; 2) Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp757.265.417.800,00 x 30% = Rp227.179.625.340,00;	

	3) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp390.000.000.000,00 x 70% = Rp273.000.000.000,00; 4) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp3.200.000.000,00 x 50% = Rp1.600.000.000,00; dan 5) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Rp312.652.852.200,00 x 70% = Rp218.856.996.540,00. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target pajak daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan butir D.16.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. b. Belanja Bantuan Keuangan Rp524.874.803.508,00 atau 7,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp447.884.403.508,00 atau 6,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp76.990.400.000,00 atau 1,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka kerja sama	

		daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, dalam pelaksanaanya Pemerintah Daerah Provinsi Bali tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dirinci sebagaimana Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	R-APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.952.855.860.215,00	2.050.341.671.769,00	1.030.043.582.983,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	192.855.860.215,00	850.341.671.769,00	1.030.043.582.983,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.760.000.000.000,00	1.200.000.000.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	105.000.000.000,00	437.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	187.500.000.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

	1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. 3. Penerimaan Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan Rp1.030.043.582.983,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp1.030.043.582.983,00 atau 14,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.225.307.140.983,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, sesuai maksud butir E.3.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 4. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp437.500.000.000,00, yang diuraikan ke dalam objek belanja:	

	a. Pembentukan Dana Cadangan Rp150.000.000.000,00 atau 2,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sepanjang Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan tersebut paling sedikit memuat: 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 4) sumber dana cadangan; dan 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Penggunaan dana cadangan dimaksud harus diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.3.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.2)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Pembentukan Dana Cadangan Rp150.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

	b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp100.000.000.000,00, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp100.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dengan Jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp644.912.000.000,00.

	c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp187.500.000.000,00 atau 2,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud sesuai maksud pasal 70 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.3.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan Belanja Bunga dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pihak ketiga.	Pemerintah Provinsi Bali telah menganggarkan Belanja Bunga dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, atas kewajiban Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada pihak ketiga.

IV	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS**	
	1. Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel. 20 sebagai berikut: Tabel. 20 Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS 2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah	

No.	Keterangan	RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	124 program	5.818.708.143.125	124 program	5.631.208.143.125	127 program	7.225.307.140.983
2.	Jumlah Kegiatan	231 kegiatan		231 kegiatan		234 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	543 sub kegiatan		543 sub kegiatan		570 sub kegiatan	

	Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja	

	dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat.	
	Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati.

V	**KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD**	
	Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut: 1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang dialokasikan dalam capaian RPJMD pada Tahun 2023 Rp6.559.769.864.222,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.225.307.140.983,00; dan 2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2023 sejumlah 132 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sejumlah 127 program. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperhatikan: 1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan	

	2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2019-2023.	
VI.	**REKOMENDASI**	
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.	

	B. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi Bali, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk: 1. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan; 2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan 3. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021. C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali	

	sebesar 5,3% s.d 5,8%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 6,9% s.d 7,6%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,0% s.d. 6,7% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound)* kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022. Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. D. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022. E. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan	

	berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. F. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar dialihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan	

	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat. I. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menganggarkan TPP ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada: 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Bali secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan	

	fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan. J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. K. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan	

	aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:	

	1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*; 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali	

	harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Keadaan darurat meliputi: 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: 1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan/atau masyarakat. O. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk: 1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun	

	2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022. 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan	

	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui: a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan	

	dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub	

	rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya. h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. 6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut: a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti; 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;	

	4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti; 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi; 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. c. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali serta mengalokasikan anggaran pada Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka percepatan penghapusan	

	kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM. e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 7. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain untuk Madrasah, pondok pesantren serta Pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi	

	dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. P. Sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor S-194/PK/2022 tanggal 28 November 2022 hal Pemberitahuan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya, maka untuk keperluan penganggaran DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di dalam APBD, dan jenis-jenis kegiatan serta sub kegiatan yang dapat didanai dari DAU yang ditentukan penggunannya tersebut dapat berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selanjutnya, hal-hal pokok yang diatur terkait penggunaan DAU yang ditentukan penggunannya antara lain sebagai berikut:	

	1. DAU untuk Penggajian Formasi PPPK DAU dimaksud digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang diangkat pada Tahun 2023. 2. DAU untuk Pendanaan Kelurahan DAU dimaksud digunakan untuk memberi dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik. 3. DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum DAU dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan peningkatan capaian SPM dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Selain itu, diatur pula bahwa DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pekerjaan Umum tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN, tidak dapat digunakan untuk belanja honorarium, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan. Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau	

	2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1. nama kegiatan; 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3. jumlah anggaran; dan 4. alokasi anggaran per tahun Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. R. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan	

	peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: 1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan 5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Developmen Index* (*SDI*) di daerah. T. Dalam rangka menunjang kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan internasional Piala Dunia *FIFA U-20* Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021, Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah (*venue*) pertandingan agar menyediakan dukungan penganggaran guna pemeliharaan infrastruktur utama dan	

	pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berkaitan dengan hal tesebut, Gubernur Bali agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia *FIFA U-20* tahun 2023. Selanjutnya, Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Badung agar: 1. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021; dan 2. memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. U. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 29 Desember 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI

KETUA,

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si.

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
Dr. I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E.,MM.,Ak.,C.A.	I NYOMAN SUYASA, ST	TJOK GDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.IP., MAP.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8 Agustus 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp7.662.807.140.983,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah Rp. 6.933.947.319.883,00
b. belanja daerah Rp. 7.522.393.048.914,00
   defisit Rp. (588.445.729.031,00)
c. pembiayaan daerah
   1. penerimaan Rp. 1.025.945.729.031,00

2. pengeluaran	Rp. 437.500.000.000,00	
pembiayaan netto		Rp. 588.445.729.031,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.933.947.319.883,00 (enam triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.731.419.182.089,00 (empat triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.960.437.850.589,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp59.595.436.500,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp810.711.860.000,00 (delapan ratus sepuluh miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp900.674.035.000,00 (sembilan ratus miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.146.820.137.794,00 (dua triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.146.820.137.794,00 (dua triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp55.708.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. pendapatan hibah;
    b. dana darurat; dan
    c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp55.708.000.000,00 (lima puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.522.393.048.914,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.343.716.844.932,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja bunga;
    d. belanja subsidi;
    e. belanja hibah; dan
    f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.072.564.871.779,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 1.348.709.586.876,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp10.025.000.000,00 (sepuluh miliar dua puluh lima juta rupiah).
(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp881.696.186.277,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp30.721.200.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.419.978.951.582,00 (satu triliun empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal tanah;
    b. belanja peralatan dan mesin;
    c. belanja gedung dan bangunan;
    d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
    e. belanja aset tetap lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp182.964.805.976,00 (seratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
(3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp207.854.510.993,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp705.969.048.170,00 (tujuh ratus lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
(5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp269.502.569.533,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

(6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp53.688.016.910,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp1.708.697.252.400,00 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.186.722.448.892,00 (satu triliun seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp521.974.803.508,00 (lima ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu lima ratus delapan rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp588.445.729.031,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan;

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.025.945.729.031,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.025.945.729.031,00 (satu triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp437.500.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal;
c. pembentukan dana cadangan;
d. pemberian dana pinjaman; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(5) Pemberian dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp588.445.729.031,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp588.445.729.031,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
    d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 29 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (14-307/2022)

LAMPIRAN I

RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.731.419.182.089**
4.1.01	Pajak Daerah	2.960.437.850.589
4.1.02	Retribusi Daerah	59.595.436.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	810.711.860.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	900.674.035.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.146.820.137.794**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**55.708.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	55.708.000.000
	Jumlah Pendapatan	**6.933.947.319.883**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.343.716.844.932**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.072.564.871.779
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.709.586.876
5.1.04	Belanja Subsidi	10.025.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	881.696.186.277
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.721.200.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.419.978.951.582**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	182.964.805.976
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.854.510.993
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	705.969.048.170
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	269.502.569.533
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	53.688.016.910
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**50.000.000.000**

Kode	Uraian	Jumlah
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.708.697.252.400**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.186.722.448.892
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	521.974.803.508
	Jumlah Belanja	**7.522.393.048.914**
	Total Surplus/(Defisit)	**(588.445.729.031)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.025.945.729.031**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.025.945.729.031
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**1.025.945.729.031**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**437.500.000.000**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**437.500.000.000**
	Pembiayaan Netto	**588.445.729.031**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN II

RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**264.124.910.000**	**2.455.921.918.860**	**965.996.606.919**	**0**	**0**	**3.421.918.525.779**
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.363.500.000**	**1.455.871.352.360**	**373.430.817.880**	**0**	**0**	**1.829.302.170.240**
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.363.500.000	1.451.720.092.276	373.310.444.880	0	0	1.825.030.537.156
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0	3.238.545.812	120.373.000	0	0	3.358.918.812
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0	912.714.272	0	0	0	912.714.272
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**233.023.519.000**	**569.089.971.911**	**82.147.061.703**	**0**	**0**	**651.237.033.614**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	233.023.519.000	291.076.033.222	2.179.917.000	0	0	293.255.950.222
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0	2.629.636.392	429.266.200	0	0	3.058.902.592
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	0	9.399.147.134	1.177.369.470	0	0	10.576.516.604
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0	2.364.197.352	149.250.400	0	0	2.513.447.752
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Bali Mandara	0	161.230.497.441	69.211.144.233	0	0	230.441.641.674
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa	0	36.249.362.598	2.906.054.500	0	0	39.155.417.098
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	0	16.523.097.772	1.712.059.900	0	0	18.235.157.672
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**29.730.691.000**	**331.524.140.434**	**504.144.470.803**	**0**	**0**	**835.668.611.237**
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0	1.472.592.968	3.373.736.100	0	0	4.846.329.068
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.730.691.000	295.270.913.040	497.185.590.993	0	0	792.456.504.033
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**0**	**2.160.753.864**	**0**	**0**	**0**	**2.160.753.864**
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**0**	**67.476.582.795**	**2.317.526.500**	**0**	**0**	**69.794.109.295**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0	44.504.749.249	334.526.500	0	0	44.839.275.749
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	16.744.059.698	508.000.000	0	0	17.252.059.698
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0	6.227.773.848	1.475.000.000	0	0	7.702.773.848

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**7.200.000**	**29.799.117.496**	**3.956.730.033**	**0**	**0**	**33.755.847.529**
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.200.000	26.057.126.712	103.779.198	0	0	26.160.905.910
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0	3.741.990.784	3.852.950.835	0	0	7.594.941.619
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**6.740.592.000**	**861.794.519.853**	**401.023.987.436**	**0**	**0**	**1.262.818.507.289**
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**4.443.600.000**	**34.007.845.396**	**364.217.100**	**0**	**0**	**34.372.062.496**
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0	1.654.408.128	207.057.600	0	0	1.861.465.728
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	0	459.403.446	0	0	0	459.403.446
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.443.600.000	31.894.033.822	157.159.500	0	0	32.051.193.322
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**0**	**2.306.400.192**	**0**	**0**	**0**	**2.306.400.192**
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0	1.412.990.200	0	0	0	1.412.990.200
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0	893.409.992	0	0	0	893.409.992
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**0**	**2.965.255.704**	**0**	**0**	**0**	**2.965.255.704**
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0	1.407.811.044	0	0	0	1.407.811.044
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	1.557.444.660	0	0	0	1.557.444.660
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**0**	**311.272.200**	**0**	**0**	**0**	**311.272.200**
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	311.272.200	0	0	0	311.272.200
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**0**	**4.075.715.191**	**106.486.280**	**0**	**0**	**4.182.201.471**
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	729.284.388	0	0	0	729.284.388
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0	577.382.919	85.904.080	0	0	663.286.999
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0	2.769.047.884	20.582.200	0	0	2.789.630.084
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**0**	**326.868.988**	**0**	**0**	**0**	**326.868.988**
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	326.868.988	0	0	0	326.868.988
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**0**	**33.227.751.192**	**102.215.962**	**0**	**0**	**33.329.967.154**
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**0**	**603.494.588**	**0**	**0**	**0**	**603.494.588**
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	603.494.588	0	0	0	603.494.588
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**219.600.000**	**36.514.095.713**	**11.984.459.513**	**0**	**0**	**48.498.555.226**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	219.600.000	25.357.931.837	806.808.400	0	0	26.164.740.237
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0	1.359.475.380	231.830.500	0	0	1.591.305.880
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0	8.757.467.884	9.456.092.000	0	0	18.213.559.884
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perlengkapan Jalan	0	568.609.032	1.389.614.613	0	0	1.958.223.645
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0	470.611.580	100.114.000	0	0	570.725.580
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**0**	**71.296.927.626**	**383.182.860.881**	**0**	**0**	**454.479.788.507**
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	71.296.927.626	383.182.860.881	0	0	454.479.788.507
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**0**	**32.441.566.574**	**56.950.800**	**0**	**0**	**32.498.517.374**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	28.061.679.128	56.950.800	0	0	28.118.629.928
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0	4.379.887.446	0	0	0	4.379.887.446
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**3.600.000**	**19.044.957.160**	**606.570.000**	**0**	**0**	**19.651.527.160**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.600.000	19.044.957.160	606.570.000	0	0	19.651.527.160
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**0**	**25.023.489.203**	**117.587.200**	**0**	**0**	**25.141.076.403**
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**0**	**547.332.440**	**226.179.000**	**0**	**0**	**773.511.440**
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**0**	**870.953.696**	**283.961.000**	**0**	**0**	**1.154.914.696**
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**2.073.792.000**	**597.118.342.874**	**3.817.499.700**	**0**	**0**	**600.935.842.574**
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	2.073.792.000	98.406.175.739	785.545.900	0	0	99.191.721.639
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0	6.098.913.184	514.248.000	0	0	6.613.161.184
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0	4.174.393.076	506.756.600	0	0	4.681.149.676

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0	5.123.288.172	438.245.000	0	0	5.561.533.172
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0	483.315.572.703	1.572.704.200	0	0	484.888.276.903
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**0**	**542.052.284**	**175.000.000**	**0**	**0**	**717.052.284**
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**0**	**570.198.832**	**0**	**0**	**0**	**570.198.832**
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0	570.198.832	0	0	0	570.198.832
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**52.857.804.500**	**199.310.159.383**	**9.724.723.400**	**0**	**0**	**209.034.882.783**
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**50.613.600.000**	**25.191.615.361**	**2.873.500.000**	**0**	**0**	**28.065.115.361**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.613.600.000	22.213.009.021	0	0	0	22.213.009.021
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	0	837.661.742	0	0	0	837.661.742
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0	765.044.398	2.800.000.000	0	0	3.565.044.398
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	0	1.111.958.304	73.500.000	0	0	1.185.458.304
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0	263.941.896	0	0	0	263.941.896
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**0**	**15.151.817.368**	**0**	**0**	**0**	**15.151.817.368**
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	0	15.151.817.368	0	0	0	15.151.817.368
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**896.404.500**	**88.363.458.962**	**4.287.194.700**	**0**	**0**	**92.650.653.662**
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	896.404.500	75.924.319.052	60.000.000	0	0	75.984.319.052
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0	632.106.832	0	0	0	632.106.832
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	5.149.654.698	1.716.298.700	0	0	6.865.953.398
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0	3.253.968.116	2.460.896.000	0	0	5.714.864.116
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	3.403.410.264	50.000.000	0	0	3.453.410.264
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**1.321.800.000**	**40.913.976.684**	**982.373.700**	**0**	**0**	**41.896.350.384**
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.321.800.000	38.456.887.198	645.997.700	0	0	39.102.884.898
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0	869.872.416	300.000.000	0	0	1.169.872.416
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0	603.446.232	36.376.000	0	0	639.822.232

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0	420.278.250	0	0	0	420.278.250
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0	379.276.440	0	0	0	379.276.440
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0	184.216.148	0	0	0	184.216.148
3	**29**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**0**	**536.141.800**	**500.000.000**	**0**	**0**	**1.036.141.800**
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**0**	**20.566.519.840**	**1.030.111.000**	**0**	**0**	**21.596.630.840**
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	20.141.704.200	1.011.361.000	0	0	21.153.065.200
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0	424.815.640	18.750.000	0	0	443.565.640
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**26.000.000**	**8.526.470.368**	**51.544.000**	**0**	**0**	**8.578.014.368**
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.000.000	7.690.538.972	0	0	0	7.690.538.972
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0	835.931.396	51.544.000	0	0	887.475.396
3	**32**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**0**	**60.159.000**	**0**	**0**	**0**	**60.159.000**
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0	60.159.000	0	0	0	60.159.000
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**810.711.860.000**	**456.335.321.824**	**17.948.743.775**	**0**	**0**	**474.284.065.599**
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**	**810.711.860.000**	**211.888.861.489**	**17.192.152.775**	**0**	**0**	**229.081.014.264**
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	49.549.695.496	332.207.274	0	0	49.881.902.770
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0	83.575.349.292	6.060.334.701	0	0	89.635.683.993
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0	5.548.524.800	0	0	0	5.548.524.800
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	810.711.860.000	65.638.663.529	0	0	0	65.638.663.529
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0	2.049.710.240	215.179.800	0	0	2.264.890.040
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0	5.526.918.132	10.584.431.000	0	0	16.111.349.132
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**	**0**	**244.446.460.335**	**756.591.000**	**0**	**0**	**245.203.051.335**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**5.792.552.321.383**	**299.194.950.089**	**16.453.350.251**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**2.074.345.552.740**
5	**01**		**PERENCANAAN**	**0**	**24.962.048.121**	**3.116.326.498**	**0**	**0**	**28.078.374.619**
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	**02**		**KEUANGAN**	**5.792.458.321.383**	**191.990.526.199**	**11.183.364.753**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**1.961.871.143.352**
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.781.465.137.794	31.171.600.498	1.358.507.200	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.791.227.360.098
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	3.023.766.536	473.724.000	0	0	3.497.490.536
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	3.010.993.183.589	127.734.540.345	9.351.133.553	0	0	137.085.673.898
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0	5.694.574.084	0	0	0	5.694.574.084
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0	2.009.669.838	0	0	0	2.009.669.838
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0	2.425.012.884	0	0	0	2.425.012.884
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0	4.805.094.052	0	0	0	4.805.094.052
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0	5.112.248.248	0	0	0	5.112.248.248
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0	3.417.593.788	0	0	0	3.417.593.788
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0	2.149.864.354	0	0	0	2.149.864.354
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0	2.560.290.476	0	0	0	2.560.290.476
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0	1.886.271.096	0	0	0	1.886.271.096
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**	**0**	**48.024.222.099**	**934.658.900**	**0**	**0**	**48.958.880.999**
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	40.827.553.115	223.605.000	0	0	41.051.158.115
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0	686.836.984	261.053.900	0	0	947.890.884
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**0**	**877.977.592**	**0**	**0**	**0**	**877.977.592**
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	877.977.592	0	0	0	877.977.592
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**0**	**25.060.520.589**	**799.180.000**	**0**	**0**	**25.859.700.589**
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589
5	**07**		**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**94.000.000**	**8.279.655.489**	**419.820.100**	**0**	**0**	**8.699.475.589**
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	94.000.000	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**0**	**34.978.851.055**	**8.506.188.301**	**0**	**0**	**43.485.039.356**
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**	**0**	**34.978.851.055**	**8.506.188.301**	**0**	**0**	**43.485.039.356**

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**0**	**36.181.123.868**	**325.351.500**	**0**	**0**	**36.506.475.368**
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**0**	**36.181.123.868**	**325.351.500**	**0**	**0**	**36.506.475.368**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368
			TOTAL	**6.926.987.487.883**	**4.343.716.844.932**	**1.419.978.951.582**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**7.522.393.048.914**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III

RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI SKPD, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
RINCIAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.363.500.000**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	1.106.400.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	257.100.000	
									Jumlah Pendapatan	**1.363.500.000**	
0	**00**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.829.302.170.240**	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**747.862.862.298**	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**390.336.230.286**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	116.516.686.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	60.226.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.226.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	116.456.460.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.456.460.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02				Penambahan Ruang Kelas Baru	11.921.124.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.729.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.729.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	11.905.395.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.905.395.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	668.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	668.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	668.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05				Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06				Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	1.117.156.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.578.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07				Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	334.906.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2		BELANJA MODAL	334.906.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	334.906.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.632.733.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2		BELANJA MODAL	2.632.733.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.632.733.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.851.357.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	1		BELANJA OPERASI	763.164.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	763.164.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	2		BELANJA MODAL	6.088.193.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.088.193.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	365.255.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	5	2		BELANJA MODAL	365.255.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	365.255.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	614.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	2		BELANJA MODAL	614.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	614.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	614.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	5	2		BELANJA MODAL	614.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	614.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	381.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25	5	2		BELANJA MODAL	381.582.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	381.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	497.892.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28	5	2		BELANJA MODAL	497.892.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.892.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31				Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.528.580.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	5	2		BELANJA MODAL	1.528.580.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.528.580.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36				Pengadaan Mebel Sekolah	1.942.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	1		BELANJA OPERASI	32.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	2		BELANJA MODAL	1.910.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.910.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.121.899.750	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	1		BELANJA OPERASI	1.918.007.550	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.918.007.550	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2		BELANJA MODAL	203.892.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.892.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	6.104.998.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42	5	1		BELANJA OPERASI	6.104.998.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.104.998.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45	5	1		BELANJA OPERASI	8.339.250.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	8.339.250.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	554.737.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	5	1		BELANJA OPERASI	554.737.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	47	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	554.737.200	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	114.824.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1		BELANJA OPERASI	114.824.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.824.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.077.887.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	5	1		BELANJA OPERASI	1.077.887.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.077.887.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.236.970.036	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	5	1		BELANJA OPERASI	53.236.970.036	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.236.970.036	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	292.540.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	5	1		BELANJA OPERASI	292.540.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	292.540.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	410.816.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	5	1		BELANJA OPERASI	410.816.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	410.816.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	170.437.760.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1		BELANJA OPERASI	97.404.715.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.033.045.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	1	05	Belanja Hibah	24.371.670.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2		BELANJA MODAL	73.033.045.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.819.827.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.213.218.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	42.994.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	5	1		BELANJA OPERASI	42.994.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.994.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	57				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	57	5	1		BELANJA OPERASI	129.726.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	57	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.726.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	58				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	281.928.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	58	5	1		BELANJA OPERASI	281.928.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	58	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.928.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	59				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	281.828.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	59	5	1		BELANJA OPERASI	281.828.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	59	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	281.828.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61	5	1		BELANJA OPERASI	39.883.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.883.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62	5	1		BELANJA OPERASI	323.932.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	323.932.600	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**322.913.766.656**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	54.752.103.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	54.752.103.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.752.103.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.533.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	5.533.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.533.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pembangunan Ruang Praktik Siswa	8.391.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.504.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.504.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	4.887.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.887.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.105.808.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	440.808.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	440.808.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2		BELANJA MODAL	665.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	665.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.090.716.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15	5	2		BELANJA MODAL	3.090.716.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.090.716.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16				Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	2		BELANJA MODAL	225.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	225.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28				Pengadaan Mebel Sekolah	1.565.400.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	1		BELANJA OPERASI	380.400.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	380.400.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	2		BELANJA MODAL	1.185.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.185.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.475.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	2.475.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.740.636.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1		BELANJA OPERASI	12.730.636.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.832.136.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	9.898.500.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	2		BELANJA MODAL	10.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38				Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.768.434.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	6.813.648.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.813.648.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	2		BELANJA MODAL	5.954.786.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.954.786.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.887.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	5	1		BELANJA OPERASI	366.887.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	39	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	366.887.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	142.451.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40	5	1		BELANJA OPERASI	142.451.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.451.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	968.912.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	5	1		BELANJA OPERASI	968.912.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	968.912.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.949.982.256	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	5	1		BELANJA OPERASI	46.949.982.256	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	46.949.982.256	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	5	1		BELANJA OPERASI	748.663.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	748.663.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	550.682.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	5	1		BELANJA OPERASI	550.682.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	550.682.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	169.551.590.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1		BELANJA OPERASI	119.164.855.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.386.735.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	1	05	Belanja Hibah	68.778.120.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2		BELANJA MODAL	50.386.735.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.232.041.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.154.694.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	50				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	50	5	1		BELANJA OPERASI	118.635.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	50	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.635.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	51				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	237.391.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	51	5	1		BELANJA OPERASI	237.391.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	237.391.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	52				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	270.457.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	52	5	1		BELANJA OPERASI	270.457.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	270.457.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54	5	1		BELANJA OPERASI	37.083.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.083.100	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55				Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55	5	1		BELANJA OPERASI	323.932.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	323.932.600	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**34.612.865.356**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.126.957.200	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	119.642.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.642.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	2		BELANJA MODAL	10.007.314.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.007.314.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.733.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	1.733.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.733.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.972.042.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	2		BELANJA MODAL	2.972.042.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.972.042.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35				Pengadaan Mebel Sekolah	529.363.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	1		BELANJA OPERASI	10.080.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	2		BELANJA MODAL	519.283.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519.283.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36				Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.031.672.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	5	1		BELANJA OPERASI	1.031.672.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.031.672.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	239.560.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41	5	1		BELANJA OPERASI	239.560.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	239.560.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44	5	1		BELANJA OPERASI	512.250.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	512.250.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	123.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	5	1		BELANJA OPERASI	123.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	123.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.217.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48	5	1		BELANJA OPERASI	467.217.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	467.217.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	5	1		BELANJA OPERASI	5.551.968.156	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.551.968.156	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	259.215.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	1		BELANJA OPERASI	259.215.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	259.215.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.981.300.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1		BELANJA OPERASI	5.959.750.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.021.550.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	1	05	Belanja Hibah	938.200.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2		BELANJA MODAL	5.021.550.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.012.930.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.008.620.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	5	1		BELANJA OPERASI	16.547.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.547.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	56				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	56	5	1		BELANJA OPERASI	50.629.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	56	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.629.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60	5	1		BELANJA OPERASI	17.559.600	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.559.600	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**207.016.500**	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**179.548.800**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	132.307.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	132.307.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.307.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	47.240.900	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	47.240.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.240.900	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**	**27.467.700**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	27.467.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.467.700	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**62.262.900**	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**62.262.900**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	31.762.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.762.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.500.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.400	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**79.090.400**	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**79.090.400**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	06				Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	79.090.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	79.090.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	06	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.090.400	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.081.090.938.142**	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**130.561.300**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.469.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	88.469.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.469.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.091.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	42.091.900	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.091.900	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.058.013.831.398**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.057.907.216.098	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.057.907.216.098	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.057.907.216.098	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.252.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	22.252.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.252.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.362.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	84.362.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.362.500	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**52.100.000**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.100.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	52.100.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.975.000**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.975.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	50.975.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.975.000	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.370.462.350**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.707.878.300	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	319.986.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	319.986.900	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	2.387.891.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.384.891.400	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.384.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.384.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.384.800	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.091.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	33.091.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.091.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	31.526.250	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	589.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	589.582.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	589.582.000	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**10.793.473.714**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	716.785.650	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	716.785.650	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	716.785.650	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.076.688.064	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.076.688.064	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.076.688.064	
1	**01**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.679.534.380**	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	916.028.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	916.028.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	916.028.700	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	14.410.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.410.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.160.906.180	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	1.412.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.412.000.000	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2			BELANJA MODAL	5.748.906.180	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.748.906.180	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	583.189.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	583.189.500	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	583.189.500	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**25.141.076.403**	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**3.471.199.600**	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**					**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**3.471.199.600**	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	2.571.199.800	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.571.199.800	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	599.999.800	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	06		Belanja Bantuan Sosial	1.971.200.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	100.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04					Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	799.999.800	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	799.999.800	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	799.999.800	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**21.169.876.803**	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**					**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**13.019.876.803**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	13.019.876.803	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.902.289.603	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.902.289.603	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	117.587.200	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.587.200	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**03**	**1.04**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**8.150.000.000**	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03				Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.150.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.150.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	5	1	05	Belanja Hibah	8.150.000.000	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**500.000.000**	
2	**19**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**500.000.000**	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	500.000.000	
									Jumlah Belanja	**1.854.443.246.643**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(1.853.079.746.643)**	
0	**00**	**1.01.2.19.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KESEHATAN

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**233.023.519.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	115.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	232.907.919.000	
									Jumlah Pendapatan	**233.023.519.000**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**651.237.033.614**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**74.474.837.290**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**41.277.922.894**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03				Pengembangan Rumah Sakit	1.955.822.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	57.243.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.243.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	1.898.579.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.117.579.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	781.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	247.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2		BELANJA MODAL	247.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	247.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	10				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	27.611.996.794	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	2		BELANJA MODAL	27.611.996.794	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.611.996.794	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	315.459.862	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	300.459.862	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.459.862	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	21	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	22				Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.147.643.638	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	1		BELANJA OPERASI	11.147.643.638	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	22	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.147.643.638	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**32.447.595.296**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.779.162.080	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.779.162.080	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.779.162.080	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	910.780.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	910.780.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	910.780.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	822.475.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	822.475.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	822.475.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	470.062.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	470.062.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	470.062.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37.730.580	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.730.580	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.730.580	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	2		BELANJA MODAL	35.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	09	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	638.440.900	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	517.940.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	517.940.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2		BELANJA MODAL	120.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.646.584.536	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	2.879.370.036	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.879.370.036	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2		BELANJA MODAL	767.214.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	767.214.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.009.387.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1		BELANJA OPERASI	23.009.387.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.009.387.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21				Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	33.701.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	33.701.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.701.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	49.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	49.270.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.270.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**42.768.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	42.768.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	42.768.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.768.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**706.551.100**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49.636.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	49.636.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.636.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	656.915.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	656.915.100	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	656.915.100	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**2.021.509.500**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**12.494.400**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.494.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.494.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.494.400	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**2.009.015.100**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.871.629.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.871.629.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.871.629.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137.385.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	137.385.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.385.900	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**728.589.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**	**324.497.600**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	324.497.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	324.497.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.497.600	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**	**404.091.400**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	404.091.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	404.091.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	404.091.400	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**852.631.000**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**	**603.785.000**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	603.785.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	603.785.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.02**	**00**				**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**	**248.846.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	248.846.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	248.846.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	248.846.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**573.159.466.824**	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**65.952.800**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.004.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	44.004.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.004.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.948.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	21.948.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.948.800	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**229.823.996.834**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	229.772.607.934	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	229.772.607.934	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	229.772.607.934	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.388.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	51.388.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.388.900	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.594.596.348**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.964.382.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.476.500	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.476.500	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	1.914.906.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.907.578.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.328.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.630.213.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.600.218.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.218.648	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	2		BELANJA MODAL	29.995.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.995.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.351.574.000**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	103.124.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	103.124.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.124.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.248.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	1.248.450.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.248.450.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.928.153.842**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.523.110.402	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.523.110.402	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.523.110.402	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.405.043.440	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	92.405.043.440	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.405.043.440	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.533.725.600**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	521.775.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	521.775.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	521.775.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	265.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	265.500.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	725.560.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	725.560.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	725.560.700	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.020.889.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	2.137.554.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.137.554.900	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	883.335.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	883.335.000	
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.10**	**00**				**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**232.861.467.400**	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	232.861.467.400	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	185.589.506.791	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	01	Belanja Pegawai	77.752.817.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.836.689.191	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2		BELANJA MODAL	47.271.960.609	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.980.372.054	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.791.588.555	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.10	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	
									Jumlah Belanja	**651.237.033.614**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(418.213.514.614)**	
0	**00**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**29.730.691.000**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	353.600.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	29.377.091.000	
									Jumlah Pendapatan	**29.730.691.000**	
0	**00**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**835.668.611.237**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**29.950.739.156**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**4.370.238.736**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.018.072.236	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	618.072.236	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	618.072.236	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	400.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09				Pembangunan Tanggul Sungai	3.113.542.300	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	53.542.300	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.542.300	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	2		BELANJA MODAL	3.060.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.060.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	238.624.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	1		BELANJA OPERASI	238.624.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	238.624.200	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**25.580.500.420**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.914.769.936	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	658.131.936	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	658.131.936	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	1.256.638.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.256.638.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	20.551.944.688	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	1		BELANJA OPERASI	308.400.688	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	308.400.688	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	2		BELANJA MODAL	20.243.544.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.243.544.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.113.785.796	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	2.514.805.796	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.514.805.796	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	2		BELANJA MODAL	598.980.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	598.980.000	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**41.474.726.668**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**41.474.726.668**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.272.499.732	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.972.499.732	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.499.732	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	300.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	535.432.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	185.432.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.432.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	150.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	350.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03				Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.264.682.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	88.682.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	88.682.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	9.176.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	10.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.166.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.141.218.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.218.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	1.064.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	28.260.893.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	24.675.749.626	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	4.736.847.290	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.938.902.336	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2		BELANJA MODAL	3.585.143.710	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.711.100.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	09	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.874.043.710	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**11.686.241.600**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**	**11.686.241.600**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	307.012.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	107.012.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.012.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.042.332.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	42.332.600	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.332.600	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	1.000.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.000.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05				Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	232.012.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.012.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.012.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	225.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.104.884.800	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	10.104.884.800	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	509.660.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.595.224.800	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**09**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**458.050.968.263**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**09**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**458.050.968.263**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.178.251.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	428.251.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	148.251.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	280.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	750.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02				Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.743.783.300	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.053.783.300	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	73.783.300	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	980.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	2.690.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.690.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03				Penataan Bangunan dan Lingkungan	453.128.933.863	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	227.956.103.761	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.076.985.640	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	225.879.118.121	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	225.172.830.102	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	166.610.380.555	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.167.720.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.394.729.547	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**251.321.165.931**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**10**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**251.321.165.931**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.706.964.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.081.964.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.081.964.200	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	625.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	625.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.728.414.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.728.414.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.728.414.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05				Pembangunan Jalan	65.300.139.850	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	65.300.139.850	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.300.139.850	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06				Pelebaran Jalan Menuju Standar	85.860.253.672	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	519.859.432	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	519.859.432	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	85.340.394.240	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.340.394.240	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10				Pemeliharaan Berkala Jalan	68.987.253.391	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	15.200.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	2		BELANJA MODAL	68.972.053.391	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.972.053.391	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11				Pemeliharaan Rutin Jalan	19.781.835.767	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	17.217.069.026	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.217.069.026	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	2		BELANJA MODAL	2.564.766.741	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.299.766.741	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.642.452.183	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	82.244.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.244.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	2		BELANJA MODAL	3.560.208.183	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.560.208.183	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23				Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4.313.852.868	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	1		BELANJA OPERASI	232.022.240	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	232.022.240	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	2		BELANJA MODAL	4.081.830.628	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.081.830.628	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**5.341.171.148**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**11**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**	**924.324.840**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	924.324.840	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	924.324.840	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**11**	**1.02**	**00**				**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**	**737.311.880**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	737.311.880	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	737.311.880	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	737.311.880	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**11**	**1.03**	**00**				**Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**	**3.679.534.428**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3.679.534.428	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	845.292.428	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	845.292.428	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	2.834.242.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.834.242.000	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**12**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.247.998.960**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**12**	**1.02**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**863.795.332**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	863.795.332	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	863.795.332	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	863.795.332	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**12**	**1.03**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**610.907.740**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	610.907.740	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	610.907.740	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	610.907.740	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**12**	**1.04**	**00**				**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**	**773.295.888**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	577.499.492	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	577.499.492	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	577.499.492	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	195.796.396	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	195.796.396	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	195.796.396	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.595.599.511**	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**836.553.366**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	448.699.780	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	448.699.780	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	448.699.780	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.853.586	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	387.853.586	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	387.853.586	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.811.918.513**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.811.918.513	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.811.918.513	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	27.811.918.513	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**849.741.930**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.176.800	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	36.176.800	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.176.800	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.159.230	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.159.230	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.159.230	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	90.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.125.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	90.125.900	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.125.900	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	37.520.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	37.520.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.500.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	55.500.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.260.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	477.260.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	477.260.000	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**682.364.100**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	682.364.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	682.364.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482.364.100	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.152.166.448**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.090.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.090.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.850.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	549.850.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	549.850.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.226.448	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	398.226.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	398.226.448	
1	**03**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.262.855.154**	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.945.228.988	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.945.228.988	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.228.988	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.808.452	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	317.808.452	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	317.808.452	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.999.817.714	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	824.481.856	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	824.481.856	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.175.335.858	
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.175.335.858	
1	**04**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.160.753.864**	
1	**04**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**777.939.776**	
1	**04**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**355.192.688**	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.533.700	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.533.700	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	327.658.988	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	327.658.988	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	327.658.988	
1	**04**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**422.747.088**	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	422.747.088	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	422.747.088	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**04**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.382.814.088**	
1	**04**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**	**1.382.814.088**	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01				Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	302.095.100	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	302.095.100	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	302.095.100	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.062.492.088	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.062.492.088	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.492.088	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	820.000.000	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	18.226.900	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.226.900	
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.226.900	
2	**10**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**311.272.200**	
2	**10**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**10**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**311.272.200**	
2	**10**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**10**	**1.01**	**00**				**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**311.272.200**	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	311.272.200	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	311.272.200	
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	311.272.200	
									Jumlah Belanja	**838.140.637.301**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(808.409.946.301)**	
0	**00**	**1.03.1.04.2.10.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**44.839.275.749**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**21.364.308.880**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**					**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**20.812.245.084**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.697.318.408	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.697.318.408	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	3.697.318.408	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03					Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	206.475.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	206.475.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06					Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.022.032	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	16.796.022.032	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.796.022.032	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**					**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**419.663.796**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	419.663.796	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	419.663.796	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	419.663.796	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**132.400.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	132.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.400.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.474.966.869**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.000.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.433.726.487**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.433.726.487	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.433.726.487	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.433.726.487	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**357.786.510**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.043.310	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.043.310	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.043.310	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.364.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.837.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.837.700	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	136.526.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.526.500	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	60.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.584.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.584.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.584.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	54.395.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.395.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.088.473.824**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.970.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	142.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.310.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	56.310.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.310.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	887.193.824	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	887.193.824	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	887.193.824	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.577.980.048**	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.379.980.048	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.379.980.048	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.379.980.048	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	198.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.000.000	
									Jumlah Belanja	**44.839.275.749**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(44.839.275.749)**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**24.954.833.546**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.015.214.960**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**	**458.734.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	458.734.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	458.734.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	458.734.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**782.616.960**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	782.616.960	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	782.616.960	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**03**	**1.04**	**00**				**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**1.773.864.000**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.745.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	275.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	275.500.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	2		BELANJA MODAL	1.470.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.470.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	28.364.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	28.364.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.364.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.939.618.586**	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.680.700**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.554.700	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.554.700	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.126.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.126.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.126.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.330.947.180**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.330.947.180	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.330.947.180	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.330.947.180	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**112.972.600**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.983.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.983.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.983.200	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	2		BELANJA MODAL	5.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.939.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.939.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.939.100	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.050.300	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.300	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**734.638.600**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	734.638.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	226.638.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.638.600	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	508.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	508.000.000	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.126.048.382**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.000.750	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	334.000.750	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	334.000.750	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	792.047.632	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	792.047.632	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	792.047.632	
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.605.331.124**	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.335.111.124	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.335.111.124	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.335.111.124	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.220.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	270.220.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	270.220.000	
									Jumlah Belanja	**24.954.833.546**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(24.954.833.546)**	
0	**00**	**1.05.0.00.0.00.04.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.08.0.00.06 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.200.000**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	7.200.000	
									Jumlah Pendapatan	**7.200.000**	
0	**00**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**33.755.847.529**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**42.141.300**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**3.530.000**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.530.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**38.611.300**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.611.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	38.611.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.611.300	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**4.726.120.168**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**56.624.300**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01				Penyediaan Permakanan	28.699.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.699.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.699.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.924.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.924.600	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**1.307.314.568**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01				Pengasuhan	40.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02				Penyediaan Makanan	583.986.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	583.986.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	583.986.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03				Penyediaan Sandang	89.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	89.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.950.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	272.950.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	272.950.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	47.914.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.914.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09				Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	208.840.668	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	208.840.668	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	208.840.668	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	5	1		BELANJA OPERASI	17.480.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.480.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12				Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.393.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	5	1		BELANJA OPERASI	36.393.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.393.900	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**1.03**	**00**				**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**970.534.000**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01				Penyediaan Permakanan	465.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	465.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	465.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	109.798.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.798.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	192.001.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	192.001.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.001.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12				Pemulasaraan	143.734.200	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	5	1		BELANJA OPERASI	143.734.200	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.734.200	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**1.04**	**00**				**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**2.384.397.800**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10				Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.397.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	5	1		BELANJA OPERASI	2.384.397.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.384.397.800	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**1.05**	**00**				**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**7.249.500**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02				Penyediaan Sandang	7.249.500	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.249.500	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.249.500	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**3.614.900**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**05**	**1.02**	**00**				**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**3.614.900**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.614.900	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.614.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.614.900	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**255.937.800**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**255.937.800**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	255.937.800	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	255.937.800	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**127.163.700**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**127.163.700**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	127.163.700	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.163.700	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**28.600.869.661**	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**27.315.900**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.591.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.591.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.591.900	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.603.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.603.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.603.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.121.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.121.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.121.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.501.001.824**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.501.001.824	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.501.001.824	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	19.501.001.824	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**463.899.098**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.500.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.500.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.300	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.779.198	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	112.779.198	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.779.198	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260.925.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	260.925.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	260.925.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.287.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.287.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.287.600	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	3.660.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.747.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	58.747.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.747.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**27.500.000**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	7.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**590.704.840**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.100.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	381.100.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	381.100.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.104.840	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	209.104.840	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	209.104.840	
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.990.447.999**	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.281.316.912	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.281.316.912	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.316.912	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.351.364.555	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	579.913.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	579.913.720	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	3.771.450.835	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.771.450.835	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.357.766.532	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	2.312.766.532	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.312.766.532	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	45.000.000	
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.306.400.192**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**739.892.500**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**	**739.892.500**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	439.973.600	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	439.973.600	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	439.973.600	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	299.918.900	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	299.918.900	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	299.918.900	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**316.190.000**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**93.750.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	93.750.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	93.750.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.750.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**222.440.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.940.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.940.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	217.500.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	217.500.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.500.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**20.000.000**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**20.000.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	20.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**653.097.700**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**06**	**1.02**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**653.097.700**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	653.097.700	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	653.097.700	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**63.750.000**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**07**	**1.03**	**00**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**63.750.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	63.750.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.750.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.750.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**513.469.992**	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.338.200**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.537.400	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.537.400	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.537.400	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.800	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	800.800	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	800.800	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.000.000**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**506.131.792**	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.938.696	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	118.938.696	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.938.696	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.767.648	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	38.767.648	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.767.648	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.425.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	348.425.448	
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.425.448	
									Jumlah Belanja	**36.062.247.721**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(36.055.047.721)**	
0	**00**	**1.06.2.08.0.00.06.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.443.600.000**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	4.443.600.000	
									Jumlah Pendapatan	**4.443.600.000**	
0	**00**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**34.372.062.496**	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**1.109.025.700**	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**	**1.078.028.100**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.078.028.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.049.528.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	999.528.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	28.500.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.500.000	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**1.04**	**00**				**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**	**30.997.600**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.997.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.997.600	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**176.010.100**	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**173.010.100**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05				Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	173.010.100	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	173.010.100	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**04**	**1.03**	**00**				**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**3.000.000**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03				Job Fair/Bursa Kerja	3.000.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**54.500.100**	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**05**	**1.02**	**00**				**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**	**6.747.500**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.747.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.747.500	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**05**	**1.03**	**00**				**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**	**47.752.600**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	45.191.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.191.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.191.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03				Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.561.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.561.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.561.000	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**149.527.902**	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**149.527.902**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.279.900	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.279.900	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	138.248.002	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.248.002	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**32.882.998.694**	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**28.148.776.822**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.148.776.822	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	28.148.776.822	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	28.148.776.822	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**351.462.200**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.162.200	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.162.200	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.162.200	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.649.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	68.929.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	68.929.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	21.720.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.720.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.450.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	91.450.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.450.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.513.400	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	37.513.400	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.513.400	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.200.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.945.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	3.945.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.945.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.542.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	101.542.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.542.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**73.751.000**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.751.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	73.751.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.751.000	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.480.767.320**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.740.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.600.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	612.600.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	612.600.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	865.427.320	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	865.427.320	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	865.427.320	
2	**07**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.828.241.352**	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.122.542.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.122.542.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.542.720	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	294.712.392	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	189.905.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.905.792	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	104.806.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.831.600	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.975.000	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.410.986.240	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.275.546.740	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.275.546.740	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	135.439.500	
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	135.439.500	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**1.036.141.800**	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**8.000.000**	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**8.000.000**	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03				Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**8.000.000**	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**1.03**	**00**				**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	**8.000.000**	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03				Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.020.141.800**	
3	**29**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**05**	**1.04**	**00**				**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.020.141.800**	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07				Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	1.020.141.800	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	520.141.800	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	520.141.800	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	2		BELANJA MODAL	500.000.000	
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000	
3	**32**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**60.159.000**	
3	**32**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**60.159.000**	
3	**32**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**60.159.000**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18				Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	60.159.000	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	60.159.000	
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.159.000	
									Jumlah Belanja	**35.468.363.296**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(31.024.763.296)**	
0	**00**	**2.07.3.29.3.32.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**12**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**326.868.988**	
2	**12**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**186.673.244**	
2	**12**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**186.673.244**	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04				Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	186.673.244	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	186.673.244	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.673.244	
2	**12**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**140.195.744**	
2	**12**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**140.195.744**	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02				Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	140.195.744	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	140.195.744	
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	140.195.744	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**33.329.967.154**	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**163.208.344**	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**163.208.344**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01				Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	163.208.344	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	163.208.344	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.208.344	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**990.754.632**	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**990.754.632**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02				Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	513.318.792	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	513.318.792	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	513.318.792	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	477.435.840	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	477.435.840	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	477.435.840	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**15.339.034.760**	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**15.339.034.760**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	247.835.892	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	247.835.892	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	247.835.892	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	877.999.292	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	877.999.292	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	877.999.292	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	583.427.544	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	583.427.544	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	583.427.544	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	13.629.772.032	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	13.629.772.032	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.064.852.032	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	5	1	05	Belanja Hibah	5.564.920.000	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.836.969.418**	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**271.383.044**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.188.300	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.188.300	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.188.300	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.194.744	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	257.194.744	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	257.194.744	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.367.342.508**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.236.963.864	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.236.963.864	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	14.236.963.864	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.378.644	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	130.378.644	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.378.644	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**282.718.962**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.481.500	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.481.500	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.481.500	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.657.762	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	10.441.800	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.441.800	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	91.215.962	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.215.962	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.500.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.700	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.648.700	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.648.700	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.200.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.255.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	12.255.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.255.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.976.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	77.976.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.976.000	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.340.000**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.340.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	7.340.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.340.000	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**616.785.176**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.400.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	137.400.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	137.400.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.385.176	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	479.385.176	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	479.385.176	
2	**13**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.291.399.728**	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.252.799.728	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.252.799.728	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.252.799.728	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.600.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	2		BELANJA MODAL	11.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000	
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**14**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**603.494.588**	
2	**14**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**603.494.588**	
2	**14**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**603.494.588**	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02				Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	603.494.588	
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	603.494.588	
									Jumlah Belanja	**34.260.330.730**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(34.260.330.730)**	
0	**00**	**2.13.2.12.2.14.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**219.600.000**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	9.600.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	210.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**219.600.000**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**48.498.555.226**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**23.051.884.461**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**1.780.669.897**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.083.409.142	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	214.901.392	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	214.901.392	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	868.507.750	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	868.507.750	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	697.260.755	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	216.367.692	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	216.367.692	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	480.893.063	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	480.893.063	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.05**	**00**				**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2.441.762.188**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	662.311.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	662.311.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	662.311.584	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	694.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	494.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	494.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	981.698.404	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	981.698.404	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	981.698.404	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	103.752.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	103.752.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.752.200	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.06**	**00**				**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**38.598.100**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	19.127.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.127.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.127.500	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	19.470.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	19.470.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.470.600	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.07**	**00**				**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**833.990.728**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	833.990.728	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	833.990.728	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	833.990.728	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**17.709.770.648**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.709.770.648	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.298.088.648	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.298.088.648	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	2		BELANJA MODAL	9.411.682.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.826.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.585.682.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.13**	**00**				**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**56.207.200**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	56.207.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	56.207.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.207.200	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.14**	**00**				**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**190.885.700**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	190.885.700	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	5	1		BELANJA OPERASI	190.885.700	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.885.700	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**1.010.768.040**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.08**	**00**				**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**1.000.688.040**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.688.040	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.688.040	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.09**	**00**				**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**10.080.000**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.080.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.09	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**758.242.788**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**758.242.788**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	758.242.788	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	758.242.788	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.677.659.937**	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.463.900**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.265.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	26.265.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.265.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.631.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	9.631.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.631.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.162.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.162.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.162.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.709.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.709.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.709.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.776.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.776.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.776.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.276.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.276.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.276.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.642.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	9.642.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.642.000	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.805.735.001**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.778.679.801	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	17.778.679.801	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	17.778.679.801	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.055.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	27.055.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.055.200	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.482.840.380**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.883.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.883.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.883.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.653.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	64.448.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.448.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	499.205.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.205.900	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.277.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	138.277.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.277.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.688.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.688.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.688.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	23.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.337.280	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	743.337.280	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	743.337.280	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**896.360.800**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	635.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	1		BELANJA OPERASI	550.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	1	05	Belanja Hibah	550.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	2		BELANJA MODAL	85.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.500.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	220.647.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	220.647.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.647.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.213.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	40.213.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.213.800	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**725.740.128**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.360.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	250.360.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	250.360.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.680.128	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	467.680.128	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	467.680.128	
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.708.519.728**	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213.413.096	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	213.413.096	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	213.413.096	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.332.101.880	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.332.101.880	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.332.101.880	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.760.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	85.760.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	85.760.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.077.244.752	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	899.434.752	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	899.434.752	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2			BELANJA MODAL	177.810.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.810.000	
										Jumlah Belanja	**48.498.555.226**	
										Total Surplus/(Defisit)	**(48.278.955.226)**	
0	**00**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**454.479.788.507**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**26.455.837.080**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**26.455.837.080**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.137.971.336	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.968.121.336	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.121.336	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	2		BELANJA MODAL	169.850.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.850.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.547.640.140	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	12.517.960.140	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.517.960.140	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	2		BELANJA MODAL	29.680.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.680.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06				Pelayanan Informasi Publik	4.568.356.588	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.339.073.588	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.339.073.588	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	229.283.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.283.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.341.745.728	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	3.237.886.728	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	737.886.728	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	1	05	Belanja Hibah	2.500.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	2		BELANJA MODAL	103.859.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.859.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.160.636.988	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	1.914.906.988	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.914.906.988	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	2		BELANJA MODAL	245.730.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.730.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.699.486.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	1.487.836.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.487.836.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	2		BELANJA MODAL	211.650.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211.650.000	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**408.375.868.418**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**408.375.868.418**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	381.256.875.549	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.208.749.468	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.749.468	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2		BELANJA MODAL	380.048.126.081	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	01	Belanja Modal Tanah	16.344.425.421	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	363.408.700.660	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15.848.234.821	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	15.721.534.821	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.721.534.821	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	2		BELANJA MODAL	126.700.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.700.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	11.270.758.048	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	9.571.136.048	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.571.136.048	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	2		BELANJA MODAL	1.699.622.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.699.622.000	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.648.083.009**	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.990.400**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.384.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.384.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.384.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.437.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.437.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.168.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	6.168.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.168.600	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.782.929.713**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.429.264.313	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.429.264.313	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.429.264.313	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.353.665.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.353.665.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	58.665.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	1.295.000.000	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**604.124.400**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.244.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.244.600	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.892.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	21.942.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.942.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	232.950.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.950.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	87.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.247.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.247.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.247.300	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	39.900.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.340.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	194.340.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	194.340.000	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**85.410.800**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	28.160.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	28.160.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.160.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.250.800	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	57.250.800	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.250.800	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**486.989.000**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.355.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.355.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.634.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	348.634.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	348.634.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	135.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.658.638.696**	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.848.366.568	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.848.366.568	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.848.366.568	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	7.120.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.120.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	172.890.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	172.890.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.519.152.128	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.519.152.128	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.519.152.128	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.110.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	111.110.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.110.000	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**773.511.440**	
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**773.511.440**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	**773.511.440**	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	270.872.848	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	211.129.848	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.129.848	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	59.743.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.743.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03				Membangun Metadata Statistik Sektoral	275.848.396	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	189.411.396	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.411.396	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	86.437.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.437.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06				Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	226.790.196	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	146.791.196	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.791.196	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	79.999.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.999.000	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**1.154.914.696**	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**1.154.914.696**	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**670.323.048**	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	338.188.048	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	326.288.048	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	326.288.048	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	11.900.000	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.900.000	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	332.135.000	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	332.135.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	332.135.000	
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**	**484.591.648**	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	484.591.648	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	212.530.648	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	212.530.648	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	272.061.000	
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	272.061.000	
									Jumlah Belanja	**456.408.214.643**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(456.408.214.643)**	
0	**00**	**2.16.2.20.2.21.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
										Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**				**BELANJA**		
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**32.498.517.374**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**275.064.140**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**					**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**27.956.000**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01					Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	27.956.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	27.956.000	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**					**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**247.108.140**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01					Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	247.108.140	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	222.108.140	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	04		Belanja Subsidi	25.000.000	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**49.999.800**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**					**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**19.999.800**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02					Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	19.999.800	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	19.999.800	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.999.800	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**					**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**30.000.000**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01					Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**118.552.496**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**118.552.496**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.496	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	118.552.496	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	118.552.496	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**3.962.539.110**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**3.962.539.110**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.539.110	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.962.539.110	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.962.539.110	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**327.995.940**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**327.995.940**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	204.997.544	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	204.997.544	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	204.997.544	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	122.998.396	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	122.998.396	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.998.396	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**10.947.746.880**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**07**	**1.01**	**00**				**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**10.947.746.880**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01				Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.947.746.880	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.947.746.880	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	947.746.880	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.816.619.008**	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**86.172.896**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.809.396	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	80.809.396	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.809.396	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.363.500	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.363.500	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.363.500	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.823.127.248**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.823.127.248	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.823.127.248	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.823.127.248	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**256.354.800**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.665.500	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.665.500	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.665.500	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.024.600	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	47.024.600	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.024.600	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.187.700	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	13.187.700	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.187.700	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.977.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	100.977.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.977.000	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**56.950.800**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.950.800	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	56.950.800	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.950.800	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.449.474.492**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.992.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.992.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	319.700.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	319.700.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.782.492	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.126.782.492	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.126.782.492	
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.144.538.772**	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	845.243.584	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	845.243.584	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	845.243.584	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.850.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	52.850.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.850.000	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.445.188	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	246.445.188	
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	246.445.188	
									Jumlah Belanja	**32.498.517.374**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(32.498.517.374)**	
0	**00**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.600.000**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	3.600.000	
									Jumlah Pendapatan	**3.600.000**	
0	**00**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**19.651.527.160**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**319.549.344**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**112.429.344**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01				Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	112.429.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	112.429.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	112.429.344	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**207.120.000**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	207.120.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	207.120.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	207.120.000	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**566.255.792**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**566.255.792**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	122.320.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	122.320.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	122.320.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	443.935.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	443.935.792	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	443.935.792	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**840.609.616**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**840.609.616**	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	670.770.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	670.770.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	670.770.272	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	169.839.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	169.839.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	169.839.344	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**818.049.344**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**					**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**818.049.344**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.549.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	121.549.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	121.549.344	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	559.091.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	559.091.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	559.091.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	137.409.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	137.409.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	137.409.000	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**97.028.096**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**					**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**	**97.028.096**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.028.096	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	97.028.096	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	97.028.096	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.010.034.968**	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.558.209.816**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.558.209.816	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.558.209.816	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.558.209.816	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**586.880.400**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.048.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.048.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.048.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.424.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.424.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.424.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	76.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.005.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	23.005.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.005.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.402.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	417.402.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	417.402.000	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**609.410.000**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	609.410.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	2.840.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	606.570.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.570.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.000.000	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.380.052.512**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	178.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.052.512	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.198.052.512	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.052.512	
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**875.482.240**	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	831.482.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	831.482.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	831.482.240	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	44.000.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	
									Jumlah Belanja	**19.651.527.160**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(19.647.927.160)**	
0	**00**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KEBUDAYAAN

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.073.792.000**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	1.690.532.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	383.260.000	
									Jumlah Pendapatan	**2.073.792.000**	
0	**00**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**116.047.565.671**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**70.158.487.248**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**33.842.686.392**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.719.707.688	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.719.707.688	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.719.707.688	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	29.122.978.704	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	29.122.978.704	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.122.978.704	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**	**17.976.319.276**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	16.229.823.136	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.229.823.136	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.229.823.136	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.746.496.140	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.746.496.140	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.496.140	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**18.339.481.580**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	18.339.481.580	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.339.481.580	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	465.881.580	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	05	Belanja Hibah	17.873.600.000	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**884.750.200**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**884.750.200**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	496.429.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	496.429.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	496.429.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	388.320.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	388.320.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	388.320.600	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**117.634.800**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**117.634.800**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	117.634.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	117.634.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.634.800	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**902.713.036**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**423.452.840**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02				Penetapan Cagar Budaya	423.452.840	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	423.452.840	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	423.452.840	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.02**	**00**				**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**479.260.196**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01				Pelindungan Cagar Budaya	247.008.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	247.008.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	247.008.696	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02				Pengembangan Cagar Budaya	121.038.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	121.038.400	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.038.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	111.213.100	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	111.213.100	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.213.100	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**4.000.000.000**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Museum Provinsi**	**4.000.000.000**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1.287.424.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.287.424.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.424.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.102.670.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.102.670.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.102.670.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	609.905.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	562.390.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	562.390.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	2		BELANJA MODAL	47.515.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.515.200	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**39.983.980.387**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**170.397.746**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.908.596	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	150.908.596	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.908.596	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.489.150	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.489.150	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.489.150	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.085.567.129**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.595.849.753	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.595.849.753	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	22.595.849.753	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	479.717.376	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	479.717.376	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	479.717.376	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.736.555.640**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	366.619.340	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	366.619.340	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	366.619.340	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570.295.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.505.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.505.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	553.790.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.790.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	312.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	312.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.118.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	66.118.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	66.118.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.985.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	43.985.900	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.985.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	362.036.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	362.036.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	362.036.000	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**302.218.400**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.858.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	13.215.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.215.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	36.643.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.643.400	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.360.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	81.612.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.612.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	170.748.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.748.000	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.813.619.712**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.893.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.893.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.893.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.952.850.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.952.850.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.850.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	658.360.500	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	264.860.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	264.860.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	2		BELANJA MODAL	393.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	393.500.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.187.516.212	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.179.918.212	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.179.918.212	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2		BELANJA MODAL	7.598.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.598.000	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.875.621.760**	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.579.872.888	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.579.872.888	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.872.888	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	367.945.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	302.945.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	302.945.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2		BELANJA MODAL	65.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.927.803.872	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.957.803.872	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.957.803.872	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	970.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	870.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000	
									Jumlah Belanja	**116.047.565.671**	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
	Total Surplus/(Defisit)	**(113.973.773.671)**	
0 00 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**484.888.276.903**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**09**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI**	**469.391.182.940**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**09**	**8.01**	**00**				**Pembinaan Kelembagaan Desa Adat**	**467.923.363.960**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01				Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	467.521.683.416	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	467.521.683.416	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.194.592.660	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	465.327.090.756	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02				Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	401.680.544	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	401.680.544	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	401.680.544	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**09**	**8.02**	**00**				**Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat**	**889.435.088**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01				Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	444.049.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	444.049.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	444.049.500	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02				Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	445.385.588	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	445.385.588	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	445.385.588	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**09**	**8.03**	**00**				**Penyelenggaraan Desa Adat**	**578.383.892**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03				Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	578.383.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	578.383.892	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	578.383.892	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.497.093.963**	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.224.800**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.160.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.064.600	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.064.600	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.335.459.359**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.335.459.359	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.335.459.359	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	10.335.459.359	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**668.699.400**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.432.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.432.900	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.303.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	34.303.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.303.800	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.095.700	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.095.700	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.095.700	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.867.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	622.867.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	622.867.000	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.172.704.200**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.172.704.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	1.172.704.200	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.172.704.200	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**550.278.380**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.278.380	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	550.278.380	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	550.278.380	
2	**22**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.746.727.824**	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	816.923.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	816.923.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	816.923.896	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.929.803.928	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.529.803.928	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.803.928	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	400.000.000	
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	
									Jumlah Belanja	**484.888.276.903**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(484.888.276.903)**	
0	**00**	**2.22.0.00.0.00.05.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**50.613.600.000**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	50.613.600.000	
									Jumlah Pendapatan	**50.613.600.000**	
0	**00**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**28.065.115.361**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**178.952.896**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**100.000.000**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02				Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	100.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**	**78.952.896**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	78.952.896	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.952.896	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**700.822.396**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**624.822.396**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	624.822.396	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	624.822.396	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.822.396	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	525.000.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.06**	**00**				**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**76.000.000**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	01				Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	76.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**234.998.800**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.05**	**00**				**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**234.998.800**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	05				Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.998.800	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	234.998.800	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	04	1.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	234.998.800	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**42.101.400**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**42.101.400**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	24.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18.101.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	18.101.400	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.101.400	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**3.160.117.696**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**1.02**	**00**				**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**3.160.117.696**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3.155.617.696	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	355.617.696	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	355.617.696	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	2		BELANJA MODAL	2.800.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02				Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.748.122.173**	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40.045.100**	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.689.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	19.689.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	19.689.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1			BELANJA OPERASI	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.350.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.955.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	14.955.500	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	14.955.500	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.089.377.096**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.089.377.096	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	20.089.377.096	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	20.089.377.096	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**150.908.200**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.219.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	6.219.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.219.600	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.688.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1			BELANJA OPERASI	144.688.600	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	144.688.600	
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.467.791.777**	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.757.384	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	436.757.384	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	436.757.384	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	420.048.592	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	420.048.592	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	420.048.592	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.610.985.801	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	2.537.485.801	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.537.485.801	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2			BELANJA MODAL	73.500.000	
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.500.000	
										Jumlah Belanja	**28.065.115.361**	
										Total Surplus/(Defisit)	**22.548.484.639**	
0	**00**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**				**PEMBIAYAAN**		
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PARIWISATA

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 Dinas Pariwisata

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**15.151.817.368**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**602.476.980**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**47.715.600**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	47.715.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	47.715.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.715.600	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	**428.022.184**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	428.022.184	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	428.022.184	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**126.739.196**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04				Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	108.040.396	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	108.040.396	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.040.396	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05				Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	18.698.800	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.698.800	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.698.800	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**555.588.532**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**555.588.532**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	184.913.244	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	184.913.244	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	184.913.244	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	170.527.792	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	170.527.792	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.527.792	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.147.496	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	200.147.496	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.147.496	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**264.380.192**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**137.623.196**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	31.823.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	31.823.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.823.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	105.799.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	105.799.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.799.996	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**126.756.996**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	126.756.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1		BELANJA OPERASI	126.756.996	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	126.756.996	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**570.296.980**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**570.296.980**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	176.049.944	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	176.049.944	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	176.049.944	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	175.663.144	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	175.663.144	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.663.144	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	218.583.892	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	218.583.892	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.583.892	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.159.074.684**	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**118.205.094**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.666.848	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.666.848	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.666.848	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.538.246	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	77.538.246	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.538.246	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.181.934.940**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.181.934.940	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.181.934.940	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	11.181.934.940	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**171.330.350**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.112.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.112.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.112.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.886.050	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	18.886.050	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.886.050	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	63.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.174.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.174.300	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.174.300	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.220.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.220.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.938.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	72.938.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.938.000	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**406.350.000**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.350.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.350.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	116.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	288.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	288.000.000	
3	**26**	**3.26.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.281.254.300**	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.743.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	321.743.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	321.743.100	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	936.911.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	936.911.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	936.911.200	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.600.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	22.600.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
	Jumlah Belanja	**15.151.817.368**	
	Total Surplus/(Defisit)	**(15.151.817.368)**	
0 00 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**896.404.500**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	887.304.500	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	9.100.000	
									Jumlah Pendapatan	**896.404.500**	
0	**00**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**2.965.255.704**	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**715.463.576**	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**715.463.576**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	715.463.576	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	715.463.576	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	533.463.576	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	182.000.000	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**537.181.024**	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**	**212.369.440**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	212.369.440	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	212.369.440	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	212.369.440	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**	**324.811.584**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324.811.584	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	324.811.584	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.811.584	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**1.009.850.468**	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.009.850.468**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	155.166.444	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	155.166.444	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	155.166.444	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	667.744.332	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	667.744.332	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	667.744.332	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	186.939.692	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	186.939.692	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	186.939.692	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**702.760.636**	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60.216.200**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.600	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.016.600	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.016.600	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.508.800	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.508.800	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.508.800	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	32.500.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.190.800	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.190.800	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.190.800	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**320.462.644**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	202.224.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	202.224.000	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.238.644	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	118.238.644	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	118.238.644	
2	**09**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**322.081.792**	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.772.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1			BELANJA OPERASI	198.772.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	198.772.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.976.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	8.976.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.976.000	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.332.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	114.332.896	
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	114.332.896	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**92.650.653.662**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**27.051.417.008**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**					**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**10.434.636.890**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01					Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.434.636.890	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	10.434.636.890	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	259.636.890	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	04		Belanja Subsidi	10.000.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	05		Belanja Hibah	175.000.000	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**					**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**8.486.357.208**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01					Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	2.359.748.116	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	685.249.416	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	685.249.416	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2			BELANJA MODAL	1.674.498.700	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.674.498.700	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	2.257.556.372	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.237.556.372	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.163.306.372	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	74.250.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.333.306.152	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.311.506.152	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.756.152	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	294.750.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	2		BELANJA MODAL	21.800.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.800.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.535.746.568	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.535.746.568	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.746.568	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**1.288.314.530**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.288.314.530	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.288.314.530	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.288.314.530	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**6.842.108.380**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01				Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.430.748.380	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.430.748.380	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	735.748.380	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	05	Belanja Hibah	3.695.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02				Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.411.360.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.411.360.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.411.360.000	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**1.319.824.232**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Penataan Prasarana Pertanian**	**1.319.824.232**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02				Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.123.328.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.123.328.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.828.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	27.500.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	196.495.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	196.495.240	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.495.240	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**8.026.603.524**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**7.341.410.244**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01				Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7.341.410.244	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.341.410.244	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.341.410.244	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**1.03**	**00**				**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**632.106.832**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01				Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	296.553.840	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	296.553.840	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	296.553.840	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03				Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	335.552.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	335.552.992	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	335.552.992	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**04**	**1.05**	**00**				**Kesejahteraan Hewan**	**53.086.448**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02				Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	53.086.448	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	53.086.448	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.086.448	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**4.307.471.268**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**4.307.471.268**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.136.922.076	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	676.026.076	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	676.026.076	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	2.460.896.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.460.896.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	712.954.464	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	712.954.464	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	712.954.464	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	457.594.728	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	457.594.728	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.594.728	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**338.762.336**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**07**	**1.02**	**00**				**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**338.762.336**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02				Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	338.762.336	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	338.762.336	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	338.762.336	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**51.606.575.294**	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**701.484.668**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320.239.284	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	320.239.284	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	320.239.284	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381.245.384	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	381.245.384	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	381.245.384	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**44.067.867.866**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.669.999.186	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.669.999.186	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	43.669.999.186	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.868.680	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	397.868.680	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	397.868.680	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**368.176.000**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.498.300	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	56.498.300	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	56.498.300	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.551.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	48.551.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.551.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	20.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	205.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.126.700	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	38.126.700	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	38.126.700	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.927.736.100**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	941.976.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	941.976.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	941.976.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	985.760.100	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	985.760.100	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	985.760.100	
3	**27**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.541.310.660**	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.524.632.604	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.524.632.604	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.524.632.604	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.745.240.160	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.715.240.160	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.240.160	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	30.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271.437.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	211.437.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.437.896	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	60.000.000	
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000	
									Jumlah Belanja	**95.615.909.366**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(94.719.504.866)**	
0	**00**	**3.27.2.09.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Pemerintahan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi : 3.28.2.11.0.00.01 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.321.800.000**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	129.200.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	1.192.600.000	
									Jumlah Pendapatan	**1.321.800.000**	
0	**00**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**4.182.201.471**	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**391.102.096**	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**391.102.096**	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	391.102.096	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	391.102.096	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	391.102.096	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**145.838.400**	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**145.838.400**	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	37.392.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	37.392.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.392.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108.446.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	108.446.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.446.200	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**192.343.892**	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**08**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**192.343.892**	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	192.343.892	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	192.343.892	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.343.892	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**11**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**2.259.206.996**	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**11**	**1.01**	**00**				**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**2.259.206.996**	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.259.206.996	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.259.206.996	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	11	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.259.206.996	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.193.710.087**	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**76.392.900**	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.492.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.492.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.651.700	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	16.651.700	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.651.700	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.400.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	45.400.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.849.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.849.200	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.849.200	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**448.653.659**	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.653.659	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	342.167.379	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	342.167.379	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	106.486.280	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.486.280	
2	**11**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**668.663.528**	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.941.288	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	323.941.288	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	323.941.288	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	344.722.240	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1			BELANJA OPERASI	344.722.240	
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	344.722.240	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**41.896.350.384**	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**122.507.596**	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**03**	**1.05**	**00**					**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**122.507.596**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.596	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	5	1			BELANJA OPERASI	122.507.596	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	122.507.596	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**137.661.648**	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**					**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**137.661.648**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02					Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	137.661.648	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	137.661.648	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	137.661.648	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**41.636.181.140**	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.827.300**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.300	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	35.827.300	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	35.827.300	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**35.511.646.002**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.470.116.602	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	35.470.116.602	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	35.470.116.602	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.529.400	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	41.529.400	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	41.529.400	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**746.892.700**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.500	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	29.910.500	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.910.500	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.441.600	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	105.441.600	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.441.600	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233.250.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	233.250.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	233.250.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.818.600	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	47.818.600	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.818.600	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.150.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	78.150.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	78.150.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.322.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	252.322.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	252.322.000	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**367.248.700**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	367.248.700	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1		BELANJA OPERASI	29.875.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.875.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	337.373.700	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.373.700	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**926.627.530**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.644.758	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	269.644.758	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	269.644.758	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.982.772	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	656.982.772	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	656.982.772	
3	**28**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.047.938.908**	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.141.058.364	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.141.058.364	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.141.058.364	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	345.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.561.880.544	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	1.261.880.544	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.880.544	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	2		BELANJA MODAL	300.000.000	
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	
									Jumlah Belanja	**46.078.551.855**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(44.756.751.855)**	
0	**00**	**3.28.2.11.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**26.000.000**	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	26.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**26.000.000**	
0	**00**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**21.596.630.840**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**263.962.088**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**	**263.962.088**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01				Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	263.962.088	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	263.962.088	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	263.962.088	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**111.485.500**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**	**111.485.500**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02				Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.485.500	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	111.485.500	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	111.485.500	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**14.629.700**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**	**14.629.700**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	14.629.700	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	14.629.700	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.629.700	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**793.063.540**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**499.555.448**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	456.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	5	1	05	Belanja Hibah	456.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02				Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	43.555.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.555.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.555.448	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**06**	**1.02**	**00**				**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**219.456.244**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02				Pengembangan Layanan Pengujian	219.456.244	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	219.456.244	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	219.456.244	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**06**	**1.03**	**00**				**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**74.051.848**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	74.051.848	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	74.051.848	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.051.848	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**48.385.448**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**07**	**1.03**	**00**				**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**48.385.448**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01				Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.385.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	48.385.448	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	48.385.448	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.365.104.564**	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**105.079.300**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.079.300	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	105.079.300	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.079.300	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.232.479.704**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.232.479.704	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.232.479.704	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	16.232.479.704	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.261.780.750**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.396.500	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.396.500	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.396.500	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	789.202.950	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	121.134.950	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	121.134.950	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	668.068.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	668.068.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.500.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	117.500.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.500.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.254.300	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	22.254.300	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.254.300	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.840.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.587.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	308.587.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	308.587.000	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.043.000**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.043.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09	5	2		BELANJA MODAL	62.043.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.043.000	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.067.967.328**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	322.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	322.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.510.928	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	512.510.928	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	512.510.928	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.456.400	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	233.456.400	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	233.456.400	
3	**30**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.635.754.482**	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.189.201.586	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.189.201.586	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.189.201.586	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	446.552.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	146.552.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.552.896	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	300.000.000	
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**8.578.014.368**	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**8.056.153.372**	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**8.056.153.372**	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	269.057.048	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	269.057.048	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.057.048	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	175.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.787.096.324	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.787.096.324	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.787.096.324	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**271.576.400**	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**	**271.576.400**	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	271.576.400	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	271.576.400	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.284.596**	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95.641.700**	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.981.700	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	33.437.700	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.437.700	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	51.544.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.544.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.100.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.560.000	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.166.448**	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.166.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	52.166.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.166.448	
3	**31**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.476.448**	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.476.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	102.476.448	
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.476.448	
									Jumlah Belanja	**30.174.645.208**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(30.148.645.208)**	
0	**00**	**3.31.3.30.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

SEKRETARIAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.2.23.2.24.01 Sekretariat Daerah

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**810.711.860.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	00	0.00	00	4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	810.711.860.000	
									Jumlah Pendapatan	**810.711.860.000**	
0	**00**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
2	**23**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**717.052.284**	
2	**23**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**717.052.284**	
2	**23**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**572.702.536**	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	49.849.648	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	49.849.648	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.849.648	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	89.976.148	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	89.976.148	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.976.148	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	220.400.292	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	220.400.292	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	220.400.292	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	212.476.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	37.476.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	2		BELANJA MODAL	175.000.000	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	09	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	175.000.000	
2	**23**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**144.349.748**	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	144.349.748	
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	144.349.748	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	144.349.748	
2	**24**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**570.198.832**	
2	**24**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**570.198.832**	
2	**24**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**262.363.992**	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02				Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	262.363.992	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	262.363.992	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	262.363.992	
2	**24**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**307.834.840**	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.758.200	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.758.200	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.758.200	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	267.076.640	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	267.076.640	
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	267.076.640	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**229.081.014.264**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**967.599.996**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**409.917.448**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	90.668.100	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	75.668.100	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.668.100	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	85.640.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	70.640.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03				Penataan Analisis Jabatan	233.609.348	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	218.609.348	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	218.609.348	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**557.682.548**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	189.218.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	189.218.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	189.218.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	127.751.300	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	127.751.300	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.751.300	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	23.192.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	23.192.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.192.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	87.524.900	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	87.524.900	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	87.524.900	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	129.995.748	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	129.995.748	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.995.748	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1.790.033.828**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**	**650.186.136**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	462.201.436	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	462.201.436	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	462.201.436	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03				Fasilitasi Penataan Wilayah	187.984.700	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	187.984.700	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	187.984.700	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**374.943.300**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.943.400	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	199.943.400	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.943.400	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	174.999.900	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	174.999.900	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	174.999.900	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**03**	**1.03**	**00**				**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**764.904.392**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.292	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	349.905.292	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.905.292	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	414.999.100	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	414.999.100	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	03	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	414.999.100	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**46.154.077.136**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**17.249.908.952**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	16.549.576.216	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.549.576.216	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.549.576.216	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	700.332.736	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	700.332.736	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	700.332.736	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**04**	**1.02**	**00**				**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**28.904.168.184**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	28.904.168.184	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	28.904.168.184	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.024.718.184	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	04	1.02	03	5	1	05	Belanja Hibah	25.879.450.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**4.321.980.588**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**2.133.619.504**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.799.392	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.276.799.392	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.276.799.392	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.550.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	161.550.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	161.550.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.388	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	238.508.388	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	238.508.388	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	456.760.932	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	456.760.932	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	456.760.932	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**05**	**1.02**	**00**				**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**2.188.361.084**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.962.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.962.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.962.905.792	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.455.292	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	225.455.292	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	05	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	225.455.292	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**629.076.000**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**74.814.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	74.814.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.814.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**06**	**1.02**	**00**				**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**482.510.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	482.510.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	482.510.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	482.510.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**06**	**1.03**	**00**				**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**71.752.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.752.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	71.752.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	06	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.752.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**07**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**12.426.645.000**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**07**	**1.01**	**00**				**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**11.989.783.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.760.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.760.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	11.940.343.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.785.344.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.344.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	1.710.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	2		BELANJA MODAL	10.154.999.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.154.999.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	24.680.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.680.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**07**	**1.02**	**00**				**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**99.608.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01				Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.062.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.062.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.062.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.546.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.546.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.546.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**07**	**1.03**	**00**				**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**337.254.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01				Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	149.662.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	149.662.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.662.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.960.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.960.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	162.632.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	162.632.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	07	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	162.632.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**08**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**75.060.000**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**08**	**1.01**	**00**				**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**25.100.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.100.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**08**	**1.02**	**00**				**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**49.960.000**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	49.960.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	08	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	49.960.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**162.716.541.716**	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.083.473.190**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.083.473.190	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.083.473.190	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.083.473.190	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**66.127.088.681**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.391.314.469	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	65.391.314.469	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	65.391.314.469	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	735.774.212	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	735.774.212	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	735.774.212	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.03**	**00**				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**504.654.924**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.654.924	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	504.654.924	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	504.654.924	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.383.800**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.383.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.383.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.383.800	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21.795.706.856**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	714.618.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	714.618.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	714.618.800	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.330.377.024	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.006.949.950	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.006.949.950	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	1.323.427.074	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.323.427.074	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.715.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	109.715.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.715.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.931.628.980	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	6.931.628.980	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.931.628.980	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.094.946.280	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	8.094.946.280	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.094.946.280	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.420.272	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	5	1		BELANJA OPERASI	614.420.272	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.06	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	614.420.272	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.234.400.907**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.011.354.999	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.011.354.999	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.011.354.999	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.252.346.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	15.252.346.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.252.346.500	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.970.699.408	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.970.699.408	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.970.699.408	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.901.842.925**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.435.620.888	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.435.620.888	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.435.620.888	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.861.106.038	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.861.106.038	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.861.106.038	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.540.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	344.540.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	344.540.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.195.575.999	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	1.126.444.298	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1	01	Belanja Pegawai	6.120.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.324.298	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	4.069.131.701	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.282.297.117	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.689.834.584	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.11**	**00**				**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**7.344.477.833**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	5	1		BELANJA OPERASI	247.349.060	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	5	1	01	Belanja Pegawai	247.349.060	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.097.128.773	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.097.128.773	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	04	5	1	01	Belanja Pegawai	7.097.128.773	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.12**	**00**				**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**24.548.756.752**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	17.718.485.145	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.339.890.145	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.339.890.145	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2		BELANJA MODAL	1.378.595.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.595.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	965.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.520.771.607	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	1		BELANJA OPERASI	6.299.771.607	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.299.771.607	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2		BELANJA MODAL	221.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.000.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	5	1		BELANJA OPERASI	309.500.000	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.12	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	309.500.000	
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.13**	**00**				**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**721.914.600**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	721.914.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	721.914.600	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	721.914.600	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**01**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**01**	**1.14**	**00**				**Fasilitasi Keprotokolan**	**2.449.841.248**	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.449.841.248	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.449.841.248	
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.14	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.449.841.248	
									Jumlah Belanja	**230.368.265.380**	
									Total Surplus/(Defisit)	**580.343.594.620**	
0	**00**	**4.01.2.23.2.24.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**SEKRETARIAT DPRD**	**245.203.051.335**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**156.766.477.312**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**46.300.359.136**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.861.127.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.861.127.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.127.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02				Pembahasan Rancangan Perda	14.952.807.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	14.952.807.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.952.807.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	28.620.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	28.620.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.620.375.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04				Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	866.048.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	866.048.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	866.048.896	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**8.272.642.240**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.216.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.649.216.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.649.216.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03				Pembahasan APBD	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.655.856.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04				Pembahasan Perubahan APBD	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.655.856.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.655.856.448	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**35.074.081.584**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.443.432.792	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	8.443.432.792	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.443.432.792	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.203.947.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.203.947.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.203.947.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.448.064.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	8.448.064.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.448.064.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.360.256.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	8.360.256.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.360.256.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	1.618.380.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.618.380.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**14.206.353.976**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02				Pendalaman Tugas DPRD	3.946.975.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.946.975.344	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.946.975.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.394.891.736	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1		BELANJA OPERASI	3.394.891.736	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.394.891.736	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	3.240.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	900.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07				Penyusunan Program Kerja DPRD	2.724.486.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.724.486.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.724.486.896	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.05**	**00**				**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**39.424.297.240**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01				Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.285.401.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.285.401.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.285.401.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.616.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.748.616.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.616.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03				Pelaksanaan Reses	34.390.279.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	34.390.279.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.390.279.344	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.06**	**00**				**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**817.218.896**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02				Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	817.218.896	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	817.218.896	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.08**	**00**				**Fasilitasi Tugas DPRD**	**12.671.524.240**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.228.871.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.228.871.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.228.871.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.442.652.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.442.652.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.442.652.896	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**88.436.574.023**	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**273.534.896**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.122.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	156.122.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	156.122.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.412.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	117.412.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.412.448	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.047.632.768**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.826.825.372	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.826.825.372	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.826.825.372	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.662.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	110.662.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.662.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.144.948	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	110.144.948	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.144.948	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8.190.497.044**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.178.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	132.178.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	132.178.700	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	964.176.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	964.176.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	964.176.800	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.348.620.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.348.620.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.348.620.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.494.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	135.494.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	135.494.200	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	954.480.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	954.480.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	954.480.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.655.547.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.655.547.344	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.655.547.344	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**761.591.000**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	761.591.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	756.591.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	756.591.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.587.479.532**	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	900.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.479.532	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.677.479.532	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.479.532	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.270.461.896**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.413.751.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.413.751.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.413.751.896	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.640.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	178.640.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.640.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.070.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	678.070.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	678.070.000	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.15**	**00**				**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**60.382.611.479**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.289.033.531	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1		BELANJA OPERASI	58.289.033.531	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	5	1	01	Belanja Pegawai	58.289.033.531	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.820.224.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.820.224.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.820.224.500	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	273.353.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1		BELANJA OPERASI	273.353.448	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	273.353.448	
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.16**	**00**				**Layanan Administrasi DPRD**	**1.922.765.408**	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02				Fasilitasi Fraksi DPRD	209.882.240	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1		BELANJA OPERASI	209.882.240	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	209.882.240	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.712.883.168	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.712.883.168	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.712.883.168	
									Jumlah Belanja	**245.203.051.335**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(245.203.051.335)**	
0	**00**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PERENCANAAN**	**28.078.374.619**	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.125.180.372**	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**2.603.064.240**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03				Pelaksanaan Konsultasi Publik	85.343.500	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	85.343.500	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.343.500	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	85.140.900	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	85.140.900	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.140.900	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.432.579.840	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.432.579.840	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.432.579.840	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**744.624.244**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	720.582.444	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	720.582.444	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	720.582.444	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24.041.800	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	24.041.800	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.041.800	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.467.417.840**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	532.405.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	532.405.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	532.405.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	649.658.240	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	649.658.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	649.658.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	285.354.400	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	285.354.400	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	285.354.400	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**310.074.048**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01				Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1		BELANJA OPERASI	310.074.048	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	310.074.048	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.426.874.336**	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**823.391.428**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.406.796	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	106.406.796	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	106.406.796	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.756.396	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	86.756.396	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.756.396	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.518.244	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	418.518.244	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	418.518.244	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	211.709.992	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	211.709.992	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	211.709.992	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**869.580.780**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.838.544	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	196.838.544	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.838.544	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	279.870.192	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	279.870.192	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	279.870.192	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.231.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	95.231.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.231.748	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	297.640.296	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	297.640.296	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	297.640.296	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.03**	**00**				**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**733.902.128**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.300.388	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	305.300.388	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	305.300.388	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.429.100	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.429.100	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.429.100	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.186.440	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	266.186.440	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	266.186.440	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	81.986.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	81.986.200	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.986.200	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.526.319.911**	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**370.053.940**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238.824.240	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	238.824.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	238.824.240	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.028.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	13.028.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.028.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.028.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	13.028.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.028.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.137.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	12.137.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.137.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.485.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.485.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.485.600	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.457.700	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	40.457.700	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.457.700	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.093.400	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	43.093.400	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.093.400	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.973.912.997**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.653.611.913	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.653.611.913	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.653.611.913	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.113.540	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	196.113.540	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	196.113.540	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	124.187.544	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	124.187.544	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	124.187.544	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.600.924.736**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.411.148	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	47.411.148	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.411.148	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.109.048	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.739.048	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.739.048	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	541.370.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	541.370.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.766.248	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	114.766.248	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	114.766.248	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.429.948	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	69.429.948	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.429.948	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	74.916.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	74.916.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.916.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	103.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	103.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.815.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	593.815.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	593.815.448	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90.476.448**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	43.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	43.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	37.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	10.000.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**960.327.916**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.466.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.466.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.466.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.076.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	337.076.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	337.076.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.785.020	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	582.785.020	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	582.785.020	
5	**01**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.530.623.874**	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	812.564.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	812.564.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	812.564.480	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.126.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	138.626.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	138.626.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2		BELANJA MODAL	29.500.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.500.000	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.549.932.946	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	57.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	57.476.448	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	2.492.456.498	
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.492.456.498	
									Jumlah Belanja	**28.078.374.619**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(28.078.374.619)**	
0	**00**	**5.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**578.937.000.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	46.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	578.890.200.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.146.820.137.794**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.146.820.137.794	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**55.708.000.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3	01	Pendapatan Hibah	55.708.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**2.781.465.137.794**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEUANGAN**	**1.794.724.850.634**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1.766.331.275.332**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1.866.178.792**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.617.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	51.617.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.617.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.240.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	43.240.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.240.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.363.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	347.363.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	347.363.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.598.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.598.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.598.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	691.430.696	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	691.430.696	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	691.430.696	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	651.928.196	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	651.928.196	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	651.928.196	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**823.865.900**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	153.315.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	153.315.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	153.315.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	141.674.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	141.674.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	141.674.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156.031.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	156.031.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	156.031.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05				Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	372.844.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	372.844.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	372.844.500	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**299.997.500**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	299.997.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	299.997.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	299.997.500	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**716.462.940**	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	645.759.640	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1			BELANJA OPERASI	645.759.640	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	645.759.640	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	70.703.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1			BELANJA OPERASI	70.703.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	70.703.300	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.05**	**00**					**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.761.472.252.400**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04					Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.775.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	5	1			BELANJA OPERASI	2.775.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	2.775.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	521.974.803.508	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	5	4			BELANJA TRANSFER	521.974.803.508	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	5	4	02		Belanja Bantuan Keuangan	521.974.803.508	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	5	3	01		Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10					Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.186.722.448.892	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	5	4			BELANJA TRANSFER	1.186.722.448.892	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	5	4	01		Belanja Bagi Hasil	1.186.722.448.892	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.06**	**00**					**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**1.152.517.800**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02					Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.152.517.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02	5	1			BELANJA OPERASI	1.152.517.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.152.517.800	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**0.00**	**00**					**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**3.845.994.488**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**03**	**1.01**	**00**					**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**3.845.994.488**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01					Penyusunan Standar Harga	217.599.200	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	217.599.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.599.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	517.668.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	517.668.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	517.668.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07				Pengamanan Barang Milik Daerah	2.349.085.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	2.349.085.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.349.085.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	761.640.588	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	761.640.588	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	761.640.588	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**24.547.580.814**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.049.400**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.049.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	35.049.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.049.400	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.363.298.334**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.121.709.534	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	19.121.709.534	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	19.121.709.534	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.588.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	241.588.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	241.588.800	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.521.329.628**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	17.372.500	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.372.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	459.273.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	459.273.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.273.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	684.786.328	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	684.786.328	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	684.786.328	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.179.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.179.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.179.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.385.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	62.385.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.385.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.133.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	249.133.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	249.133.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**336.200.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	332.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	332.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	332.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.291.703.452**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	781.378.644	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	781.378.644	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	781.378.644	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05				Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.337.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	158.337.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	158.337.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.341.987.708	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	969.029.708	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	969.029.708	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	1.372.958.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.372.958.000	
									Jumlah Belanja	**1.794.724.850.634**	
									Total Surplus/(Defisit)	**986.740.287.160**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.025.945.729.031**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.025.945.729.031	
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**1.025.945.729.031**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**437.500.000.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan	150.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	187.500.000.000	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**437.500.000.000**	

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.010.993.183.589**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	01	Pajak Daerah	2.960.437.850.589	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	75.600.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	50.479.733.000	
									Jumlah Pendapatan	**3.010.993.183.589**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEUANGAN**	**167.146.292.718**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**94.900.900**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**94.900.900**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01				Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	94.900.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	94.900.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.900.900	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**17.927.930.532**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**04**	**1.01**	**00**				**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**17.927.930.532**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	506.755.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	506.755.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	506.755.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	385.828.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	385.828.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	385.828.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	141.625.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	141.625.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.178.576.728	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	10.178.576.728	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.178.576.728	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10				Penagihan Pajak Daerah	6.465.124.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	6.465.124.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.465.124.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	213.116.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	213.116.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	213.116.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.903.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	36.903.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.903.500	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**149.123.461.286**	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**37.913.400**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.867.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.867.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	19.045.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.045.600	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**119.490.088.012**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.490.088.012	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	119.490.088.012	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	119.490.088.012	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**50.000.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5.059.537.770**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.437.890	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	81.437.890	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	81.437.890	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.693.716.980	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.693.716.980	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.693.716.980	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.602.357.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.602.357.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.602.357.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.497.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	55.497.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.497.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	178.353.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	178.353.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	178.353.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.148.175.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.148.175.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.148.175.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.424.636.000**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.614.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	5	2		BELANJA MODAL	559.614.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	559.614.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.123.829.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	5	2		BELANJA MODAL	1.123.829.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.123.829.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.741.193.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	13.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	1.728.193.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.589.053.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.140.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.000.000	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.685.718.903**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.656.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.656.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.656.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.620.759.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.620.759.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.759.304	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.050.303.599	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.050.303.599	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.303.599	
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16.375.567.201**	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	535.718.348	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	535.718.348	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	535.718.348	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.651.416.668	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.651.416.668	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.651.416.668	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.076.565.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	1.076.565.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.076.565.408	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.468.945.881	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	4.529.448.328	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.529.448.328	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	5.939.497.553	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.939.497.553	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.642.920.896	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	1.642.920.896	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.642.920.896	
Jumlah Belanja										**167.146.292.718**	
Total Surplus/(Defisit)										**2.843.846.890.871**	
0	**00**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan										**0**	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran										**0**	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**6.959.832.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	6.959.832.000	
									Jumlah Pendapatan	**6.959.832.000**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KEPEGAWAIAN**	**48.958.880.999**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**12.811.586.528**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**6.363.294.904**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.072.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.072.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6.032.281.568	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	6.032.281.568	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.032.281.568	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.236.544	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	143.236.544	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.236.544	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.704.792	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	5	1		BELANJA OPERASI	179.704.792	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	179.704.792	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Mutasi dan Promosi ASN**	**5.324.193.044**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01				Pengelolaan Mutasi ASN	82.773.148	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	82.773.148	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	82.773.148	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	109.176.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	109.176.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.176.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03				Pengelolaan Promosi ASN	5.132.243.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.132.243.448	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.132.243.448	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Pengembangan Kompetensi ASN**	**598.499.692**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02				Pengelolaan Assessment Center	321.477.900	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	271.477.900	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	271.477.900	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.558.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09	5	1		BELANJA OPERASI	113.558.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	113.558.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14				Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.462.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	5	1		BELANJA OPERASI	163.462.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.462.896	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**525.598.888**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	212.495.344	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	212.495.344	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	212.495.344	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	184.742.648	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	184.742.648	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	184.742.648	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07				Pembinaan Disiplin ASN	109.952.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	109.952.896	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.952.896	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.408.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	18.408.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.408.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.147.294.471**	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.923.500**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.250.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.168.300	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	3.168.300	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.168.300	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.250.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	231.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	231.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	231.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	231.600	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.292.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	35.292.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.292.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.500.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	28.500.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**24.470.189.305**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.470.189.305	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	24.470.189.305	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	24.470.189.305	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.05**	**00**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**349.476.104**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	349.476.104	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	349.476.104	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.476.104	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**794.840.350**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.717.500	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	12.717.500	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.717.500	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.090.050	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	163.090.050	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	163.090.050	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.475.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	98.475.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.475.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.677.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.677.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.677.800	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	22.500.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.380.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	477.380.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	477.380.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**314.058.900**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	314.058.900	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	264.058.900	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	264.058.900	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.532.331.136**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	259.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	259.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.270.331.136	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.270.331.136	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.331.136	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.651.643.176**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.142.204.176	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.142.204.176	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.142.204.176	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.119.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	5	1		BELANJA OPERASI	221.119.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	221.119.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	150.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.320.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	117.720.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.720.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	20.600.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.600.000	
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**01**	**1.10**	**00**				**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.959.832.000**	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.509.832.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.509.832.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2		BELANJA MODAL	450.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.10	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**877.977.592**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**877.977.592**	
5	**04**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**877.977.592**	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	94.092.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	94.092.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.092.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	355.699.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	355.699.448	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	355.699.448	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05				Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	428.185.696	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	428.185.696	
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	428.185.696	
									Jumlah Belanja	**49.836.858.591**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(42.877.026.591)**	
0	**00**	**5.03.5.04.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Urusan Pemerintahan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.02 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**25.859.700.589**	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**11.887.645.500**	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**9.787.646.500**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8.170.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.170.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	850.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	850.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	379.334.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	379.334.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	379.334.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13				Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	388.311.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	388.311.900	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	388.311.900	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.03**	**00**				**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.250.000.000**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	102.295.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	102.295.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.295.400	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	500.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	500.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	347.704.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	347.704.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	347.704.600	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**02**	**1.04**	**00**				**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**849.999.000**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	300.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	219.999.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	219.999.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	219.999.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	330.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1		BELANJA OPERASI	330.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**13.972.055.089**	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.271.800**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.259.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.259.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.259.700	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.012.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	11.012.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.012.100	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**10.110.306.125**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.094.047.225	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.094.047.225	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	10.094.047.225	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.592.200	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.592.200	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	5.199.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.199.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.467.100	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.467.100	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**462.451.600**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.958.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	21.958.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.958.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.749.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	54.749.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.749.600	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	107.495.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.495.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.424.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.424.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.424.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	15.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.825.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	242.825.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	242.825.000	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**602.180.000**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05				Pengadaan Mebel	15.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	587.180.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	3.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	584.180.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	534.180.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**550.009.436**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	226.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.009.436	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	324.009.436	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	324.009.436	
5	**05**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.190.836.128**	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.232.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	837.232.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	837.232.032	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.353.604.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	1.153.604.096	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.604.096	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	200.000.000	
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	
									Jumlah Belanja	**25.859.700.589**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(25.859.700.589)**	
0	**00**	**5.05.0.00.0.00.02.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

BADAN PENGHUBUNG

Urusan Pemerintahan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01 Badan Penghubung

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**			**PENDAPATAN DAERAH**		
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**4**	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**94.000.000**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	94.000.000	
									Jumlah Pendapatan	**94.000.000**	
0	**00**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**8.699.475.589**	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**3.071.865.180**	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**3.071.865.180**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	220.569.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	45.569.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.569.600	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2		BELANJA MODAL	175.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04				Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	239.617.116	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	239.617.116	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	239.617.116	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.611.678.464	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.611.678.464	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.611.678.464	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.627.610.409**	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.877.200**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.200	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.877.200	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.877.200	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.047.299.557**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.299.557	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.047.299.557	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.047.299.557	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.774.300**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	10.190.500	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.190.500	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.500	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	30.670.500	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.670.500	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	80.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.425.300	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.425.300	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.425.300	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	59.488.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.488.000	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**144.820.100**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	144.820.100	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2		BELANJA MODAL	144.820.100	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.820.100	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.078.787.508**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	6.990.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	205.000.000	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.797.508	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	866.797.508	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	866.797.508	
5	**07**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.163.051.744**	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	791.759.628	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	791.759.628	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	791.759.628	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	180.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2		BELANJA MODAL	100.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.292.116	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	91.292.116	
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.292.116	
									Jumlah Belanja	**8.699.475.589**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(8.605.475.589)**	
0	**00**	**5.07.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

INSPEKTORAT

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**INSPEKTORAT DAERAH**	**43.485.039.356**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**5.999.442.988**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**3.899.443.658**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	599.999.992	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	599.999.992	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	599.999.992	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	384.500.396	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	384.500.396	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	384.500.396	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03				Reviu Laporan Kinerja	199.999.650	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	199.999.650	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.650	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04				Reviu Laporan Keuangan	400.000.048	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	400.000.048	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.048	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05				Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.024.944.096	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.024.944.096	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.024.944.096	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06				Kerjasama Pengawasan Internal	739.999.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	689.999.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	689.999.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	549.999.976	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	549.999.976	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	549.999.976	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.02**	**00**				**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**2.099.999.330**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.999.586	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	149.999.586	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.586	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.949.999.744	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.899.999.744	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.999.744	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2		BELANJA MODAL	50.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.580.184.426**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**1.630.311.832**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	530.311.944	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	530.311.944	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	530.311.944	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.099.999.888	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.099.999.888	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.999.888	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.02**	**00**				**Pendampingan dan Asistensi**	**1.949.872.594**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	649.877.394	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	649.877.394	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	649.877.394	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	349.995.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	349.995.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.995.500	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	799.999.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	799.999.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	799.999.800	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.999.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	149.999.900	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.900	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.905.411.942**	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**83.757.200**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.777.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	55.777.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.777.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.979.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	27.979.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.979.700	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.467.540.274**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.467.540.274	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	20.467.540.274	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	20.467.540.274	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.284.979.040**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.992.540	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	25.992.540	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.992.540	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.499.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	76.499.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.499.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.990.400	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	149.990.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	149.990.400	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	44.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.497.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	888.497.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	888.497.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.697.093.301**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.697.093.301	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	3.697.093.301	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.697.093.301	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.058.398.988**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	275.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.778.398.988	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	349.998.988	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	349.998.988	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2		BELANJA MODAL	2.428.400.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.428.400.000	
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.313.643.139**	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.590.703.139	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.590.703.139	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.590.703.139	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.372.940.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	92.245.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	92.245.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	2.280.695.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.208.695.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	350.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	
									Jumlah Belanja	**43.485.039.356**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(43.485.039.356)**	
0	**00**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
									Jumlah Pendapatan	**0**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**5**			**BELANJA**		
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**36.506.475.368**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**720.152.896**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**	**1.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**720.152.896**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	720.152.896	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	720.152.896	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	720.152.896	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**16.848.269.544**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**	**1.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**16.848.269.544**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.848.269.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	16.848.269.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	380.414.544	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	16.467.855.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**7.323.441.144**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**	**1.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**7.323.441.144**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.323.441.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	7.323.441.144	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	410.778.744	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	6.912.662.400	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**715.092.192**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**	**1.01**	**00**				**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**715.092.192**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715.092.192	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	715.092.192	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	715.092.192	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**0.00**	**00**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.899.519.592**	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.01**	**00**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.754.400**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.717.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.717.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.717.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.800	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	4.036.800	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.036.800	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.02**	**00**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.055.633.324**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.055.633.324	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	9.055.633.324	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	9.055.633.324	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.06**	**00**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**305.530.800**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.120.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.494.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	19.914.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.914.200	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2		BELANJA MODAL	92.580.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.580.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	75.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.142.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	18.142.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.142.600	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.774.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	89.774.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.774.000	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.07**	**00**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**82.896.500**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.896.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2		BELANJA MODAL	82.896.500	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.896.500	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.08**	**00**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**807.823.168**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.200.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	110.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.623.168	

Kode Rekening									Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	695.623.168	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	695.623.168	
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**01**	**1.09**	**00**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**635.881.400**	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.036.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	449.036.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	449.036.400	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	17.040.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.875.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2		BELANJA MODAL	149.875.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.875.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	19.930.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000	
									Jumlah Belanja	**36.506.475.368**	
									Total Surplus/(Defisit)	**(36.506.475.368)**	
0	**00**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**			**PEMBIAYAAN**		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	
									Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**2.455.921.918.860**	**965.996.606.919**	**0**	**0**	**3.421.918.525.779**
1	**01**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**1.455.871.352.360**	**373.430.817.880**	**0**	**0**	**1.829.302.170.240**
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.451.720.092.276	373.310.444.880	0	0	1.825.030.537.156
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.071.381.208.978	8.016.424.580	0	0	1.079.397.633.558
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.561.300	0	0	0	130.561.300
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.469.400	0	0	0	88.469.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.091.900	0	0	0	42.091.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.058.013.831.398	0	0	0	1.058.013.831.398
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.057.907.216.098	0	0	0	1.057.907.216.098
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.252.800	0	0	0	22.252.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.362.500	0	0	0	84.362.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.100.000	0	0	0	52.100.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.100.000	0	0	0	52.100.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.975.000	0	0	0	50.975.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.975.000	0	0	0	50.975.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	848.588.050	2.267.518.400	0	0	3.116.106.450
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.159.400	2.267.518.400	0	0	2.559.677.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.746.400	0	0	0	23.746.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250	0	0	0	31.526.250
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	501.156.000	0	0	0	501.156.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.556.750.930	0	0	0	9.556.750.930
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	716.785.650	0	0	0	716.785.650
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.839.965.280	0	0	0	8.839.965.280
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.728.402.300	5.748.906.180	0	0	8.477.308.480
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	733.212.800	0	0	0	733.212.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.412.000.000	5.748.906.180	0	0	7.160.906.180
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	583.189.500	0	0	0	583.189.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	380.276.620.398	365.294.020.300	0	0	745.570.640.698
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	170.736.520.286	218.351.489.200	0	0	389.088.009.486
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.226.900	116.456.460.000	0	0	116.516.686.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	15.729.900	11.905.395.000	0	0	11.921.124.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	668.000.000	0	0	668.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	558.578.000	0	0	558.578.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	558.578.000	558.578.000	0	0	1.117.156.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	334.906.000	0	0	334.906.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	2.632.733.000	0	0	2.632.733.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	763.164.000	6.088.193.000	0	0	6.851.357.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	365.255.000	0	0	365.255.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	614.200.000	0	0	614.200.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0	614.200.000	0	0	614.200.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	381.582.000	0	0	381.582.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	497.892.000	0	0	497.892.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.528.580.000	0	0	1.528.580.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	32.000.000	1.910.000.000	0	0	1.942.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.918.007.550	203.892.200	0	0	2.121.899.750
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	6.104.998.800	0	0	0	6.104.998.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.339.250.000	0	0	0	8.339.250.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	114.824.800	0	0	0	114.824.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.077.887.600	0	0	0	1.077.887.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.236.970.036	0	0	0	53.236.970.036
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	292.540.000	0	0	0	292.540.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	410.816.500	0	0	0	410.816.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	97.404.715.000	73.033.045.000	0	0	170.437.760.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	42.994.700	0	0	0	42.994.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900	0	0	0	39.883.900

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	0	0	0	323.932.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	195.231.054.656	126.689.340.700	0	0	321.920.395.356
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0	54.752.103.700	0	0	54.752.103.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0	5.533.000.000	0	0	5.533.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	3.504.000.000	4.887.000.000	0	0	8.391.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	440.808.000	665.000.000	0	0	1.105.808.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	0	3.090.716.000	0	0	3.090.716.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	225.000.000	0	0	225.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	380.400.000	1.185.000.000	0	0	1.565.400.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.475.000.000	0	0	0	2.475.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.730.636.600	10.000.000	0	0	12.740.636.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.813.648.000	5.954.786.000	0	0	12.768.434.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	142.451.000	0	0	0	142.451.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	968.912.200	0	0	0	968.912.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.949.982.256	0	0	0	46.949.982.256
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900	0	0	0	748.663.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	550.682.000	0	0	0	550.682.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	119.164.855.000	50.386.735.000	0	0	169.551.590.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100	0	0	0	37.083.100

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.02	55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600	0	0	0	323.932.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.309.045.456	20.253.190.400	0	0	34.562.235.856
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	119.642.600	10.007.314.600	0	0	10.126.957.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	0	1.733.000.000	0	0	1.733.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	2.972.042.000	0	0	2.972.042.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	10.080.000	519.283.800	0	0	529.363.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.031.672.000	0	0	0	1.031.672.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	239.560.000	0	0	0	239.560.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000	0	0	0	512.250.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	123.582.000	0	0	0	123.582.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.217.700	0	0	0	467.217.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156	0	0	0	5.551.968.156
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	259.215.500	0	0	0	259.215.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	5.959.750.000	5.021.550.000	0	0	10.981.300.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.547.900	0	0	0	16.547.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600	0	0	0	17.559.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.262.900	0	0	0	62.262.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	62.262.900	0	0	0	62.262.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500	0	0	0	31.762.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400	0	0	0	30.500.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001				UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	3.238.545.812	120.373.000	0	0	3.358.918.812
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	946.324.212	120.373.000	0	0	1.066.697.212
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.521.700	120.373.000	0	0	213.894.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.827.500	120.373.000	0	0	148.200.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.777.200	0	0	0	2.777.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.917.000	0	0	0	62.917.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.052.512	0	0	0	712.052.512
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	712.052.512	0	0	0	712.052.512
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.750.000	0	0	0	140.750.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.340.000	0	0	0	121.340.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000	0	0	0	14.410.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.292.221.600	0	0	0	2.292.221.600
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.248.220.800	0	0	0	1.248.220.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	554.737.200	0	0	0	554.737.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800	0	0	0	129.726.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	281.928.100	0	0	0	281.928.100
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	281.828.700	0	0	0	281.828.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	993.371.300	0	0	0	993.371.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	366.887.000	0	0	0	366.887.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500	0	0	0	118.635.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	237.391.800	0	0	0	237.391.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	270.457.000	0	0	0	270.457.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	50.629.500	0	0	0	50.629.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500	0	0	0	50.629.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002				UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	912.714.272	0	0	0	912.714.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	626.607.372	0	0	0	626.607.372
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.461.200	0	0	0	40.461.200
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.384.800	0	0	0	8.384.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.567.400	0	0	0	6.567.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.509.000	0	0	0	25.509.000
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.670.272	0	0	0	524.670.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.670.272	0	0	0	524.670.272
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.475.900	0	0	0	61.475.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.475.900	0	0	0	61.475.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	207.016.500	0	0	0	207.016.500
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	179.548.800	0	0	0	179.548.800
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	132.307.900	0	0	0	132.307.900

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	47.240.900	0	0	0	47.240.900
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	0	0	0	27.467.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.467.700	0	0	0	27.467.700
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	79.090.400	0	0	0	79.090.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	79.090.400	0	0	0	79.090.400
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	79.090.400	0	0	0	79.090.400
1	**02**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**569.089.971.911**	**82.147.061.703**	**0**	**0**	**651.237.033.614**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kesehatan	291.076.033.222	2.179.917.000	0	0	293.255.950.222
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.852.190.606	1.412.702.500	0	0	257.264.893.106
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.952.800	0	0	0	65.952.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.004.000	0	0	0	44.004.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.948.800	0	0	0	21.948.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	229.823.996.834	0	0	0	229.823.996.834
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	229.772.607.934	0	0	0	229.772.607.934
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.388.900	0	0	0	51.388.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.189.220.500	651.807.500	0	0	1.841.028.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.100.000	651.807.500	0	0	655.907.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.185.120.500	0	0	0	1.185.120.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	44.560.000	0	0	44.560.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	44.560.000	0	0	44.560.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.627.457.472	0	0	0	23.627.457.472
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.627.457.472	0	0	0	23.627.457.472
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.145.563.000	716.335.000	0	0	1.861.898.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.200.000	0	0	0	443.200.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.988.500	0	0	0	88.988.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	613.374.500	716.335.000	0	0	1.329.709.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	31.804.176.316	767.214.500	0	0	32.571.390.816
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	31.054.857.216	767.214.500	0	0	31.822.071.716
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.779.162.080	0	0	0	2.779.162.080
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	910.780.800	0	0	0	910.780.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	822.475.800	0	0	0	822.475.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	470.062.200	0	0	0	470.062.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	50.647.900	0	0	0	50.647.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.879.370.036	767.214.500	0	0	3.646.584.536
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.009.387.200	0	0	0	23.009.387.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	33.701.200	0	0	0	33.701.200

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	49.270.000	0	0	0	49.270.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	42.768.000	0	0	0	42.768.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	42.768.000	0	0	0	42.768.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	706.551.100	0	0	0	706.551.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49.636.000	0	0	0	49.636.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	656.915.100	0	0	0	656.915.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.838.446.300	0	0	0	1.838.446.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.494.400	0	0	0	12.494.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.494.400	0	0	0	12.494.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.825.951.900	0	0	0	1.825.951.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.688.566.000	0	0	0	1.688.566.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137.385.900	0	0	0	137.385.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	728.589.000	0	0	0	728.589.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	324.497.600	0	0	0	324.497.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	324.497.600	0	0	0	324.497.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	404.091.400	0	0	0	404.091.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	404.091.400	0	0	0	404.091.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	852.631.000	0	0	0	852.631.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	0	0	0	603.785.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	603.785.000	0	0	0	603.785.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	248.846.000	0	0	0	248.846.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	248.846.000	0	0	0	248.846.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001				UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	2.629.636.392	429.266.200	0	0	3.058.902.592
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.446.573.192	429.266.200	0	0	2.875.839.392
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.561.348	184.266.200	0	0	339.827.548
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.960.800	184.266.200	0	0	200.227.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.600.548	0	0	0	139.600.548
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.049.340.544	0	0	0	1.049.340.544
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.049.340.544	0	0	0	1.049.340.544
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.671.300	50.000.000	0	0	555.671.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000	0	0	0	39.175.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.900.000	0	0	0	79.900.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	386.596.300	50.000.000	0	0	436.596.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	736.000.000	195.000.000	0	0	931.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	736.000.000	195.000.000	0	0	931.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	183.063.200	0	0	0	183.063.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	183.063.200	0	0	0	183.063.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	183.063.200	0	0	0	183.063.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002				UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	9.399.147.134	1.177.369.470	0	0	10.576.516.604
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.399.147.134	930.369.470	0	0	10.329.516.604
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.619.300	842.031.200	0	0	1.727.650.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	812.036.200	0	0	812.036.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	885.619.300	29.995.000	0	0	915.614.300
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.191.208.704	0	0	0	4.191.208.704
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	572.000.000	0	0	0	572.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.619.208.704	0	0	0	3.619.208.704
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.190.000	0	0	0	480.190.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.700.000	0	0	0	224.700.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.490.000	0	0	0	255.490.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.842.129.130	88.338.270	0	0	3.930.467.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.842.129.130	88.338.270	0	0	3.930.467.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	247.000.000	0	0	247.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	247.000.000	0	0	247.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	247.000.000	0	0	247.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003				UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.364.197.352	149.250.400	0	0	2.513.447.752
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.291.673.772	114.250.400	0	0	2.405.924.172
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.623.200	64.250.400	0	0	159.873.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.600	64.250.400	0	0	64.372.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.501.600	0	0	0	95.501.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.950.913.472	0	0	0	1.950.913.472
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.950.913.472	0	0	0	1.950.913.472
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.137.100	50.000.000	0	0	295.137.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.400.000	0	0	0	39.400.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.110.000	0	0	0	95.110.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.627.100	50.000.000	0	0	160.627.100
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.523.580	35.000.000	0	0	107.523.580
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	72.523.580	35.000.000	0	0	107.523.580
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.730.580	35.000.000	0	0	37.730.580
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	69.793.000	0	0	0	69.793.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004				RSUD Bali Mandara	161.230.497.441	69.211.144.233	0	0	230.441.641.674

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	161.230.497.441	41.599.147.439	0	0	202.829.644.880
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.829.644.880	0	0	0	52.829.644.880
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.837.000.000	0	0	0	5.837.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.992.644.880	0	0	0	46.992.644.880
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	108.400.852.561	41.599.147.439	0	0	150.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	108.400.852.561	41.599.147.439	0	0	150.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	27.611.996.794	0	0	27.611.996.794
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005				Rumah Sakit Jiwa	36.249.362.598	2.906.054.500	0	0	39.155.417.098
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.192.119.598	1.007.474.900	0	0	37.199.594.498
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.199.594.498	0	0	0	13.199.594.498
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402	0	0	0	1.114.110.402
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.085.484.096	0	0	0	12.085.484.096
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	22.992.525.100	1.007.474.900	0	0	24.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.992.525.100	1.007.474.900	0	0	24.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	57.243.000	1.898.579.600	0	0	1.955.822.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006				Rumah Sakit Mata Bali Mandara	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	49.618.000.000	4.382.000.000	0	0	54.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007				UPTD Labotarium dan Pengujian Obat tradisional	16.523.097.772	1.712.059.900	0	0	18.235.157.672
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.677.494.272	1.576.559.900	0	0	6.254.054.172
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.670.800	202.545.900	0	0	526.216.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.294.100	202.545.900	0	0	231.840.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	294.376.700	0	0	0	294.376.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.307.014.000	0	0	1.307.014.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	58.564.000	0	0	58.564.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.248.450.000	0	0	1.248.450.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.079.994.272	0	0	0	3.079.994.272
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.079.994.272	0	0	0	3.079.994.272
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.273.829.200	67.000.000	0	0	1.340.829.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000	0	0	0	40.800.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.072.200	0	0	0	206.072.200
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.026.957.000	67.000.000	0	0	1.093.957.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.845.603.500	135.500.000	0	0	11.981.103.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11.448.103.500	15.000.000	0	0	11.463.103.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.459.862	15.000.000	0	0	315.459.862
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	11.147.643.638	0	0	0	11.147.643.638
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	397.500.000	120.500.000	0	0	518.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	397.500.000	120.500.000	0	0	518.000.000
1	**03**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**331.524.140.434**	**504.144.470.803**	**0**	**0**	**835.668.611.237**
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001				UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	1.472.592.968	3.373.736.100	0	0	4.846.329.068
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	627.300.540	539.494.100	0	0	1.166.794.640
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.920.700	0	0	0	90.920.700
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.971.200	0	0	0	11.971.200
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.853.600	0	0	0	10.853.600
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.125.900	0	0	0	5.125.900
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	0	0	0	13.500.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.970.000	0	0	0	11.970.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	357.750.100	0	0	357.750.100
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	357.750.100	0	0	357.750.100

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.200.000	0	0	0	134.200.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	0	0	0	1.100.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.100.000	0	0	0	53.100.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.179.840	181.744.000	0	0	583.923.840
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.254.048	0	0	0	234.254.048
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.020.000	0	0	0	18.020.000
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.905.792	181.744.000	0	0	331.649.792
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	845.292.428	2.834.242.000	0	0	3.679.534.428
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	845.292.428	2.834.242.000	0	0	3.679.534.428
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	845.292.428	2.834.242.000	0	0	3.679.534.428
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002				UPTD Pengelolaan Air Minum	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	24.675.749.626	3.585.143.710	0	0	28.260.893.336
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003				UPTD Pengelolaan Air Limbah	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.104.884.800	0	0	0	10.104.884.800
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	295.270.913.040	497.185.590.993	0	0	792.456.504.033
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.110.599.013	1.318.205.858	0	0	34.428.804.871
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	836.553.366	0	0	0	836.553.366
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	448.699.780	0	0	0	448.699.780
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.853.586	0	0	0	387.853.586
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.811.918.513	0	0	0	27.811.918.513
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.811.918.513	0	0	0	27.811.918.513
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	758.821.230	0	0	0	758.821.230
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.205.600	0	0	0	24.205.600
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.305.630	0	0	0	52.305.630
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	0	0	0	85.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32.520.000	0	0	0	32.520.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.000.000	0	0	0	42.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	465.290.000	0	0	0	465.290.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	324.614.000	0	0	324.614.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	324.614.000	0	0	324.614.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.966.448	0	0	0	1.017.966.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.990.000	0	0	0	2.990.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.750.000	0	0	0	496.750.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.226.448	0	0	0	318.226.448
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.685.339.456	993.591.858	0	0	3.678.931.314
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.710.974.940	0	0	0	1.710.974.940
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.788.452	0	0	0	299.788.452
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	674.576.064	993.591.858	0	0	1.668.167.922
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.391.577.156	25.559.162.000	0	0	29.950.739.156
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	910.238.736	3.460.000.000	0	0	4.370.238.736
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	618.072.236	400.000.000	0	0	1.018.072.236
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	53.542.300	3.060.000.000	0	0	3.113.542.300
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	238.624.200	0	0	0	238.624.200
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.481.338.420	22.099.162.000	0	0	25.580.500.420
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	658.131.936	1.256.638.000	0	0	1.914.769.936
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	308.400.688	20.243.544.000	0	0	20.551.944.688
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.514.805.796	598.980.000	0	0	3.113.785.796
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.387.833.332	9.826.000.000	0	0	13.213.833.332

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.387.833.332	9.826.000.000	0	0	13.213.833.332
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.972.499.732	300.000.000	0	0	2.272.499.732
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	185.432.900	350.000.000	0	0	535.432.900
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	88.682.600	9.176.000.000	0	0	9.264.682.600
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100	0	0	0	1.141.218.100
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	156.356.800	1.425.000.000	0	0	1.581.356.800
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	156.356.800	1.425.000.000	0	0	1.581.356.800
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	107.012.100	200.000.000	0	0	307.012.100
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	42.332.600	1.000.000.000	0	0	1.042.332.600
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	7.012.100	225.000.000	0	0	232.012.100
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	229.438.138.161	228.612.830.102	0	0	458.050.968.263
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	229.438.138.161	228.612.830.102	0	0	458.050.968.263
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	428.251.100	750.000.000	0	0	1.178.251.100
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1.053.783.300	2.690.000.000	0	0	3.743.783.300
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	227.956.103.761	225.172.830.102	0	0	453.128.933.863
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.876.772.898	230.444.393.033	0	0	251.321.165.931

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	20.876.772.898	230.444.393.033	0	0	251.321.165.931
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.081.964.200	625.000.000	0	0	1.706.964.200
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.728.414.000	0	0	0	1.728.414.000
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	0	65.300.139.850	0	0	65.300.139.850
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	519.859.432	85.340.394.240	0	0	85.860.253.672
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	15.200.000	68.972.053.391	0	0	68.987.253.391
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.217.069.026	2.564.766.741	0	0	19.781.835.767
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	82.244.000	3.560.208.183	0	0	3.642.452.183
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	232.022.240	4.081.830.628	0	0	4.313.852.868
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.661.636.720	0	0	0	1.661.636.720
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	0	0	0	924.324.840
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	0	0	0	924.324.840
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	737.311.880	0	0	0	737.311.880
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	737.311.880	0	0	0	737.311.880
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.247.998.960	0	0	0	2.247.998.960
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	863.795.332	0	0	0	863.795.332
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	863.795.332	0	0	0	863.795.332
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	610.907.740	0	0	0	610.907.740
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	610.907.740	0	0	0	610.907.740
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	773.295.888	0	0	0	773.295.888
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	577.499.492	0	0	0	577.499.492

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	195.796.396	0	0	0	195.796.396
1	**04**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.160.753.864**	**0**	**0**	**0**	**2.160.753.864**
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	777.939.776	0	0	0	777.939.776
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	355.192.688	0	0	0	355.192.688
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700	0	0	0	27.533.700
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	327.658.988	0	0	0	327.658.988
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	0	0	0	422.747.088
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088	0	0	0	422.747.088
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.382.814.088	0	0	0	1.382.814.088
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.382.814.088	0	0	0	1.382.814.088
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	302.095.100	0	0	0	302.095.100
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.062.492.088	0	0	0	1.062.492.088
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	18.226.900	0	0	0	18.226.900
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**67.476.582.795**	**2.317.526.500**	**0**	**0**	**69.794.109.295**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000				Satuan Polisi Pamong Praja	44.504.749.249	334.526.500	0	0	44.839.275.749
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.140.440.369	334.526.500	0	0	23.474.966.869

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	0	0	0	17.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	0	0	0	14.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.433.726.487	0	0	0	20.433.726.487
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.433.726.487	0	0	0	20.433.726.487
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.260.010	136.526.500	0	0	357.786.510
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.043.310	0	0	0	37.043.310
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.837.700	136.526.500	0	0	180.364.200
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.400.000	0	0	0	60.400.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.584.000	0	0	0	25.584.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	0	0	0	54.395.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.473.824	0	0	0	1.088.473.824
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	0	0	0	2.970.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	0	0	0	142.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.310.000	0	0	0	56.310.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	887.193.824	0	0	0	887.193.824
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.379.980.048	198.000.000	0	0	1.577.980.048
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.379.980.048	0	0	0	1.379.980.048
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	198.000.000	0	0	198.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.364.308.880	0	0	0	21.364.308.880
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.812.245.084	0	0	0	20.812.245.084
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.697.318.408	0	0	0	3.697.318.408
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.300	0	0	0	206.475.300
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	0	0	0	37.476.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	0	0	0	37.476.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.476.448	0	0	0	37.476.448
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.022.032	0	0	0	16.796.022.032
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	419.663.796	0	0	0	419.663.796
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	419.663.796	0	0	0	419.663.796
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	132.400.000	0	0	0	132.400.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000	0	0	0	132.400.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.744.059.698	508.000.000	0	0	17.252.059.698
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.715.695.698	508.000.000	0	0	17.223.695.698
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.680.700	0	0	0	29.680.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	0	0	0	2.554.700
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.126.000	0	0	0	27.126.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.330.947.180	0	0	0	13.330.947.180
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.330.947.180	0	0	0	13.330.947.180
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.941.200	0	0	0	97.941.200
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.951.800	0	0	0	6.951.800
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.939.100	0	0	0	13.939.100
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.300	0	0	0	2.050.300
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.638.600	508.000.000	0	0	734.638.600
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.638.600	508.000.000	0	0	734.638.600
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.108.190	0	0	0	742.108.190
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.750	0	0	0	120.000.750
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	622.107.440	0	0	0	622.107.440
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.288.379.828	0	0	0	2.288.379.828
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.288.379.828	0	0	0	2.288.379.828
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	28.364.000	0	0	0	28.364.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	28.364.000	0	0	0	28.364.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	28.364.000	0	0	0	28.364.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001				UPTD Pengendalian Bencana Daerah	6.227.773.848	1.475.000.000	0	0	7.702.773.848

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.710.922.888	5.000.000	0	0	4.715.922.888
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.031.400	5.000.000	0	0	15.031.400
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.031.400	5.000.000	0	0	15.031.400
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.940.192	0	0	0	383.940.192
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.000.000	0	0	0	214.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.940.192	0	0	0	169.940.192
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.316.951.296	0	0	0	4.316.951.296
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.046.731.296	0	0	0	4.046.731.296
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.220.000	0	0	0	270.220.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.516.850.960	1.470.000.000	0	0	2.986.850.960
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	458.734.000	0	0	0	458.734.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	458.734.000	0	0	0	458.734.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	0	0	0	782.616.960
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	782.616.960	0	0	0	782.616.960
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	275.500.000	1.470.000.000	0	0	1.745.500.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	275.500.000	1.470.000.000	0	0	1.745.500.000
1	**06**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**29.799.117.496**	**3.956.730.033**	**0**	**0**	**33.755.847.529**
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	26.057.126.712	103.779.198	0	0	26.160.905.910

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.537.028.312	103.779.198	0	0	22.640.807.510
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.315.900	0	0	0	27.315.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.591.900	0	0	0	18.591.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.603.000	0	0	0	3.603.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.121.000	0	0	0	5.121.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.501.001.824	0	0	0	19.501.001.824
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.501.001.824	0	0	0	19.501.001.824
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.077.400	58.779.198	0	0	234.856.598
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.661.600	0	0	0	9.661.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	58.779.198	0	0	58.779.198
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.925.000	0	0	0	100.925.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.800	0	0	0	5.648.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000	0	0	0	3.660.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.182.000	0	0	0	56.182.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.497.040	0	0	0	370.497.040
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	0	0	0	500.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	0	0	0	180.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.997.040	0	0	0	189.997.040
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.462.136.148	45.000.000	0	0	2.507.136.148
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.062.239.368	0	0	0	1.062.239.368
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262.335.136	0	0	0	262.335.136

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.137.561.644	45.000.000	0	0	1.182.561.644
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.141.300	0	0	0	42.141.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.530.000	0	0	0	3.530.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000	0	0	0	3.530.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.611.300	0	0	0	38.611.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.611.300	0	0	0	38.611.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.091.240.700	0	0	0	3.091.240.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	56.624.300	0	0	0	56.624.300
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	28.699.700	0	0	0	28.699.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600	0	0	0	27.924.600
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	350.833.900	0	0	0	350.833.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	314.440.000	0	0	0	314.440.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.393.900	0	0	0	36.393.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	292.135.200	0	0	0	292.135.200
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	184.401.000	0	0	0	184.401.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.03	12	Pemulasaraan	107.734.200	0	0	0	107.734.200
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.384.397.800	0	0	0	2.384.397.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.397.800	0	0	0	2.384.397.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.500	0	0	0	7.249.500
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	7.249.500	0	0	0	7.249.500
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.614.900	0	0	0	3.614.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.614.900	0	0	0	3.614.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.614.900	0	0	0	3.614.900
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.937.800	0	0	0	255.937.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.937.800	0	0	0	255.937.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	0	0	0	255.937.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.163.700	0	0	0	127.163.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	0	0	0	127.163.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.700	0	0	0	127.163.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001				UPTD Pelayanan Sosial	3.741.990.784	3.852.950.835	0	0	7.594.941.619
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.107.111.316	3.852.950.835	0	0	5.960.062.151
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.042.500	54.000.000	0	0	229.042.500
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.838.700	0	0	0	9.838.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	54.000.000	0	0	54.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	0	0	0	160.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.638.800	0	0	0	2.638.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.565.000	0	0	0	2.565.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	27.500.000	0	0	27.500.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	7.500.000	0	0	7.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.000.000	0	0	20.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.207.800	0	0	0	220.207.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.100.000	0	0	0	201.100.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.107.800	0	0	0	19.107.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.711.861.016	3.771.450.835	0	0	5.483.311.851
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.077.544	0	0	0	219.077.544
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.578.584	3.771.450.835	0	0	4.089.029.419
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.175.204.888	0	0	0	1.175.204.888
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.634.879.468	0	0	0	1.634.879.468
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	956.480.668	0	0	0	956.480.668
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	01	Pengasuhan	40.000.000	0	0	0	40.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	269.546.000	0	0	0	269.546.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	89.750.000	0	0	0	89.750.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000	0	0	0	10.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.950.000	0	0	0	272.950.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000	0	0	0	47.914.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	208.840.668	0	0	0	208.840.668
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	0	0	0	17.480.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	678.398.800	0	0	0	678.398.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	465.000.000	0	0	0	465.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	0	0	0	60.000.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800	0	0	0	109.798.800
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.600.000	0	0	0	7.600.000
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	04	1.03	12	Pemulasaraan	36.000.000	0	0	0	36.000.000
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**861.794.519.853**	**401.023.987.436**	**0**	**0**	**1.262.818.507.289**
2	**07**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**34.007.845.396**	**364.217.100**	**0**	**0**	**34.372.062.496**
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001				UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1.654.408.128	207.057.600	0	0	1.861.465.728
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	604.880.028	178.557.600	0	0	783.437.628
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.774.100	0	0	0	26.774.100
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.342.800	0	0	0	3.342.800
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.986.300	0	0	0	7.986.300
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	0	0	0	13.000.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	945.000	0	0	0	945.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	73.751.000	0	0	73.751.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	73.751.000	0	0	73.751.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.732.592	0	0	0	211.732.592
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	0	0	0	24.000.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.732.592	0	0	0	187.732.592
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.373.336	104.806.600	0	0	471.179.936
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.323.336	0	0	0	324.323.336

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	104.806.600	0	0	104.806.600
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.050.000	0	0	0	42.050.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.049.528.100	28.500.000	0	0	1.078.028.100
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.049.528.100	28.500.000	0	0	1.078.028.100
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.049.528.100	28.500.000	0	0	1.078.028.100
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002				UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	459.403.446	0	0	0	459.403.446
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	321.155.444	0	0	0	321.155.444
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.588.400	0	0	0	30.588.400
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.325.900	0	0	0	5.325.900
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.612.500	0	0	0	11.612.500
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.650.000	0	0	0	13.650.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.857.296	0	0	0	95.857.296
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	0	0	0	1.250.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	0	0	0	12.600.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.007.296	0	0	0	82.007.296
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.709.748	0	0	0	194.709.748
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.500.000	0	0	0	74.500.000
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	0	0	0	20.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.209.748	0	0	0	100.209.748
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	138.248.002	0	0	0	138.248.002
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	138.248.002	0	0	0	138.248.002
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	0	0	0	138.248.002
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	31.894.033.822	157.159.500	0	0	32.051.193.322
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.621.246.122	157.159.500	0	0	31.778.405.622
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.148.776.822	0	0	0	28.148.776.822
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.148.776.822	0	0	0	28.148.776.822
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.379.700	21.720.000	0	0	294.099.700
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.493.500	0	0	0	13.493.500
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.330.800	21.720.000	0	0	71.050.800
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.800.000	0	0	0	64.800.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.013.400	0	0	0	36.013.400
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.542.000	0	0	0	101.542.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.173.177.432	0	0	0	1.173.177.432
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000	0	0	0	1.490.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576.000.000	0	0	0	576.000.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.687.432	0	0	0	595.687.432
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.026.912.168	135.439.500	0	0	2.162.351.668

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	723.719.384	0	0	0	723.719.384
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.905.792	0	0	0	169.905.792
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.133.286.992	135.439.500	0	0	1.268.726.492
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600	0	0	0	30.997.600
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	0	0	0	30.997.600
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	0	0	0	30.997.600
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	176.010.100	0	0	0	176.010.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	173.010.100	0	0	0	173.010.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	0	0	0	173.010.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	54.500.100	0	0	0	54.500.100
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	0	0	0	6.747.500
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	0	0	0	6.747.500
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	47.752.600	0	0	0	47.752.600
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	45.191.600	0	0	0	45.191.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.561.000	0	0	0	2.561.000
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	11.279.900	0	0	0	11.279.900
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	11.279.900	0	0	0	11.279.900
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	0	0	0	11.279.900
2	**08**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.306.400.192**	**0**	**0**	**0**	**2.306.400.192**
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000				Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.412.990.200	0	0	0	1.412.990.200
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	739.892.500	0	0	0	739.892.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	739.892.500	0	0	0	739.892.500
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	439.973.600	0	0	0	439.973.600
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	299.918.900	0	0	0	299.918.900
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.000.000	0	0	0	20.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20.000.000	0	0	0	20.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	20.000.000	0	0	0	20.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.097.700	0	0	0	653.097.700
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	0	0	0	653.097.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.097.700	0	0	0	653.097.700
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0002				UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	893.409.992	0	0	0	893.409.992
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	513.469.992	0	0	0	513.469.992
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.338.200	0	0	0	2.338.200
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.537.400	0	0	0	1.537.400
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.800	0	0	0	800.800
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.131.792	0	0	0	506.131.792
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.938.696	0	0	0	118.938.696
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.767.648	0	0	0	38.767.648
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.425.448	0	0	0	348.425.448
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	316.190.000	0	0	0	316.190.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	93.750.000	0	0	0	93.750.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	93.750.000	0	0	0	93.750.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	222.440.000	0	0	0	222.440.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.940.000	0	0	0	4.940.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	217.500.000	0	0	0	217.500.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	63.750.000	0	0	0	63.750.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	63.750.000	0	0	0	63.750.000
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	63.750.000	0	0	0	63.750.000
2	**09**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**2.965.255.704**	**0**	**0**	**0**	**2.965.255.704**
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.407.811.044	0	0	0	1.407.811.044
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	715.463.576	0	0	0	715.463.576
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	715.463.576	0	0	0	715.463.576
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	715.463.576	0	0	0	715.463.576
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	537.181.024	0	0	0	537.181.024
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	212.369.440	0	0	0	212.369.440
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	212.369.440	0	0	0	212.369.440
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	324.811.584	0	0	0	324.811.584

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324.811.584	0	0	0	324.811.584
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	155.166.444	0	0	0	155.166.444
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	155.166.444	0	0	0	155.166.444
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	155.166.444	0	0	0	155.166.444
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009				UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.557.444.660	0	0	0	1.557.444.660
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	702.760.636	0	0	0	702.760.636
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.216.200	0	0	0	60.216.200
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.600	0	0	0	5.016.600
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.508.800	0	0	0	13.508.800
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.190.800	0	0	0	9.190.800
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.462.644	0	0	0	320.462.644
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	0	0	0	202.224.000
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.238.644	0	0	0	118.238.644
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.081.792	0	0	0	322.081.792
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	198.772.896	0	0	0	198.772.896
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.976.000	0	0	0	8.976.000
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.332.896	0	0	0	114.332.896

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	854.684.024	0	0	0	854.684.024
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	854.684.024	0	0	0	854.684.024
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	667.744.332	0	0	0	667.744.332
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	186.939.692	0	0	0	186.939.692
2	**10**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**311.272.200**	**0**	**0**	**0**	**311.272.200**
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000				Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	311.272.200	0	0	0	311.272.200
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	311.272.200	0	0	0	311.272.200
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	311.272.200	0	0	0	311.272.200
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	311.272.200	0	0	0	311.272.200
2	**11**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**4.075.715.191**	**106.486.280**	**0**	**0**	**4.182.201.471**
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	729.284.388	0	0	0	729.284.388
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	391.102.096	0	0	0	391.102.096
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	391.102.096	0	0	0	391.102.096
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	391.102.096	0	0	0	391.102.096
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	145.838.400	0	0	0	145.838.400
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	145.838.400	0	0	0	145.838.400
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	37.392.200	0	0	0	37.392.200

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108.446.200	0	0	0	108.446.200
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.343.892	0	0	0	192.343.892
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	192.343.892	0	0	0	192.343.892
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	192.343.892	0	0	0	192.343.892
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0006				UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	577.382.919	85.904.080	0	0	663.286.999
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	577.382.919	85.904.080	0	0	663.286.999
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.573.300	0	0	0	9.573.300
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.704.300	0	0	0	7.704.300
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.869.000	0	0	0	1.869.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	342.167.379	85.904.080	0	0	428.071.459
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	342.167.379	85.904.080	0	0	428.071.459
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.642.240	0	0	0	225.642.240
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	225.642.240	0	0	0	225.642.240
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0007				UPTD Pengelolaan Sampah	2.769.047.884	20.582.200	0	0	2.789.630.084
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	509.840.888	20.582.200	0	0	530.423.088
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.819.600	0	0	0	66.819.600
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.000	0	0	0	5.492.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.947.400	0	0	0	8.947.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.400.000	0	0	0	45.400.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.980.200	0	0	0	6.980.200
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	20.582.200	0	0	20.582.200
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.582.200	0	0	20.582.200
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.021.288	0	0	0	443.021.288
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.941.288	0	0	0	323.941.288
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.080.000	0	0	0	119.080.000
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.259.206.996	0	0	0	2.259.206.996
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.259.206.996	0	0	0	2.259.206.996
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.259.206.996	0	0	0	2.259.206.996
2	**12**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**326.868.988**	**0**	**0**	**0**	**326.868.988**
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	326.868.988	0	0	0	326.868.988
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	186.673.244	0	0	0	186.673.244
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	186.673.244	0	0	0	186.673.244
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	186.673.244	0	0	0	186.673.244
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	140.195.744	0	0	0	140.195.744
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	140.195.744	0	0	0	140.195.744
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	140.195.744	0	0	0	140.195.744
2	**13**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**33.227.751.192**	**102.215.962**	**0**	**0**	**33.329.967.154**

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.734.753.456	102.215.962	0	0	16.836.969.418
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.383.044	0	0	0	271.383.044
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.188.300	0	0	0	14.188.300
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257.194.744	0	0	0	257.194.744
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.367.342.508	0	0	0	14.367.342.508
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.236.963.864	0	0	0	14.236.963.864
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.378.644	0	0	0	130.378.644
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.503.000	91.215.962	0	0	282.718.962
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.481.500	0	0	0	5.481.500
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.441.800	91.215.962	0	0	101.657.762
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	0	0	0	75.500.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.700	0	0	0	5.648.700
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.255.000	0	0	0	12.255.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.976.000	0	0	0	77.976.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.000	0	0	0	7.340.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.340.000	0	0	0	7.340.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.785.176	0	0	0	616.785.176
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.400.000	0	0	0	137.400.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.385.176	0	0	0	479.385.176
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.280.399.728	11.000.000	0	0	1.291.399.728
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.252.799.728	0	0	0	1.252.799.728
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000	11.000.000	0	0	38.600.000
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	163.208.344	0	0	0	163.208.344
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	163.208.344	0	0	0	163.208.344
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	163.208.344	0	0	0	163.208.344
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	990.754.632	0	0	0	990.754.632
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	990.754.632	0	0	0	990.754.632
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	513.318.792	0	0	0	513.318.792
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	477.435.840	0	0	0	477.435.840
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.339.034.760	0	0	0	15.339.034.760
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.339.034.760	0	0	0	15.339.034.760
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	247.835.892	0	0	0	247.835.892

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	877.999.292	0	0	0	877.999.292
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	583.427.544	0	0	0	583.427.544
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	13.629.772.032	0	0	0	13.629.772.032
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**603.494.588**	**0**	**0**	**0**	**603.494.588**
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	603.494.588	0	0	0	603.494.588
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	603.494.588	0	0	0	603.494.588
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	0	0	0	603.494.588
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.494.588	0	0	0	603.494.588
2	**15**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**36.514.095.713**	**11.984.459.513**	**0**	**0**	**48.498.555.226**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000				Dinas Perhubungan	25.357.931.837	806.808.400	0	0	26.164.740.237
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.393.868.677	806.808.400	0	0	22.200.677.077
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.463.900	0	0	0	58.463.900
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.265.200	0	0	0	26.265.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.631.300	0	0	0	9.631.300
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.162.000	0	0	0	2.162.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.709.800	0	0	0	3.709.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.776.800	0	0	0	1.776.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.276.800	0	0	0	5.276.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.642.000	0	0	0	9.642.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.805.735.001	0	0	0	17.805.735.001
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.778.679.801	0	0	0	17.778.679.801
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.055.200	0	0	0	27.055.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.100.700	368.730.400	0	0	818.831.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.618.500	0	0	0	4.618.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.315.200	368.730.400	0	0	399.045.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.375.000	0	0	0	5.375.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.792.000	0	0	0	309.792.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000	260.268.000	0	0	810.268.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000	85.500.000	0	0	635.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	174.768.000	0	0	174.768.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.721.132	0	0	0	622.721.132
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	0	0	0	5.500.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.000.000	0	0	0	232.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.221.132	0	0	0	385.221.132
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.906.847.944	177.810.000	0	0	2.084.657.944

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	953.073.192	0	0	0	953.073.192
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.340.000	0	0	0	54.340.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	899.434.752	177.810.000	0	0	1.077.244.752
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.205.132.332	0	0	0	2.205.132.332
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.085.450.604	0	0	0	1.085.450.604
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	981.698.404	0	0	0	981.698.404
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	103.752.200	0	0	0	103.752.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	38.598.100	0	0	0	38.598.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	19.127.500	0	0	0	19.127.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	19.470.600	0	0	0	19.470.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	833.990.728	0	0	0	833.990.728
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	833.990.728	0	0	0	833.990.728
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	56.207.200	0	0	0	56.207.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	56.207.200	0	0	0	56.207.200
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	190.885.700	0	0	0	190.885.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	190.885.700	0	0	0	190.885.700
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.688.040	0	0	0	1.000.688.040
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	758.242.788	0	0	0	758.242.788
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	0	0	0	758.242.788
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	758.242.788	0	0	0	758.242.788
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001				UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	1.359.475.380	231.830.500	0	0	1.591.305.880
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	203.163.796	31.830.500	0	0	234.994.296
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.261.000	31.830.500	0	0	81.091.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.264.500	0	0	0	2.264.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.370.500	31.830.500	0	0	43.201.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600.000	0	0	0	600.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.026.000	0	0	0	35.026.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.302.148	0	0	0	44.302.148
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	0	0	0	1.100.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.000	0	0	0	660.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.542.148	0	0	0	42.542.148

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.600.648	0	0	0	109.600.648
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.170.648	0	0	0	94.170.648
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.430.000	0	0	0	15.430.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.156.311.584	200.000.000	0	0	1.356.311.584
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.156.311.584	200.000.000	0	0	1.356.311.584
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	662.311.584	0	0	0	662.311.584
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	494.000.000	200.000.000	0	0	694.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002				UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	8.757.467.884	9.456.092.000	0	0	18.213.559.884
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	459.379.236	44.410.000	0	0	503.789.236
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.113.700	44.410.000	0	0	115.523.700
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.836.100	44.410.000	0	0	57.246.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.277.600	0	0	0	58.277.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.616.848	0	0	0	57.616.848
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000	0	0	0	17.700.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.916.848	0	0	0	39.916.848
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.648.688	0	0	0	330.648.688
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.088.688	0	0	0	325.088.688
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.560.000	0	0	0	5.560.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.298.088.648	9.411.682.000	0	0	17.709.770.648
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003				UPTD Perlengkapan Jalan	568.609.032	1.389.614.613	0	0	1.958.223.645
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	137.339.948	40.213.800	0	0	177.553.748
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.067.500	0	0	0	13.067.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.832.700	0	0	0	4.832.700
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.234.800	0	0	0	8.234.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	40.213.800	0	0	40.213.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	40.213.800	0	0	40.213.800
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.272.448	0	0	0	124.272.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.242.448	0	0	0	119.242.448
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000	0	0	0	5.030.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	431.269.084	1.349.400.813	0	0	1.780.669.897
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	431.269.084	1.349.400.813	0	0	1.780.669.897
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	214.901.392	868.507.750	0	0	1.083.409.142
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	216.367.692	480.893.063	0	0	697.260.755
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004				UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	470.611.580	100.114.000	0	0	570.725.580
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	460.531.580	100.114.000	0	0	560.645.580

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.091.580	54.235.000	0	0	454.326.580
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.093.500	54.235.000	0	0	59.328.500
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.713.600	0	0	0	1.713.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	0	0	0	3.000.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390.284.480	0	0	0	390.284.480
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	45.879.000	0	0	45.879.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	45.879.000	0	0	45.879.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000	0	0	0	1.100.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	0	0	0	1.100.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.340.000	0	0	0	59.340.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.940.000	0	0	0	53.940.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000	0	0	0	5.400.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	10.080.000	0	0	0	10.080.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	0	0	0	10.080.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	0	0	0	10.080.000
2	**16**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**71.296.927.626**	**383.182.860.881**	**0**	**0**	**454.479.788.507**
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	71.296.927.626	383.182.860.881	0	0	454.479.788.507
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.329.722.209	318.360.800	0	0	19.648.083.009
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.990.400	0	0	0	29.990.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.384.200	0	0	0	18.384.200
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.437.600	0	0	0	5.437.600
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.168.600	0	0	0	6.168.600
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.782.929.713	0	0	0	14.782.929.713
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.429.264.313	0	0	0	13.429.264.313
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.353.665.400	0	0	0	1.353.665.400
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.174.400	232.950.000	0	0	604.124.400
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600	0	0	0	5.244.600
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.942.500	232.950.000	0	0	254.892.500
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	0	0	0	87.500.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.247.300	0	0	0	22.247.300
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	0	0	0	39.900.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.340.000	0	0	0	194.340.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	85.410.800	0	0	85.410.800
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	28.160.000	0	0	28.160.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	57.250.800	0	0	57.250.800
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.989.000	0	0	0	486.989.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000	0	0	0	3.355.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.634.000	0	0	0	348.634.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	0	0	0	135.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.658.638.696	0	0	0	3.658.638.696

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.848.366.568	0	0	0	1.848.366.568
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	7.120.000	0	0	0	7.120.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000	0	0	0	172.890.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.519.152.128	0	0	0	1.519.152.128
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.110.000	0	0	0	111.110.000
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	25.465.785.080	990.052.000	0	0	26.455.837.080
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	25.465.785.080	990.052.000	0	0	26.455.837.080
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.968.121.336	169.850.000	0	0	2.137.971.336
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.517.960.140	29.680.000	0	0	12.547.640.140
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	4.339.073.588	229.283.000	0	0	4.568.356.588
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.237.886.728	103.859.000	0	0	3.341.745.728
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.914.906.988	245.730.000	0	0	2.160.636.988
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.487.836.300	211.650.000	0	0	1.699.486.300
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	26.501.420.337	381.874.448.081	0	0	408.375.868.418
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	26.501.420.337	381.874.448.081	0	0	408.375.868.418
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.208.749.468	380.048.126.081	0	0	381.256.875.549
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15.721.534.821	126.700.000	0	0	15.848.234.821
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	9.571.136.048	1.699.622.000	0	0	11.270.758.048
2	**17**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**32.441.566.574**	**56.950.800**	**0**	**0**	**32.498.517.374**

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.061.679.128	56.950.800	0	0	28.118.629.928
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.342.319.872	56.950.800	0	0	16.399.270.672
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.172.896	0	0	0	86.172.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.809.396	0	0	0	80.809.396
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.363.500	0	0	0	5.363.500
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.823.127.248	0	0	0	13.823.127.248
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.823.127.248	0	0	0	13.823.127.248
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.962.500	0	0	0	251.962.500
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.100	0	0	0	9.999.100
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.298.700	0	0	0	44.298.700
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.187.700	0	0	0	12.187.700
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	0	0	0	4.500.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.977.000	0	0	0	100.977.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	56.950.800	0	0	56.950.800
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	56.950.800	0	0	56.950.800
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.102.200	0	0	0	1.210.102.200
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.991.000	0	0	0	1.991.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.200.000	0	0	0	271.200.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	936.911.200	0	0	0	936.911.200
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.955.028	0	0	0	970.955.028

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.462.736	0	0	0	749.462.736
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	0	0	0	50.000.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.492.292	0	0	0	171.492.292
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	275.064.140	0	0	0	275.064.140
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	0	0	0	27.956.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	0	0	0	27.956.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	0	0	0	247.108.140
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	0	0	0	247.108.140
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.800	0	0	0	49.999.800
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.999.800	0	0	0	19.999.800
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	19.999.800	0	0	0	19.999.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	0	0	0	30.000.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	0	0	0	30.000.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.496	0	0	0	118.552.496
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.496	0	0	0	118.552.496
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.496	0	0	0	118.552.496
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	327.995.940	0	0	0	327.995.940
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.995.940	0	0	0	327.995.940
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	204.997.544	0	0	0	204.997.544
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	122.998.396	0	0	0	122.998.396
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001				UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.379.887.446	0	0	0	4.379.887.446
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	417.348.336	0	0	0	417.348.336
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.392.300	0	0	0	4.392.300
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	666.400	0	0	0	666.400
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900	0	0	0	2.725.900
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.372.292	0	0	0	239.372.292
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.001.000	0	0	0	1.001.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000	0	0	0	48.500.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.871.292	0	0	0	189.871.292
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.583.744	0	0	0	173.583.744
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.780.848	0	0	0	95.780.848
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.850.000	0	0	0	2.850.000
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.952.896	0	0	0	74.952.896
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110
2	**18**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**19.044.957.160**	**606.570.000**	**0**	**0**	**19.651.527.160**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.044.957.160	606.570.000	0	0	19.651.527.160
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.403.464.968	606.570.000	0	0	17.010.034.968
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.558.209.816	0	0	0	13.558.209.816
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.558.209.816	0	0	0	13.558.209.816
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.880.400	0	0	0	586.880.400
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.048.600	0	0	0	21.048.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.424.000	0	0	0	49.424.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.000.000	0	0	0	76.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.005.800	0	0	0	23.005.800
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.402.000	0	0	0	417.402.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.840.000	606.570.000	0	0	609.410.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.840.000	606.570.000	0	0	609.410.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.380.052.512	0	0	0	1.380.052.512
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	0	4.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	0	0	0	178.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.052.512	0	0	0	1.198.052.512
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.482.240	0	0	0	875.482.240

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	831.482.240	0	0	0	831.482.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	0	0	0	44.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	319.549.344	0	0	0	319.549.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	112.429.344	0	0	0	112.429.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	112.429.344	0	0	0	112.429.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	207.120.000	0	0	0	207.120.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	207.120.000	0	0	0	207.120.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	566.255.792	0	0	0	566.255.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	566.255.792	0	0	0	566.255.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	122.320.000	0	0	0	122.320.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	443.935.792	0	0	0	443.935.792
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	840.609.616	0	0	0	840.609.616
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	840.609.616	0	0	0	840.609.616
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	670.770.272	0	0	0	670.770.272
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	169.839.344	0	0	0	169.839.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	818.049.344	0	0	0	818.049.344

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	818.049.344	0	0	0	818.049.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	121.549.344	0	0	0	121.549.344
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	559.091.000	0	0	0	559.091.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	137.409.000	0	0	0	137.409.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	97.028.096	0	0	0	97.028.096
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	97.028.096	0	0	0	97.028.096
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	97.028.096	0	0	0	97.028.096
2	**19**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**25.023.489.203**	**117.587.200**	**0**	**0**	**25.141.076.403**
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.471.199.600	0	0	0	3.471.199.600
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.471.199.600	0	0	0	3.471.199.600
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	2.571.199.800	0	0	0	2.571.199.800
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100.000.000	0	0	0	100.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	799.999.800	0	0	0	799.999.800
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	21.052.289.603	117.587.200	0	0	21.169.876.803

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	12.902.289.603	117.587.200	0	0	13.019.876.803
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	12.902.289.603	117.587.200	0	0	13.019.876.803
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	8.150.000.000	0	0	0	8.150.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	8.150.000.000	0	0	0	8.150.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	**20**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**547.332.440**	**226.179.000**	**0**	**0**	**773.511.440**
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	211.129.848	59.743.000	0	0	270.872.848
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	189.411.396	86.437.000	0	0	275.848.396
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	146.791.196	79.999.000	0	0	226.790.196
2	**21**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**870.953.696**	**283.961.000**	**0**	**0**	**1.154.914.696**
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	658.423.048	11.900.000	0	0	670.323.048
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	326.288.048	11.900.000	0	0	338.188.048

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	332.135.000	0	0	0	332.135.000
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	212.530.648	272.061.000	0	0	484.591.648
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	212.530.648	272.061.000	0	0	484.591.648
2	**22**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**597.118.342.874**	**3.817.499.700**	**0**	**0**	**600.935.842.574**
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kebudayaan	98.406.175.739	785.545.900	0	0	99.191.721.639
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.772.590.455	785.545.900	0	0	28.558.136.355
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.397.746	0	0	0	170.397.746
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.908.596	0	0	0	150.908.596
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.489.150	0	0	0	19.489.150
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.085.567.129	0	0	0	23.085.567.129
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.595.849.753	0	0	0	22.595.849.753
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	479.717.376	0	0	0	479.717.376
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.249.700	375.545.900	0	0	860.795.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.109.700	0	0	0	42.109.700
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	375.545.900	0	0	375.545.900
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000	0	0	0	110.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.643.000	0	0	0	19.643.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	0	0	0	25.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	0	0	0	15.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.497.000	0	0	0	273.497.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.385.276.520	110.000.000	0	0	1.495.276.520
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	0	0	0	5.500.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.150.000	110.000.000	0	0	223.150.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.626.520	0	0	0	766.626.520
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.646.099.360	300.000.000	0	0	2.946.099.360
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.154.202.888	0	0	0	1.154.202.888
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.315.000	0	0	0	30.315.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.461.581.472	300.000.000	0	0	1.761.581.472
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	68.728.487.248	0	0	0	68.728.487.248
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.412.686.392	0	0	0	32.412.686.392
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.719.707.688	0	0	0	4.719.707.688
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27.692.978.704	0	0	0	27.692.978.704
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	17.976.319.276	0	0	0	17.976.319.276
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	16.229.823.136	0	0	0	16.229.823.136

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.746.496.140	0	0	0	1.746.496.140
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18.339.481.580	0	0	0	18.339.481.580
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	18.339.481.580	0	0	0	18.339.481.580
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	884.750.200	0	0	0	884.750.200
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	884.750.200	0	0	0	884.750.200
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	496.429.600	0	0	0	496.429.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	388.320.600	0	0	0	388.320.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	117.634.800	0	0	0	117.634.800
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	117.634.800	0	0	0	117.634.800
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	117.634.800	0	0	0	117.634.800
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	902.713.036	0	0	0	902.713.036
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	423.452.840	0	0	0	423.452.840
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	423.452.840	0	0	0	423.452.840
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	479.260.196	0	0	0	479.260.196
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	247.008.696	0	0	0	247.008.696
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	121.038.400	0	0	0	121.038.400
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	111.213.100	0	0	0	111.213.100
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001				UPTD Taman Budaya	6.098.913.184	514.248.000	0	0	6.613.161.184

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.668.913.184	514.248.000	0	0	5.183.161.184
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	268.873.100	0	0	0	268.873.100
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.585.000	0	0	0	178.585.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.920.800	0	0	0	7.920.800
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.500.000	0	0	0	47.500.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.921.000	0	0	0	8.921.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.380.300	0	0	0	8.380.300
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.566.000	0	0	0	17.566.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.612.000	170.748.000	0	0	252.360.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.612.000	170.748.000	0	0	252.360.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.313.421.092	153.500.000	0	0	2.466.921.092
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.331.000	0	0	0	1.331.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	896.000.000	0	0	0	896.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.390.000	153.500.000	0	0	277.890.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.291.700.092	0	0	0	1.291.700.092
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.005.006.992	190.000.000	0	0	2.195.006.992
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.800.000	0	0	0	158.800.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.390.000	0	0	0	189.390.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.656.816.992	190.000.000	0	0	1.846.816.992

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.430.000.000	0	0	0	1.430.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002				UPTD Museum Bali	4.174.393.076	506.756.600	0	0	4.681.149.676
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.221.908.276	459.241.400	0	0	2.681.149.676
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.442.400	0	0	0	245.442.400
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.772.800	0	0	0	37.772.800
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	106.050.000	0	0	0	106.050.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.141.000	0	0	0	25.141.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.505.600	0	0	0	5.505.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.973.000	0	0	0	70.973.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.215.000	36.643.400	0	0	49.858.400
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.215.000	36.643.400	0	0	49.858.400
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	966.705.468	67.598.000	0	0	1.034.303.468
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.562.000	0	0	0	6.562.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.850.000	0	0	0	206.850.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.020.500	60.000.000	0	0	84.020.500
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	729.272.968	7.598.000	0	0	736.870.968
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	996.545.408	355.000.000	0	0	1.351.545.408

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.940.000	0	0	0	117.940.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.200.000	25.000.000	0	0	64.200.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	839.405.408	330.000.000	0	0	1.169.405.408
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.952.484.800	47.515.200	0	0	2.000.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	1.952.484.800	47.515.200	0	0	2.000.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	687.424.600	0	0	0	687.424.600
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.062.590.000	0	0	0	1.062.590.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	202.470.200	47.515.200	0	0	249.985.400
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003				UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5.123.288.172	438.245.000	0	0	5.561.533.172
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.123.288.172	438.245.000	0	0	3.561.533.172
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.199.540	178.245.000	0	0	361.444.540
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	108.151.840	0	0	0	108.151.840
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.584.200	178.245.000	0	0	186.829.200
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.950.000	0	0	0	48.950.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.413.500	0	0	0	12.413.500
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.100.000	0	0	0	5.100.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.747.118.632	70.000.000	0	0	2.817.118.632
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	0	0	0	350.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.300.000	70.000.000	0	0	73.300.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.392.318.632	0	0	0	2.392.318.632
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.970.000	190.000.000	0	0	382.970.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.930.000	0	0	0	148.930.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.040.000	40.000.000	0	0	84.040.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.000.000	0	0	150.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	600.000.000	0	0	0	600.000.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.040.080.000	0	0	0	1.040.080.000
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	359.920.000	0	0	0	359.920.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000				Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	483.315.572.703	1.572.704.200	0	0	484.888.276.903
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.924.389.763	1.572.704.200	0	0	15.497.093.963
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.224.800	0	0	0	23.224.800
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200	0	0	0	18.160.200
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	0	0	0	5.064.600
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.335.459.359	0	0	0	10.335.459.359
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.335.459.359	0	0	0	10.335.459.359
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	668.699.400	0	0	0	668.699.400
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900	0	0	0	6.432.900
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.303.800	0	0	0	34.303.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.095.700	0	0	0	5.095.700
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.867.000	0	0	0	622.867.000
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.172.704.200	0	0	1.172.704.200
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1.172.704.200	0	0	1.172.704.200
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.278.380	0	0	0	550.278.380
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.278.380	0	0	0	550.278.380
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.346.727.824	400.000.000	0	0	2.746.727.824
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	816.923.896	0	0	0	816.923.896
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.529.803.928	400.000.000	0	0	1.929.803.928
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	469.391.182.940	0	0	0	469.391.182.940
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	467.923.363.960	0	0	0	467.923.363.960
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	467.521.683.416	0	0	0	467.521.683.416
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	401.680.544	0	0	0	401.680.544
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	889.435.088	0	0	0	889.435.088
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	444.049.500	0	0	0	444.049.500
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	445.385.588	0	0	0	445.385.588
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	578.383.892	0	0	0	578.383.892
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	578.383.892	0	0	0	578.383.892
2	**23**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**542.052.284**	**175.000.000**	**0**	**0**	**717.052.284**
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005				Biro Organisasi	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	397.702.536	175.000.000	0	0	572.702.536
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	49.849.648	0	0	0	49.849.648
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	89.976.148	0	0	0	89.976.148
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	220.400.292	0	0	0	220.400.292
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448	175.000.000	0	0	212.476.448
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	144.349.748	0	0	0	144.349.748
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	144.349.748	0	0	0	144.349.748
2	**24**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**570.198.832**	**0**	**0**	**0**	**570.198.832**
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003				Biro Umum dan Protokol	570.198.832	0	0	0	570.198.832
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	570.198.832	0	0	0	570.198.832
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	262.363.992	0	0	0	262.363.992
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	262.363.992	0	0	0	262.363.992
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	307.834.840	0	0	0	307.834.840
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	40.758.200	0	0	0	40.758.200
2	24	4.01.0.00.0.00.01.0003	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	267.076.640	0	0	0	267.076.640
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**199.310.159.383**	**9.724.723.400**	**0**	**0**	**209.034.882.783**
3	**25**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**25.191.615.361**	**2.873.500.000**	**0**	**0**	**28.065.115.361**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kelautan dan Perikanan	22.213.009.021	0	0	0	22.213.009.021
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.342.259.433	0	0	0	21.342.259.433
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.045.100	0	0	0	40.045.100

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.689.600	0	0	0	19.689.600
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.350.000	0	0	0	1.350.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.955.500	0	0	0	14.955.500
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.089.377.096	0	0	0	20.089.377.096
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.089.377.096	0	0	0	20.089.377.096
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.212.837.237	0	0	0	1.212.837.237
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	436.757.384	0	0	0	436.757.384
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	776.079.853	0	0	0	776.079.853
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	78.952.896	0	0	0	78.952.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	0	0	0	78.952.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	0	0	0	78.952.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	624.822.396	0	0	0	624.822.396
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	624.822.396	0	0	0	624.822.396
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	624.822.396	0	0	0	624.822.396
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.101.400	0	0	0	42.101.400
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	42.101.400	0	0	0	42.101.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	24.000.000	0	0	0	24.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18.101.400	0	0	0	18.101.400
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	124.872.896	0	0	0	124.872.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	124.872.896	0	0	0	124.872.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	124.872.896	0	0	0	124.872.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001				UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	837.661.742	0	0	0	837.661.742
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	602.662.942	0	0	0	602.662.942
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.302.800	0	0	0	34.302.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.302.800	0	0	0	34.302.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.360.142	0	0	0	568.360.142
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.307.896	0	0	0	152.307.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	416.052.246	0	0	0	416.052.246
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	234.998.800	0	0	0	234.998.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	234.998.800	0	0	0	234.998.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.998.800	0	0	0	234.998.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002				UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	765.044.398	2.800.000.000	0	0	3.565.044.398

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	529.799.598	0	0	0	529.799.598
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.851.300	0	0	0	36.851.300
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.851.300	0	0	0	36.851.300
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.948.298	0	0	0	492.948.298
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.247.896	0	0	0	123.247.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.700.402	0	0	0	369.700.402
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	235.244.800	2.800.000.000	0	0	3.035.244.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	235.244.800	2.800.000.000	0	0	3.035.244.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	230.744.800	2.800.000.000	0	0	3.030.744.800
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4.500.000	0	0	0	4.500.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003				UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	1.111.958.304	73.500.000	0	0	1.185.458.304
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.011.958.304	73.500.000	0	0	1.085.458.304
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.348.600	0	0	0	40.348.600
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.867.600	0	0	0	2.867.600
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.481.000	0	0	0	37.481.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	971.609.704	73.500.000	0	0	1.045.109.704

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.422.400	0	0	0	82.422.400
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	889.187.304	73.500.000	0	0	962.687.304
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004				UPTD Pelabuhan Perikanan	263.941.896	0	0	0	263.941.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	187.941.896	0	0	0	187.941.896
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.405.500	0	0	0	39.405.500
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.352.000	0	0	0	3.352.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.053.500	0	0	0	36.053.500
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.536.396	0	0	0	148.536.396
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.070.400	0	0	0	62.070.400
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.465.996	0	0	0	86.465.996
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	76.000.000	0	0	0	76.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	76.000.000	0	0	0	76.000.000
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76.000.000	0	0	0	76.000.000
3	**26**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**15.151.817.368**	**0**	**0**	**0**	**15.151.817.368**
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pariwisata	15.151.817.368	0	0	0	15.151.817.368

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.159.074.684	0	0	0	13.159.074.684
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.205.094	0	0	0	118.205.094
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.666.848	0	0	0	40.666.848
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.538.246	0	0	0	77.538.246
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.181.934.940	0	0	0	11.181.934.940
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.181.934.940	0	0	0	11.181.934.940
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.330.350	0	0	0	171.330.350
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.112.000	0	0	0	5.112.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.886.050	0	0	0	18.886.050
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000	0	0	0	63.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.174.300	0	0	0	9.174.300
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.220.000	0	0	0	2.220.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.938.000	0	0	0	72.938.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.350.000	0	0	0	406.350.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.350.000	0	0	0	2.350.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000	0	0	0	116.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000	0	0	0	288.000.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.281.254.300	0	0	0	1.281.254.300
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	321.743.100	0	0	0	321.743.100

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	936.911.200	0	0	0	936.911.200
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.600.000	0	0	0	22.600.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	602.476.980	0	0	0	602.476.980
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	47.715.600	0	0	0	47.715.600
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	47.715.600	0	0	0	47.715.600
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	0	0	0	428.022.184
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	428.022.184	0	0	0	428.022.184
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	126.739.196	0	0	0	126.739.196
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	108.040.396	0	0	0	108.040.396
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	18.698.800	0	0	0	18.698.800
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	555.588.532	0	0	0	555.588.532
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	555.588.532	0	0	0	555.588.532
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	184.913.244	0	0	0	184.913.244
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	170.527.792	0	0	0	170.527.792
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	200.147.496	0	0	0	200.147.496
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	264.380.192	0	0	0	264.380.192
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	137.623.196	0	0	0	137.623.196

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	31.823.200	0	0	0	31.823.200
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	105.799.996	0	0	0	105.799.996
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	126.756.996	0	0	0	126.756.996
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	126.756.996	0	0	0	126.756.996
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	570.296.980	0	0	0	570.296.980
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	570.296.980	0	0	0	570.296.980
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	176.049.944	0	0	0	176.049.944
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	175.663.144	0	0	0	175.663.144
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	218.583.892	0	0	0	218.583.892
3	**27**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**88.363.458.962**	**4.287.194.700**	**0**	**0**	**92.650.653.662**
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	75.924.319.052	60.000.000	0	0	75.984.319.052
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.192.375.802	60.000.000	0	0	48.252.375.802
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	701.484.668	0	0	0	701.484.668
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	320.239.284	0	0	0	320.239.284
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381.245.384	0	0	0	381.245.384
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.067.867.866	0	0	0	44.067.867.866
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.669.999.186	0	0	0	43.669.999.186
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.868.680	0	0	0	397.868.680
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.952.700	0	0	0	96.952.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.755.700	0	0	0	16.755.700
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.597.000	0	0	0	12.597.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.100.000	0	0	0	10.100.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.448.684	0	0	0	726.448.684
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.000.000	0	0	0	407.000.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.448.684	0	0	0	319.448.684
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.599.621.884	60.000.000	0	0	2.659.621.884
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.784.154.372	0	0	0	1.784.154.372
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	730.852.512	0	0	0	730.852.512
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.615.000	60.000.000	0	0	144.615.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.678.859.990	0	0	0	18.678.859.990
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	10.434.636.890	0	0	0	10.434.636.890
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	10.434.636.890	0	0	0	10.434.636.890
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.813.474.720	0	0	0	3.813.474.720
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.767.999.140	0	0	0	1.767.999.140
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	530.455.988	0	0	0	530.455.988
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.515.019.592	0	0	0	1.515.019.592

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.430.748.380	0	0	0	4.430.748.380
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.430.748.380	0	0	0	4.430.748.380
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.319.824.232	0	0	0	1.319.824.232
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.319.824.232	0	0	0	1.319.824.232
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.123.328.992	0	0	0	1.123.328.992
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	196.495.240	0	0	0	196.495.240
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7.394.496.692	0	0	0	7.394.496.692
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.341.410.244	0	0	0	7.341.410.244
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	7.341.410.244	0	0	0	7.341.410.244
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	53.086.448	0	0	0	53.086.448
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	53.086.448	0	0	0	53.086.448
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	338.762.336	0	0	0	338.762.336
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	338.762.336	0	0	0	338.762.336
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	338.762.336	0	0	0	338.762.336
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009				UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	632.106.832	0	0	0	632.106.832
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	632.106.832	0	0	0	632.106.832

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	632.106.832	0	0	0	632.106.832
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	296.553.840	0	0	0	296.553.840
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	335.552.992	0	0	0	335.552.992
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011				UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.149.654.698	1.716.298.700	0	0	6.865.953.398
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	904.756.380	0	0	0	904.756.380
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.947.300	0	0	0	97.947.300
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.521.600	0	0	0	14.521.600
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.521.100	0	0	0	12.521.100
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.404.600	0	0	0	13.404.600
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.201.340	0	0	0	419.201.340
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.606.000	0	0	0	223.606.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	195.595.340	0	0	0	195.595.340
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.607.740	0	0	0	387.607.740
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.754.844	0	0	0	280.754.844
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.852.896	0	0	0	106.852.896
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.244.898.318	1.716.298.700	0	0	5.961.197.018
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.956.583.788	1.716.298.700	0	0	4.672.882.488

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	685.249.416	1.674.498.700	0	0	2.359.748.116
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	469.557.232	20.000.000	0	0	489.557.232
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	781.050.164	21.800.000	0	0	802.850.164
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.020.726.976	0	0	0	1.020.726.976
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.288.314.530	0	0	0	1.288.314.530
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.288.314.530	0	0	0	1.288.314.530
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012				UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.253.968.116	2.460.896.000	0	0	5.714.864.116
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.407.392.848	0	0	0	1.407.392.848
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.940.100	0	0	0	79.940.100
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.869.000	0	0	0	4.869.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.752.200	0	0	0	8.752.200
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000	0	0	0	57.500.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.818.900	0	0	0	8.818.900
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.195.140	0	0	0	409.195.140
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.170.000	0	0	0	211.170.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.025.140	0	0	0	198.025.140
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.257.608	0	0	0	918.257.608
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.161.544	0	0	0	225.161.544

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.576.064	0	0	0	679.576.064
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.520.000	0	0	0	13.520.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.846.575.268	2.460.896.000	0	0	4.307.471.268
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.846.575.268	2.460.896.000	0	0	4.307.471.268
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	676.026.076	2.460.896.000	0	0	3.136.922.076
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	712.954.464	0	0	0	712.954.464
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	457.594.728	0	0	0	457.594.728
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013				UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.403.410.264	50.000.000	0	0	3.453.410.264
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	992.050.264	50.000.000	0	0	1.042.050.264
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.335.900	20.000.000	0	0	93.335.900
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.352.000	0	0	0	20.352.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.680.700	20.000.000	0	0	34.680.700
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.803.200	0	0	0	5.803.200
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.890.936	0	0	0	372.890.936
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.200.000	0	0	0	100.200.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.690.936	0	0	0	272.690.936
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.823.428	30.000.000	0	0	575.823.428

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	234.561.844	0	0	0	234.561.844
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.811.584	30.000.000	0	0	334.811.584
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.450.000	0	0	0	6.450.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.411.360.000	0	0	0	2.411.360.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.411.360.000	0	0	0	2.411.360.000
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.411.360.000	0	0	0	2.411.360.000
3	**28**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**40.913.976.684**	**982.373.700**	**0**	**0**	**41.896.350.384**
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000				Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.456.887.198	645.997.700	0	0	39.102.884.898
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.196.717.954	645.997.700	0	0	38.842.715.654
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.300	0	0	0	35.827.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.300	0	0	0	35.827.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.511.646.002	0	0	0	35.511.646.002
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.470.116.602	0	0	0	35.470.116.602
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.529.400	0	0	0	41.529.400
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.041.200	0	0	0	419.041.200
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.264.300	0	0	0	16.264.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.246.500	0	0	0	32.246.500
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.500.000	0	0	0	92.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.718.400	0	0	0	36.718.400
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.950.000	0	0	0	61.950.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.362.000	0	0	0	179.362.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.875.000	300.997.700	0	0	330.872.700
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.875.000	300.997.700	0	0	330.872.700
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.538.536	0	0	0	567.538.536
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.200.000	0	0	0	187.200.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.338.536	0	0	0	380.338.536
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.632.789.916	345.000.000	0	0	1.977.789.916
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.047.498.988	0	0	0	1.047.498.988
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	345.000.000	0	0	345.000.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	585.290.928	0	0	0	585.290.928
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	122.507.596	0	0	0	122.507.596
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.507.596	0	0	0	122.507.596
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.596	0	0	0	122.507.596
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	137.661.648	0	0	0	137.661.648
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.661.648	0	0	0	137.661.648

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	137.661.648	0	0	0	137.661.648
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	869.872.416	300.000.000	0	0	1.169.872.416
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	869.872.416	300.000.000	0	0	1.169.872.416
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.323.700	0	0	0	79.323.700
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.059.400	0	0	0	3.059.400
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.904.300	0	0	0	15.904.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.000.000	0	0	0	33.000.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.360.000	0	0	0	27.360.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.406.548	0	0	0	69.406.548
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	0	0	0	30.000.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.406.548	0	0	0	39.406.548
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.142.168	300.000.000	0	0	1.021.142.168
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.375.448	0	0	0	149.375.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	571.766.720	300.000.000	0	0	871.766.720
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	603.446.232	36.376.000	0	0	639.822.232
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	603.446.232	36.376.000	0	0	639.822.232
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.564.100	0	0	0	54.564.100
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.982.400	0	0	0	2.982.400
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.809.700	0	0	0	12.809.700

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.250.000	0	0	0	35.250.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.522.000	0	0	0	3.522.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.376.000	0	0	36.376.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	36.376.000	0	0	36.376.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.572.348	0	0	0	54.572.348
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000	0	0	0	14.600.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.972.348	0	0	0	39.972.348
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.309.784	0	0	0	494.309.784
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	484.329.784	0	0	0	484.329.784
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000	0	0	0	9.980.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	420.278.250	0	0	0	420.278.250
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.278.250	0	0	0	420.278.250
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.884.300	0	0	0	96.884.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.192.500	0	0	0	2.192.500
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.749.800	0	0	0	12.749.800
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.742.000	0	0	0	2.742.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.200.000	0	0	0	16.200.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.000.000	0	0	0	38.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.827.502	0	0	0	132.827.502
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.044.758	0	0	0	15.044.758
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.782.744	0	0	0	117.782.744
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.566.448	0	0	0	190.566.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.576.448	0	0	0	180.576.448
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000	0	0	0	9.990.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	379.276.440	0	0	0	379.276.440
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	379.276.440	0	0	0	379.276.440
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.751.100	0	0	0	55.751.100
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.600	0	0	0	2.990.600
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.299.500	0	0	0	10.299.500
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	0	0	0	32.500.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.361.000	0	0	0	2.361.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.600.000	0	0	0	7.600.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.770.648	0	0	0	62.770.648
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000	0	0	0	22.800.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.970.648	0	0	0	39.970.648
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.754.692	0	0	0	260.754.692

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.901.796	0	0	0	175.901.796
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.852.896	0	0	0	84.852.896
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005				UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	184.216.148	0	0	0	184.216.148
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	184.216.148	0	0	0	184.216.148
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.328.300	0	0	0	41.328.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.421.300	0	0	0	2.421.300
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.431.800	0	0	0	21.431.800
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.475.200	0	0	0	2.475.200
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.511.948	0	0	0	39.511.948
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.511.948	0	0	0	39.511.948
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.375.900	0	0	0	103.375.900
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.375.900	0	0	0	103.375.900
3	**29**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**536.141.800**	**500.000.000**	**0**	**0**	**1.036.141.800**
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000	0	0	0	8.000.000
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	0	0	0	8.000.000
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	0	0	0	8.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	0	0	0	8.000.000
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	0	0	0	8.000.000
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	0	0	0	8.000.000
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800
3	**30**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**20.566.519.840**	**1.030.111.000**	**0**	**0**	**21.596.630.840**
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.141.704.200	1.011.361.000	0	0	21.153.065.200
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.129.634.168	1.011.361.000	0	0	20.140.995.168
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.079.300	0	0	0	105.079.300
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.079.300	0	0	0	105.079.300
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.232.479.704	0	0	0	16.232.479.704
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.232.479.704	0	0	0	16.232.479.704
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.011.250	649.318.000	0	0	1.204.329.250
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.834.100	0	0	0	16.834.100
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.854.850	649.318.000	0	0	756.172.850
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.500.000	0	0	0	102.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.124.300	0	0	0	20.124.300
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	0	0	0	5.840.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.858.000	0	0	0	302.858.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	62.043.000	0	0	62.043.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	62.043.000	0	0	62.043.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.007.770.880	0	0	0	1.007.770.880
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000	0	0	0	310.000.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464.314.480	0	0	0	464.314.480
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.456.400	0	0	0	233.456.400
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.293.034	300.000.000	0	0	1.529.293.034
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.082.740.138	0	0	0	1.082.740.138
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.552.896	300.000.000	0	0	446.552.896
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	263.962.088	0	0	0	263.962.088
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	263.962.088	0	0	0	263.962.088
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	263.962.088	0	0	0	263.962.088
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.485.500	0	0	0	111.485.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	111.485.500	0	0	0	111.485.500
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.485.500	0	0	0	111.485.500
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	14.629.700	0	0	0	14.629.700
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	14.629.700	0	0	0	14.629.700
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	14.629.700	0	0	0	14.629.700
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	573.607.296	0	0	0	573.607.296
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.555.448	0	0	0	499.555.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000	0	0	0	456.000.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	43.555.448	0	0	0	43.555.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.051.848	0	0	0	74.051.848
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	74.051.848	0	0	0	74.051.848
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.385.448	0	0	0	48.385.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.385.448	0	0	0	48.385.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	48.385.448	0	0	0	48.385.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0002				UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	424.815.640	18.750.000	0	0	443.565.640
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	205.359.396	18.750.000	0	0	224.109.396

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.701.500	18.750.000	0	0	57.451.500
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.562.400	0	0	0	1.562.400
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.280.100	18.750.000	0	0	33.030.100
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	0	0	0	15.000.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.130.000	0	0	0	2.130.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.729.000	0	0	0	5.729.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.196.448	0	0	0	60.196.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.196.448	0	0	0	48.196.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.461.448	0	0	0	106.461.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.461.448	0	0	0	106.461.448
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	219.456.244	0	0	0	219.456.244
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	219.456.244	0	0	0	219.456.244
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	219.456.244	0	0	0	219.456.244
3	**31**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**8.526.470.368**	**51.544.000**	**0**	**0**	**8.578.014.368**
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.690.538.972	0	0	0	7.690.538.972
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	7.418.962.572	0	0	0	7.418.962.572
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	7.418.962.572	0	0	0	7.418.962.572
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	269.057.048	0	0	0	269.057.048

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7.149.905.524	0	0	0	7.149.905.524
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	271.576.400	0	0	0	271.576.400
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	0	0	0	271.576.400
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	271.576.400	0	0	0	271.576.400
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001				UPTD Rumah Kreatif	835.931.396	51.544.000	0	0	887.475.396
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	198.740.596	51.544.000	0	0	250.284.596
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.097.700	51.544.000	0	0	95.641.700
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.437.700	51.544.000	0	0	84.981.700
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000	0	0	0	2.100.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	0	0	0	4.000.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000	0	0	0	4.560.000
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.166.448	0	0	0	52.166.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.166.448	0	0	0	52.166.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.476.448	0	0	0	102.476.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.476.448	0	0	0	102.476.448
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	637.190.800	0	0	0	637.190.800

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	637.190.800	0	0	0	637.190.800
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	637.190.800	0	0	0	637.190.800
3	**32**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**60.159.000**	**0**	**0**	**0**	**60.159.000**
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000				Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	60.159.000	0	0	0	60.159.000
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	60.159.000	0	0	0	60.159.000
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.159.000	0	0	0	60.159.000
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	60.159.000	0	0	0	60.159.000
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**456.335.321.824**	**17.948.743.775**	**0**	**0**	**474.284.065.599**
4	**01**					**SEKRETARIAT DAERAH**	**211.888.861.489**	**17.192.152.775**	**0**	**0**	**229.081.014.264**
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001				Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	49.549.695.496	332.207.274	0	0	49.881.902.770
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.605.584.532	332.207.274	0	0	1.937.791.806
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	377.219.932	0	0	0	377.219.932
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	377.219.932	0	0	0	377.219.932
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.976.000	332.207.274	0	0	636.183.274
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.624.000	0	0	0	13.624.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.390.000	332.207.274	0	0	347.597.274
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.962.000	0	0	0	254.962.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	924.388.600	0	0	0	924.388.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	777.498.600	0	0	0	777.498.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.890.000	0	0	0	86.890.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	0	0	0	60.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.790.033.828	0	0	0	1.790.033.828
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	650.186.136	0	0	0	650.186.136
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	462.201.436	0	0	0	462.201.436
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	187.984.700	0	0	0	187.984.700
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	374.943.300	0	0	0	374.943.300
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.943.400	0	0	0	199.943.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	174.999.900	0	0	0	174.999.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	764.904.392	0	0	0	764.904.392
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.292	0	0	0	349.905.292
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	414.999.100	0	0	0	414.999.100
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	46.154.077.136	0	0	0	46.154.077.136
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	17.249.908.952	0	0	0	17.249.908.952
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	16.549.576.216	0	0	0	16.549.576.216
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	700.332.736	0	0	0	700.332.736
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	28.904.168.184	0	0	0	28.904.168.184
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	28.904.168.184	0	0	0	28.904.168.184
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003				Biro Umum dan Protokol	83.575.349.292	6.060.334.701	0	0	89.635.683.993
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.575.349.292	6.060.334.701	0	0	89.635.683.993
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	692.753.258	0	0	0	692.753.258

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	692.753.258	0	0	0	692.753.258
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	735.774.212	0	0	0	735.774.212
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	735.774.212	0	0	0	735.774.212
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	504.654.924	0	0	0	504.654.924
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	504.654.924	0	0	0	504.654.924
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.841.992.450	391.608.000	0	0	18.233.600.450
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	668.934.900	0	0	0	668.934.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.153.796.018	391.608.000	0	0	2.545.404.018
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.931.628.980	0	0	0	6.931.628.980
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.473.212.280	0	0	0	7.473.212.280
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.420.272	0	0	0	614.420.272
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.234.400.907	0	0	0	22.234.400.907
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.011.354.999	0	0	0	2.011.354.999
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.252.346.500	0	0	0	15.252.346.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.970.699.408	0	0	0	4.970.699.408
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.347.727.168	4.069.131.701	0	0	12.416.858.869
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.221.282.870	0	0	0	7.221.282.870
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.126.444.298	4.069.131.701	0	0	5.195.575.999

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.097.128.773	0	0	0	7.097.128.773
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7.097.128.773	0	0	0	7.097.128.773
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	22.949.161.752	1.599.595.000	0	0	24.548.756.752
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.339.890.145	1.378.595.000	0	0	17.718.485.145
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6.299.771.607	221.000.000	0	0	6.520.771.607
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	309.500.000	0	0	0	309.500.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	721.914.600	0	0	0	721.914.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	721.914.600	0	0	0	721.914.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.449.841.248	0	0	0	2.449.841.248
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0003	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.449.841.248	0	0	0	2.449.841.248
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004				Biro Hukum	5.548.524.800	0	0	0	5.548.524.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.226.544.212	0	0	0	1.226.544.212
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.390.400	0	0	0	40.390.400
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.998.800	0	0	0	14.998.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.392.100	0	0	0	10.392.100
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.500	0	0	0	14.999.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.186.153.812	0	0	0	1.186.153.812
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	491.360.644	0	0	0	491.360.644
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	639.823.168	0	0	0	639.823.168
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	0	0	0	5.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.970.000	0	0	0	49.970.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.321.980.588	0	0	0	4.321.980.588
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.133.619.504	0	0	0	2.133.619.504
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.799.392	0	0	0	1.276.799.392
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	161.550.792	0	0	0	161.550.792
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.388	0	0	0	238.508.388
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	456.760.932	0	0	0	456.760.932
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.188.361.084	0	0	0	2.188.361.084
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.962.905.792	0	0	0	1.962.905.792
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.455.292	0	0	0	225.455.292
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000				Sekretariat Daerah	65.638.663.529	0	0	0	65.638.663.529
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.638.663.529	0	0	0	65.638.663.529
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.391.314.469	0	0	0	65.391.314.469
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.391.314.469	0	0	0	65.391.314.469
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	0	0	0	247.349.060
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	0	0	0	247.349.060
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005				Biro Organisasi	2.049.710.240	215.179.800	0	0	2.264.890.040
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.127.110.244	170.179.800	0	0	1.297.290.044
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.383.800	0	0	0	4.383.800
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.383.800	0	0	0	4.383.800
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.334.400	170.179.800	0	0	521.514.200
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.061.100	0	0	0	17.061.100

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.945.300	170.179.800	0	0	281.125.100
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.328.000	0	0	0	223.328.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.392.044	0	0	0	771.392.044
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	666.062.044	0	0	0	666.062.044
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.330.000	0	0	0	105.330.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	922.599.996	45.000.000	0	0	967.599.996
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	364.917.448	45.000.000	0	0	409.917.448
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	75.668.100	15.000.000	0	0	90.668.100
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	70.640.000	15.000.000	0	0	85.640.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	218.609.348	15.000.000	0	0	233.609.348
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	557.682.548	0	0	0	557.682.548
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	189.218.000	0	0	0	189.218.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	127.751.300	0	0	0	127.751.300
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	23.192.600	0	0	0	23.192.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	87.524.900	0	0	0	87.524.900
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	129.995.748	0	0	0	129.995.748
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007				Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	5.526.918.132	10.584.431.000	0	0	16.111.349.132
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.551.136.132	429.432.000	0	0	2.980.568.132
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.500.000	0	0	0	13.500.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.500.000	0	0	0	13.500.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.934.586.532	429.432.000	0	0	2.364.018.532
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.716.426.532	429.432.000	0	0	2.145.858.532
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.716.000	0	0	0	74.716.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.444.000	0	0	0	143.444.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.049.600	0	0	0	603.049.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.699.600	0	0	0	500.699.600
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.350.000	0	0	0	102.350.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.076.000	0	0	0	629.076.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000	0	0	0	74.814.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000	0	0	0	74.814.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	482.510.000	0	0	0	482.510.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	482.510.000	0	0	0	482.510.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.752.000	0	0	0	71.752.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.752.000	0	0	0	71.752.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2.271.646.000	10.154.999.000	0	0	12.426.645.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.834.784.000	10.154.999.000	0	0	11.989.783.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000	0	0	0	24.760.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.785.344.000	10.154.999.000	0	0	11.940.343.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000	0	0	0	24.680.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.608.000	0	0	0	99.608.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.062.000	0	0	0	50.062.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.546.000	0	0	0	49.546.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	337.254.000	0	0	0	337.254.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	149.662.000	0	0	0	149.662.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000	0	0	0	24.960.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	162.632.000	0	0	0	162.632.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.060.000	0	0	0	75.060.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000	0	0	0	25.100.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000	0	0	0	25.100.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	0	0	0	49.960.000
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	0	0	0	49.960.000
4	**02**					**SEKRETARIAT DPRD**	**244.446.460.335**	**756.591.000**	**0**	**0**	**245.203.051.335**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000				Sekretariat DPRD	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	87.679.983.023	756.591.000	0	0	88.436.574.023
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	273.534.896	0	0	0	273.534.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.122.448	0	0	0	156.122.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	117.412.448	0	0	0	117.412.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.047.632.768	0	0	0	10.047.632.768
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.826.825.372	0	0	0	9.826.825.372
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.662.448	0	0	0	110.662.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.144.948	0	0	0	110.144.948

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.190.497.044	0	0	0	8.190.497.044
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.178.700	0	0	0	132.178.700
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	964.176.800	0	0	0	964.176.800
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.348.620.000	0	0	0	1.348.620.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.494.200	0	0	0	135.494.200
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	954.480.000	0	0	0	954.480.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.655.547.344	0	0	0	4.655.547.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	756.591.000	0	0	761.591.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	756.591.000	0	0	761.591.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.587.479.532	0	0	0	2.587.479.532
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0	0	0	10.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000	0	0	0	900.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.479.532	0	0	0	1.677.479.532
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.270.461.896	0	0	0	4.270.461.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.413.751.896	0	0	0	3.413.751.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	178.640.000	0	0	0	178.640.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.070.000	0	0	0	678.070.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.382.611.479	0	0	0	60.382.611.479
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.289.033.531	0	0	0	58.289.033.531
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.820.224.500	0	0	0	1.820.224.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	273.353.448	0	0	0	273.353.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.922.765.408	0	0	0	1.922.765.408
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	209.882.240	0	0	0	209.882.240
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.712.883.168	0	0	0	1.712.883.168
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	156.766.477.312	0	0	0	156.766.477.312
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	46.300.359.136	0	0	0	46.300.359.136
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.861.127.896	0	0	0	1.861.127.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	14.952.807.344	0	0	0	14.952.807.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	28.620.375.000	0	0	0	28.620.375.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	866.048.896	0	0	0	866.048.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.272.642.240	0	0	0	8.272.642.240
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.216.448	0	0	0	1.649.216.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.856.448	0	0	0	1.655.856.448
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35.074.081.584	0	0	0	35.074.081.584
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.443.432.792	0	0	0	8.443.432.792
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.203.947.000	0	0	0	8.203.947.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.448.064.896	0	0	0	8.448.064.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.360.256.896	0	0	0	8.360.256.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.618.380.000	0	0	0	1.618.380.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	14.206.353.976	0	0	0	14.206.353.976

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	3.946.975.344	0	0	0	3.946.975.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.394.891.736	0	0	0	3.394.891.736
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.240.000.000	0	0	0	3.240.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	900.000.000	0	0	0	900.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.724.486.896	0	0	0	2.724.486.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	39.424.297.240	0	0	0	39.424.297.240
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.285.401.896	0	0	0	3.285.401.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.748.616.000	0	0	0	1.748.616.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	34.390.279.344	0	0	0	34.390.279.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	0	0	0	817.218.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	817.218.896	0	0	0	817.218.896
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	12.671.524.240	0	0	0	12.671.524.240
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.228.871.344	0	0	0	10.228.871.344
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.442.652.896	0	0	0	2.442.652.896
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**299.194.950.089**	**16.453.350.251**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**2.074.345.552.740**
5	**01**					**PERENCANAAN**	**24.962.048.121**	**3.116.326.498**	**0**	**0**	**28.078.374.619**
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.409.993.413	3.116.326.498	0	0	20.526.319.911
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.053.940	0	0	0	370.053.940
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238.824.240	0	0	0	238.824.240
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.028.000	0	0	0	13.028.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.028.000	0	0	0	13.028.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.137.000	0	0	0	12.137.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.485.600	0	0	0	9.485.600
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.457.700	0	0	0	40.457.700
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.093.400	0	0	0	43.093.400
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.973.912.997	0	0	0	13.973.912.997
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.653.611.913	0	0	0	13.653.611.913
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196.113.540	0	0	0	196.113.540
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	124.187.544	0	0	0	124.187.544
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.059.554.736	541.370.000	0	0	1.600.924.736
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.411.148	0	0	0	47.411.148
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.739.048	541.370.000	0	0	597.109.048
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.766.248	0	0	0	114.766.248
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.429.948	0	0	0	69.429.948
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	74.916.448	0	0	0	74.916.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.476.448	0	0	0	103.476.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	593.815.448	0	0	0	593.815.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.476.448	53.000.000	0	0	90.476.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	43.000.000	0	0	43.000.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.476.448	10.000.000	0	0	47.476.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960.327.916	0	0	0	960.327.916
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.466.448	0	0	0	40.466.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.076.448	0	0	0	337.076.448

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	582.785.020	0	0	0	582.785.020
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.667.376	2.521.956.498	0	0	3.530.623.874
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	812.564.480	0	0	0	812.564.480
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.626.448	29.500.000	0	0	168.126.448
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.476.448	2.492.456.498	0	0	2.549.932.946
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.125.180.372	0	0	0	5.125.180.372
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.603.064.240	0	0	0	2.603.064.240
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	85.343.500	0	0	0	85.343.500
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	85.140.900	0	0	0	85.140.900
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.432.579.840	0	0	0	2.432.579.840
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.624.244	0	0	0	744.624.244
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	720.582.444	0	0	0	720.582.444
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	24.041.800	0	0	0	24.041.800
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.467.417.840	0	0	0	1.467.417.840
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	532.405.200	0	0	0	532.405.200
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	649.658.240	0	0	0	649.658.240
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	285.354.400	0	0	0	285.354.400
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	0	0	0	310.074.048

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.074.048	0	0	0	310.074.048
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.426.874.336	0	0	0	2.426.874.336
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	823.391.428	0	0	0	823.391.428
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	106.406.796	0	0	0	106.406.796
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.756.396	0	0	0	86.756.396
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.518.244	0	0	0	418.518.244
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	211.709.992	0	0	0	211.709.992
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	869.580.780	0	0	0	869.580.780
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.838.544	0	0	0	196.838.544
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	279.870.192	0	0	0	279.870.192
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.231.748	0	0	0	95.231.748
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	297.640.296	0	0	0	297.640.296
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	733.902.128	0	0	0	733.902.128

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.300.388	0	0	0	305.300.388
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.429.100	0	0	0	80.429.100
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	266.186.440	0	0	0	266.186.440
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	81.986.200	0	0	0	81.986.200
5	**02**					**KEUANGAN**	**191.990.526.199**	**11.183.364.753**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**1.961.871.143.352**
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	31.171.600.498	1.358.507.200	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.791.227.360.098
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.040.668.978	1.358.507.200	0	0	23.399.176.178
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.049.400	0	0	0	35.049.400
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.049.400	0	0	0	35.049.400
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.363.298.334	0	0	0	19.363.298.334
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.121.709.534	0	0	0	19.121.709.534
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.588.800	0	0	0	241.588.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	913.934.928	459.273.200	0	0	1.373.208.128
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.372.500	0	0	0	17.372.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	459.273.200	0	0	459.273.200
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	643.115.628	0	0	0	643.115.628
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.179.800	0	0	0	22.179.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000	0	0	0	13.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.385.000	0	0	0	62.385.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.882.000	0	0	0	155.882.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.000.000	0	0	0	278.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	0	0	0	275.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.386.316	899.234.000	0	0	2.349.620.316
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	633.846.044	0	0	0	633.846.044
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	0	0	0	10.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.077.100	0	0	0	143.077.100
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	663.463.172	899.234.000	0	0	1.562.697.172
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.634.022.932	0	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.766.331.275.332
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.866.178.792	0	0	0	1.866.178.792
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.617.800	0	0	0	51.617.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.240.000	0	0	0	43.240.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	347.363.700	0	0	0	347.363.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	80.598.400	0	0	0	80.598.400
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	691.430.696	0	0	0	691.430.696
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	651.928.196	0	0	0	651.928.196

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	823.865.900	0	0	0	823.865.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	153.315.500	0	0	0	153.315.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	141.674.500	0	0	0	141.674.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	156.031.400	0	0	0	156.031.400
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	372.844.500	0	0	0	372.844.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	299.997.500	0	0	0	299.997.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	299.997.500	0	0	0	299.997.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	716.462.940	0	0	0	716.462.940
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	645.759.640	0	0	0	645.759.640
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	70.703.300	0	0	0	70.703.300
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.775.000.000	0	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.761.472.252.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.775.000.000	0	0	0	2.775.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	521.974.803.508	521.974.803.508
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	50.000.000.000	0	50.000.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0	0	0	1.186.722.448.892	1.186.722.448.892
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.152.517.800	0	0	0	1.152.517.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.152.517.800	0	0	0	1.152.517.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.496.908.588	0	0	0	1.496.908.588
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.496.908.588	0	0	0	1.496.908.588
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	217.599.200	0	0	0	217.599.200
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	517.668.800	0	0	0	517.668.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	761.640.588	0	0	0	761.640.588
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001				UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.023.766.536	473.724.000	0	0	3.497.490.536
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	674.680.636	473.724.000	0	0	1.148.404.636
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.121.500	0	0	0	148.121.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.670.700	0	0	0	41.670.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.999.800	0	0	0	8.999.800
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	0	0	0	4.200.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.251.000	0	0	0	93.251.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000	0	0	0	58.200.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0	0	1.200.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000	0	0	0	57.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468.359.136	473.724.000	0	0	942.083.136
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.532.600	0	0	0	147.532.600
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000	0	0	0	15.260.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.566.536	473.724.000	0	0	779.290.536
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.349.085.900	0	0	0	2.349.085.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.349.085.900	0	0	0	2.349.085.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.349.085.900	0	0	0	2.349.085.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000				Badan Pendapatan Daerah	127.734.540.345	9.351.133.553	0	0	137.085.673.898
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	126.355.409.945	9.351.133.553	0	0	135.706.543.498
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.913.400	0	0	0	37.913.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.867.800	0	0	0	18.867.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.045.600	0	0	0	19.045.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.490.088.012	0	0	0	119.490.088.012
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.490.088.012	0	0	0	119.490.088.012
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	0	0	0	50.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	0	0	0	50.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.471.478.390	0	0	0	2.471.478.390
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.927.590	0	0	0	6.927.590
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.124.700	0	0	0	200.124.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.365.432.300	0	0	0	1.365.432.300
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.437.800	0	0	0	2.437.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.985.000	0	0	0	14.985.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	806.571.000	0	0	0	806.571.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000	3.411.636.000	0	0	3.424.636.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	559.614.000	0	0	559.614.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.123.829.000	0	0	1.123.829.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000	1.728.193.000	0	0	1.741.193.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	767.136.703	0	0	0	767.136.703
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.740.000	0	0	0	3.740.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104	0	0	0	387.433.104
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.963.599	0	0	0	375.963.599
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.525.793.440	5.939.497.553	0	0	9.465.290.993
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.476.848	0	0	0	115.476.848
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.233.502.088	0	0	0	1.233.502.088
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	856.545.408	0	0	0	856.545.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.200.000	5.939.497.553	0	0	5.946.697.553
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.313.069.096	0	0	0	1.313.069.096

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	94.900.900	0	0	0	94.900.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	94.900.900	0	0	0	94.900.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	94.900.900	0	0	0	94.900.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.284.229.500	0	0	0	1.284.229.500
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.284.229.500	0	0	0	1.284.229.500
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	506.755.600	0	0	0	506.755.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	385.828.800	0	0	0	385.828.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	0	0	0	141.625.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	213.116.600	0	0	0	213.116.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	36.903.500	0	0	0	36.903.500
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.694.574.084	0	0	0	5.694.574.084
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.746.891.524	0	0	0	1.746.891.524
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.101.900	0	0	0	344.101.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.121.900	0	0	0	8.121.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.505.200	0	0	0	179.505.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.914.800	0	0	0	15.914.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.760.000	0	0	0	8.760.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000	0	0	0	18.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.800.000	0	0	0	88.800.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.000.000	0	0	0	491.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	288.000.000	0	0	0	288.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.789.624	0	0	0	911.789.624
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.037.900	0	0	0	71.037.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.774.348	0	0	0	202.774.348
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.140.000	0	0	0	38.140.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	567.717.376	0	0	0	567.717.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.120.000	0	0	0	32.120.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.947.682.560	0	0	0	3.947.682.560
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.947.682.560	0	0	0	3.947.682.560
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.713.557.920	0	0	0	1.713.557.920
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	2.234.124.640	0	0	0	2.234.124.640
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	2.009.669.838	0	0	0	2.009.669.838
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.151.612.326	0	0	0	1.151.612.326
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.342.150	0	0	0	213.342.150
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.115.500	0	0	0	5.115.500
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.276.650	0	0	0	138.276.650

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.750.000	0	0	0	18.750.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.320.000	0	0	0	4.320.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.880.000	0	0	0	21.880.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.960.000	0	0	0	334.960.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.460.000	0	0	0	185.460.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.500.000	0	0	0	149.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	603.310.176	0	0	0	603.310.176
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.679.400	0	0	0	37.679.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.945.344	0	0	0	123.945.344
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000	0	0	0	8.520.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	421.288.032	0	0	0	421.288.032
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.877.400	0	0	0	11.877.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	858.057.512	0	0	0	858.057.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	858.057.512	0	0	0	858.057.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	412.339.480	0	0	0	412.339.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	445.718.032	0	0	0	445.718.032
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.425.012.884	0	0	0	2.425.012.884
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.476.447.476	0	0	0	1.476.447.476

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.177.600	0	0	0	261.177.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.074.700	0	0	0	12.074.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.198.900	0	0	0	181.198.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.920.000	0	0	0	7.920.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.716.000	0	0	0	4.716.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.388.000	0	0	0	8.388.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.880.000	0	0	0	21.880.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.416.200	0	0	0	485.416.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.466.200	0	0	0	266.466.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.950.000	0	0	0	218.950.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.853.676	0	0	0	729.853.676
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.900.800	0	0	0	38.900.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.139.696	0	0	0	264.139.696
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.060.000	0	0	0	16.060.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.964.480	0	0	0	378.964.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.788.700	0	0	0	31.788.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	948.565.408	0	0	0	948.565.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	948.565.408	0	0	0	948.565.408

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	494.600.928	0	0	0	494.600.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	453.964.480	0	0	0	453.964.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	4.805.094.052	0	0	0	4.805.094.052
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.745.953.620	0	0	0	1.745.953.620
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.330.900	0	0	0	324.330.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.184.900	0	0	0	7.184.900
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.076.000	0	0	0	184.076.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.500.000	0	0	0	41.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000	0	0	0	9.600.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.790.000	0	0	0	20.790.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.180.000	0	0	0	36.180.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000.000	0	0	0	500.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	0	0	0	300.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	0	0	0	200.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.622.720	0	0	0	921.622.720
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.999.400	0	0	0	29.999.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.053.048	0	0	0	176.053.048
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.420.000	0	0	0	55.420.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.670.272	0	0	0	598.670.272
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.480.000	0	0	0	61.480.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.059.140.432	0	0	0	3.059.140.432
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.059.140.432	0	0	0	3.059.140.432
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.124.644.368	0	0	0	2.124.644.368
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	934.496.064	0	0	0	934.496.064
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	5.112.248.248	0	0	0	5.112.248.248
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.076.835.304	0	0	0	2.076.835.304
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.374.500	0	0	0	440.374.500
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.157.000	0	0	0	8.157.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.917.300	0	0	0	186.917.300
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	108.828.200	0	0	0	108.828.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000	0	0	0	6.424.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.994.000	0	0	0	68.994.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.054.000	0	0	0	36.054.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.486.000	0	0	0	701.486.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.496.000	0	0	0	1.496.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	0	0	0	500.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.990.000	0	0	0	199.990.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.974.804	0	0	0	934.974.804

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.702.400	0	0	0	62.702.400
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.354.996	0	0	0	152.354.996
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	0	0	0	18.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	598.307.408	0	0	0	598.307.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.110.000	0	0	0	103.110.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.035.412.944	0	0	0	3.035.412.944
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.035.412.944	0	0	0	3.035.412.944
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.703.327.808	0	0	0	2.703.327.808
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	332.085.136	0	0	0	332.085.136
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.417.593.788	0	0	0	3.417.593.788
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.469.583.628	0	0	0	1.469.583.628
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.217.200	0	0	0	297.217.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.247.500	0	0	0	17.247.500
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.714.700	0	0	0	177.714.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.159.000	0	0	0	17.159.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.636.000	0	0	0	9.636.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.760.000	0	0	0	23.760.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.700.000	0	0	0	26.700.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	429.900.000	0	0	0	429.900.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	0	0	0	2.400.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.400.000	0	0	0	228.400.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.100.000	0	0	0	199.100.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	742.466.428	0	0	0	742.466.428
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.727.200	0	0	0	40.727.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.447.700	0	0	0	116.447.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.130.000	0	0	0	29.130.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	515.101.528	0	0	0	515.101.528
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.060.000	0	0	0	41.060.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.948.010.160	0	0	0	1.948.010.160
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.948.010.160	0	0	0	1.948.010.160
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.173.287.648	0	0	0	1.173.287.648
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	774.722.512	0	0	0	774.722.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.149.864.354	0	0	0	2.149.864.354
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.064.500.258	0	0	0	1.064.500.258
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.199.330	0	0	0	209.199.330
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.700	0	0	0	9.995.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142.608.830	0	0	0	142.608.830

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.149.600	0	0	0	9.149.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.477.200	0	0	0	6.477.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.748.000	0	0	0	8.748.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.220.000	0	0	0	7.220.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.020.000	0	0	0	286.020.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.020.000	0	0	0	4.020.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	0	0	0	132.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	0	0	0	150.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.280.928	0	0	0	569.280.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.525.200	0	0	0	46.525.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.185.200	0	0	0	72.185.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.600.000	0	0	0	16.600.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	423.740.928	0	0	0	423.740.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.229.600	0	0	0	10.229.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.085.364.096	0	0	0	1.085.364.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.085.364.096	0	0	0	1.085.364.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	565.470.272	0	0	0	565.470.272
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	519.893.824	0	0	0	519.893.824

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.560.290.476	0	0	0	2.560.290.476
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.631.115.068	0	0	0	1.631.115.068
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.972.800	0	0	0	272.972.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.796.800	0	0	0	3.796.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.065.000	0	0	0	152.065.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.544.000	0	0	0	10.544.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.139.000	0	0	0	3.139.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.048.000	0	0	0	6.048.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.380.000	0	0	0	72.380.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.000.000	0	0	0	377.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	0	0	0	198.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.000.000	0	0	0	179.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.142.268	0	0	0	981.142.268
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.049.200	0	0	0	49.049.200
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.933.800	0	0	0	202.933.800
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.610.000	0	0	0	20.610.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	683.623.168	0	0	0	683.623.168

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.926.100	0	0	0	24.926.100
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	929.175.408	0	0	0	929.175.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	929.175.408	0	0	0	929.175.408
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	482.570.928	0	0	0	482.570.928
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	446.604.480	0	0	0	446.604.480
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009				UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	1.886.271.096	0	0	0	1.886.271.096
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.053.978.584	0	0	0	1.053.978.584
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.343.000	0	0	0	225.343.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.816.300	0	0	0	2.816.300
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.229.700	0	0	0	151.229.700
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.160.000	0	0	0	7.160.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.307.000	0	0	0	4.307.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.320.000	0	0	0	4.320.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.510.000	0	0	0	30.510.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.800.000	0	0	0	312.800.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	0	0	0	135.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.800.000	0	0	0	177.800.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.835.584	0	0	0	515.835.584
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.620.000	0	0	0	43.620.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.080.448	0	0	0	107.080.448
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	0	0	0	17.040.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	334.835.136	0	0	0	334.835.136
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.260.000	0	0	0	13.260.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	832.292.512	0	0	0	832.292.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	832.292.512	0	0	0	832.292.512
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	508.777.376	0	0	0	508.777.376
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	323.515.136	0	0	0	323.515.136
5	**03**					**KEPEGAWAIAN**	**48.024.222.099**	**934.658.900**	**0**	**0**	**48.958.880.999**
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.827.553.115	223.605.000	0	0	41.051.158.115
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.337.444.487	223.605.000	0	0	28.561.049.487
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.923.500	0	0	0	74.923.500
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	0	0	0	5.250.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.168.300	0	0	0	3.168.300
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	0	0	0	2.250.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.600	0	0	0	231.600
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	231.600	0	0	0	231.600
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.292.000	0	0	0	35.292.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.500.000	0	0	0	28.500.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.470.189.305	0	0	0	24.470.189.305

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.470.189.305	0	0	0	24.470.189.305
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.476.104	0	0	0	349.476.104
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	349.476.104	0	0	0	349.476.104
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	741.182.850	0	0	0	741.182.850
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.717.500	0	0	0	12.717.500
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.998.550	0	0	0	149.998.550
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.475.000	0	0	0	98.475.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.677.800	0	0	0	20.677.800
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	0	0	0	22.500.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	436.814.000	0	0	0	436.814.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	53.005.000	0	0	53.005.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	53.005.000	0	0	53.005.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.519.552	0	0	0	1.232.519.552
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000	0	0	0	259.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.519.552	0	0	0	970.519.552
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.469.153.176	170.600.000	0	0	1.639.753.176
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.142.204.176	0	0	0	1.142.204.176
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.119.000	0	0	0	221.119.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.000.000	0	0	150.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.830.000	20.600.000	0	0	126.430.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	12.490.108.628	0	0	0	12.490.108.628
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.363.294.904	0	0	0	6.363.294.904
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.000	0	0	0	8.072.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6.032.281.568	0	0	0	6.032.281.568
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.236.544	0	0	0	143.236.544
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	179.704.792	0	0	0	179.704.792
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	5.324.193.044	0	0	0	5.324.193.044
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	82.773.148	0	0	0	82.773.148
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	109.176.448	0	0	0	109.176.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	5.132.243.448	0	0	0	5.132.243.448
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	277.021.792	0	0	0	277.021.792
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	113.558.896	0	0	0	113.558.896
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	163.462.896	0	0	0	163.462.896
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	525.598.888	0	0	0	525.598.888
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	212.495.344	0	0	0	212.495.344
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	184.742.648	0	0	0	184.742.648
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	109.952.896	0	0	0	109.952.896
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.408.000	0	0	0	18.408.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	686.836.984	261.053.900	0	0	947.890.884
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	415.359.084	211.053.900	0	0	626.412.984

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.657.500	0	0	0	53.657.500
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.091.500	0	0	0	13.091.500
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.566.000	0	0	0	40.566.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	211.053.900	0	0	261.053.900
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	211.053.900	0	0	261.053.900
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.811.584	0	0	0	299.811.584
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.811.584	0	0	0	299.811.584
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.890.000	0	0	0	11.890.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.890.000	0	0	0	11.890.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	271.477.900	50.000.000	0	0	321.477.900
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	271.477.900	50.000.000	0	0	321.477.900
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	271.477.900	50.000.000	0	0	321.477.900
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002				UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.509.832.000	450.000.000	0	0	6.959.832.000
5	**04**					**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**877.977.592**	**0**	**0**	**0**	**877.977.592**
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	877.977.592	0	0	0	877.977.592
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	877.977.592	0	0	0	877.977.592
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	877.977.592	0	0	0	877.977.592

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	94.092.448	0	0	0	94.092.448
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	355.699.448	0	0	0	355.699.448
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	428.185.696	0	0	0	428.185.696
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002				UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**25.060.520.589**	**799.180.000**	**0**	**0**	**25.859.700.589**
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000				Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.172.875.089	799.180.000	0	0	13.972.055.089
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.271.800	0	0	0	56.271.800
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.259.700	0	0	0	45.259.700
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.012.100	0	0	0	11.012.100
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.306.125	0	0	0	10.110.306.125
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.094.047.225	0	0	0	10.094.047.225
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	0	0	0	7.592.200
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	0	0	0	5.199.600
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	0	0	0	3.467.100
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.451.600	0	0	0	462.451.600
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.958.000	0	0	0	21.958.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.749.600	0	0	0	54.749.600
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.495.000	0	0	0	107.495.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.424.000	0	0	0	20.424.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.825.000	0	0	0	242.825.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	599.180.000	0	0	602.180.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	0	15.000.000	0	0	15.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	584.180.000	0	0	587.180.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.009.436	0	0	0	550.009.436
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	0	0	0	226.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.009.436	0	0	0	324.009.436
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.990.836.128	200.000.000	0	0	2.190.836.128
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.232.032	0	0	0	837.232.032
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.153.604.096	200.000.000	0	0	1.353.604.096
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.887.645.500	0	0	0	11.887.645.500
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	9.787.646.500	0	0	0	9.787.646.500
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	8.170.000.000	0	0	0	8.170.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	850.000.000	0	0	0	850.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	379.334.600	0	0	0	379.334.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	388.311.900	0	0	0	388.311.900
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	102.295.400	0	0	0	102.295.400
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	500.000.000	0	0	0	500.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000	0	0	0	300.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	347.704.600	0	0	0	347.704.600
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	849.999.000	0	0	0	849.999.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	300.000.000	0	0	0	300.000.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	219.999.000	0	0	0	219.999.000
5	05	5.05.0.00.0.00.02.0000	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	330.000.000	0	0	0	330.000.000
5	**07**					**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**8.279.655.489**	**419.820.100**	**0**	**0**	**8.699.475.589**
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000				Badan Penghubung	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.382.790.309	244.820.100	0	0	5.627.610.409
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.877.200	0	0	0	4.877.200
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.200	0	0	0	4.877.200
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.047.299.557	0	0	0	3.047.299.557
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.047.299.557	0	0	0	3.047.299.557
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.774.300	0	0	0	188.774.300
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500	0	0	0	10.190.500
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.670.500	0	0	0	30.670.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	0	0	0	80.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.425.300	0	0	0	8.425.300
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.488.000	0	0	0	59.488.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	144.820.100	0	0	144.820.100
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	144.820.100	0	0	144.820.100
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.787.508	0	0	0	1.078.787.508
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	0	0	0	6.990.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	0	0	0	205.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.797.508	0	0	0	866.797.508
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.051.744	100.000.000	0	0	1.163.051.744
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	791.759.628	0	0	0	791.759.628
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	100.000.000	0	0	280.000.000
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.292.116	0	0	0	91.292.116
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	2.896.865.180	175.000.000	0	0	3.071.865.180
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.896.865.180	175.000.000	0	0	3.071.865.180
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.600	175.000.000	0	0	220.569.600
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	239.617.116	0	0	0	239.617.116
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.611.678.464	0	0	0	2.611.678.464

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**34.978.851.055**	**8.506.188.301**	**0**	**0**	**43.485.039.356**
6	**01**					**INSPEKTORAT DAERAH**	**34.978.851.055**	**8.506.188.301**	**0**	**0**	**43.485.039.356**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000				Inspektorat	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.499.223.641	8.406.188.301	0	0	33.905.411.942
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.757.200	0	0	0	83.757.200
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.777.500	0	0	0	55.777.500
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.979.700	0	0	0	27.979.700
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.467.540.274	0	0	0	20.467.540.274
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.467.540.274	0	0	0	20.467.540.274
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.284.979.040	0	0	0	1.284.979.040
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.992.540	0	0	0	25.992.540
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.499.100	0	0	0	76.499.100
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.990.400	0	0	0	149.990.400
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	0	0	0	25.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	0	0	0	44.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	0	0	0	75.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	888.497.000	0	0	0	888.497.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	3.697.093.301	0	0	3.697.093.301
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	3.697.093.301	0	0	3.697.093.301
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.998.988	2.428.400.000	0	0	3.058.398.988
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	5.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.000.000	0	0	0	275.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.998.988	2.428.400.000	0	0	2.778.398.988
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.032.948.139	2.280.695.000	0	0	5.313.643.139
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.590.703.139	0	0	0	2.590.703.139
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.245.000	2.280.695.000	0	0	2.372.940.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000	0	0	0	350.000.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.899.442.988	100.000.000	0	0	5.999.442.988
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.849.443.658	50.000.000	0	0	3.899.443.658
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	599.999.992	0	0	0	599.999.992
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	384.500.396	0	0	0	384.500.396
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	199.999.650	0	0	0	199.999.650
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	400.000.048	0	0	0	400.000.048
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.024.944.096	0	0	0	1.024.944.096
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	689.999.500	50.000.000	0	0	739.999.500
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	549.999.976	0	0	0	549.999.976
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.049.999.330	50.000.000	0	0	2.099.999.330
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.999.586	0	0	0	149.999.586
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.899.999.744	50.000.000	0	0	1.949.999.744
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.580.184.426	0	0	0	3.580.184.426
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.630.311.832	0	0	0	1.630.311.832

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	530.311.944	0	0	0	530.311.944
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.099.999.888	0	0	0	1.099.999.888
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	1.949.872.594	0	0	0	1.949.872.594
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	649.877.394	0	0	0	649.877.394
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	349.995.500	0	0	0	349.995.500
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	799.999.800	0	0	0	799.999.800
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	149.999.900	0	0	0	149.999.900
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**36.181.123.868**	**325.351.500**	**0**	**0**	**36.506.475.368**
8	**01**					**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**36.181.123.868**	**325.351.500**	**0**	**0**	**36.506.475.368**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.574.168.092	325.351.500	0	0	10.899.519.592
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.754.400	0	0	0	11.754.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.717.600	0	0	0	7.717.600
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.800	0	0	0	4.036.800
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.055.633.324	0	0	0	9.055.633.324
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.055.633.324	0	0	0	9.055.633.324
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.950.800	92.580.000	0	0	305.530.800
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.120.000	0	0	0	5.120.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.914.200	92.580.000	0	0	112.494.200
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	0	0	0	75.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.142.600	0	0	0	18.142.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.774.000	0	0	0	89.774.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	82.896.500	0	0	82.896.500
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	82.896.500	0	0	82.896.500
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.823.168	0	0	0	807.823.168
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	0	0	0	2.200.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	0	0	0	110.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.623.168	0	0	0	695.623.168
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	486.006.400	149.875.000	0	0	635.881.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.036.400	0	0	0	449.036.400
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	0	0	0	17.040.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	149.875.000	0	0	149.875.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	0	0	0	19.930.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	720.152.896	0	0	0	720.152.896
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	720.152.896	0	0	0	720.152.896
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	720.152.896	0	0	0	720.152.896

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.848.269.544	0	0	0	16.848.269.544
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.848.269.544	0	0	0	16.848.269.544
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.848.269.544	0	0	0	16.848.269.544
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	715.092.192	0	0	0	715.092.192
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	715.092.192	0	0	0	715.092.192

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	715.092.192	0	0	0	715.092.192
TOTAL							**4.343.716.844.932**	**1.419.978.951.582**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**7.522.393.048.914**

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01				**PELAYANAN UMUM**					
01	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.072.954.140.562	8.136.797.580	0	0	1.081.090.938.142
01	02	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	521.707.696.015	51.451.770.809	0	0	573.159.466.824
01	03	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33.737.899.553	1.857.699.958	0	0	35.595.599.511
01	04	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	44.567.058.955	847.526.500	0	0	45.414.585.455
01	05	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.644.139.628	3.956.730.033	0	0	28.600.869.661
01	06	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	32.547.281.594	335.717.100	0	0	32.882.998.694
01	07	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	513.469.992	0	0	0	513.469.992
01	08	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	702.760.636	0	0	0	702.760.636
01	09	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.087.223.807	106.486.280	0	0	1.193.710.087

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	10	2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.868.988	0	0	0	326.868.988
01	11	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.227.751.192	102.215.962	0	0	33.329.967.154
01	12	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	22.654.283.237	1.023.376.700	0	0	23.677.659.937
01	13	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.329.722.209	318.360.800	0	0	19.648.083.009
01	14	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.759.668.208	56.950.800	0	0	16.816.619.008
01	15	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	16.403.464.968	606.570.000	0	0	17.010.034.968
01	16	2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	547.332.440	226.179.000	0	0	773.511.440
01	17	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	51.711.089.850	3.769.984.500	0	0	55.481.074.350
01	18	2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	570.198.832	0	0	0	570.198.832
01	19	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	23.674.622.173	73.500.000	0	0	23.748.122.173
01	20	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.159.074.684	0	0	0	13.159.074.684
01	21	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	51.496.575.294	110.000.000	0	0	51.606.575.294
01	22	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	40.653.807.440	982.373.700	0	0	41.636.181.140
01	23	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.334.993.564	1.030.111.000	0	0	20.365.104.564

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	24	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	198.740.596	51.544.000	0	0	250.284.596
01	25	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	207.566.880.901	17.192.152.775	0	0	224.759.033.676
01	26	4	02	SEKRETARIAT DPRD	244.446.460.335	756.591.000	0	0	245.203.051.335
01	27	5	01	PERENCANAAN	24.962.048.121	3.116.326.498	0	0	28.078.374.619
01	28	5	02	KEUANGAN	174.062.595.667	11.183.364.753	50.000.000.000	1.708.697.252.400	1.943.943.212.820
01	29	5	03	KEPEGAWAIAN	48.024.222.099	934.658.900	0	0	48.958.880.999
01	30	5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	877.977.592	0	0	0	877.977.592
01	31	5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.060.520.589	799.180.000	0	0	25.859.700.589
01	32	5	07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	8.279.655.489	419.820.100	0	0	8.699.475.589
01	33	6	01	INSPEKTORAT DAERAH	34.978.851.055	8.506.188.301	0	0	43.485.039.356
01	34	8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	36.181.123.868	325.351.500	0	0	36.506.475.368
03				**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					
03	01	1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.909.523.840	1.470.000.000	0	0	24.379.523.840
03	02	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	255.937.800	0	0	0	255.937.800
03	03	4	01	SEKRETARIAT DAERAH	4.321.980.588	0	0	0	4.321.980.588
04				**EKONOMI**					
04	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	257.213.417.363	487.450.627.135	0	0	744.664.044.498
04	02	2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.460.563.802	28.500.000	0	0	1.489.063.802
04	03	2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.262.495.068	0	0	0	2.262.495.068

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
04	04	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.859.812.476	10.961.082.813	0	0	24.820.895.289
04	05	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.967.205.417	382.864.500.081	0	0	434.831.705.498
04	06	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.681.898.366	0	0	0	15.681.898.366
04	07	2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.641.492.192	0	0	0	2.641.492.192
04	08	2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	870.953.696	283.961.000	0	0	1.154.914.696
04	09	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.516.993.188	2.800.000.000	0	0	4.316.993.188
04	10	3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	36.866.883.668	4.177.194.700	0	0	41.044.078.368
04	11	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	122.507.596	0	0	0	122.507.596
04	12	3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	536.141.800	500.000.000	0	0	1.036.141.800
04	13	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.231.526.276	0	0	0	1.231.526.276
04	14	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.327.729.772	0	0	0	8.327.729.772
05				**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.509.240.560	1.425.000.000	0	0	13.934.240.560
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200	0	0	0	311.272.200

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.988.491.384	0	0	0	2.988.491.384
05	04	3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	137.661.648	0	0	0	137.661.648
06				**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**					
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.063.582.958	13.411.143.710	0	0	41.474.726.668
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.160.753.864	0	0	0	2.160.753.864
07				**KESEHATAN**					
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	47.382.275.896	30.695.290.894	0	0	78.077.566.790
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	603.494.588	0	0	0	603.494.588
08				**PARIWISATA**					
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.992.742.684	0	0	0	1.992.742.684
10				**PENDIDIKAN**					
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	382.917.211.798	365.294.020.300	0	0	748.211.232.098
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.023.489.203	117.587.200	0	0	25.141.076.403
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	545.407.253.024	47.515.200	0	0	545.454.768.224
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	542.052.284	175.000.000	0	0	717.052.284

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
11				**PERLINDUNGAN SOSIAL**					
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.899.040.068	0	0	0	4.899.040.068
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.792.930.200	0	0	0	1.792.930.200
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	60.159.000	0	0	0	60.159.000
				TOTAL	**4.325.788.914.400**	**1.419.978.951.582**	**50.000.000.000**	**1.708.697.252.400**	**7.504.465.118.382**

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	A SPM Bidang Pendidikan			
	Pendidikan Menengah			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	116.516.686.900
			Penambahan Ruang Kelas Baru	11.921.124.900
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.851.357.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	365.255.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	614.200.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	614.200.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	381.582.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	497.892.000
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.528.580.000
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.121.899.750
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	53.236.970.036
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.726.800
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.883.900
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	**195.143.290.886**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	54.752.103.700
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.533.000.000
			Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.090.716.000
			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	12.740.636.600
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	12.768.434.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	142.451.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	46.949.982.256
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	748.663.900
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	550.682.000
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.635.500
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.083.100
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	323.932.600
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	**137.981.320.656**
		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.762.500
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.400
			Jumlah Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	**62.262.900**
			Jumlah Pendidikan Menengah	**333.186.874.442**
	Pendidikan Khusus			
		Pengelolaan Pendidikan Khusus		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.126.957.200

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.733.000.000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	512.250.000
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.629.500
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.559.600
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus	**17.992.364.456**
			Jumlah Pendidikan Khusus	**17.992.364.456**
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	**351.179.238.898**
	B SPM Bidang Kesehatan			
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.779.162.080
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**2.779.162.080**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	**2.779.162.080**
	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	910.780.800
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**910.780.800**
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	**910.780.800**
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	**3.689.942.880**
	C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.272.499.732

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	535.432.900
			Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	9.264.682.600
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	28.260.893.336
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			**41.474.726.668**
	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota			**41.474.726.668**
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	307.012.100
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.042.332.600
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	232.012.100
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.104.884.800
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			**11.686.241.600**
	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota			**11.686.241.600**
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**53.160.968.268**
	D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	327.658.988
	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			**355.192.688**
	Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			**355.192.688**
	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi			
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	422.747.088
	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			**422.747.088**
	Jumlah Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi			**422.747.088**
	Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			**777.939.776**
	E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi			
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.697.318.408
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.300
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.022.032
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			**20.774.768.636**
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000
	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			**132.400.000**
	Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi			**20.907.168.636**
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**20.907.168.636**
	F SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti		
			Penyediaan Permakanan	28.699.700
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.924.600
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	**56.624.300**
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti	**56.624.300**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti		
			Pengasuhan	40.000.000
			Penyediaan Makanan	583.986.000
			Penyediaan Sandang	89.750.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.950.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	47.914.000
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	208.840.668
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000
			Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	36.393.900
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	**1.307.314.568**
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti	**1.307.314.568**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
			Penyediaan Permakanan	465.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	192.001.000
			Pemulasaraan	143.734.200
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	**970.534.000**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti	**970.534.000**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
			Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.397.800
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	**2.384.397.800**
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**255.937.800**
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	**2.640.335.600**
			Jumlah SPM Bidang Sosial	**4.974.808.468**

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.800.474.574.507	3.421.918.525.779
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.596.956.527.330	1.829.302.170.240
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.204.392.783.341	1.081.090.938.142
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.665.137.865.766	747.862.862.298
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.105.000.000	207.016.500
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.485.000.000	62.262.900
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	27.000.000.000	79.090.400
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.214.237.608.824	651.237.033.614
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.938.993.989.936	573.159.466.824
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.140.914.389.290	74.474.837.290
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	59.997.596.618	2.021.509.500
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	595.899.128	728.589.000
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.116.264.430	852.631.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	860.333.536.016	835.668.611.237
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.168.942.588	35.595.599.511

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	14.398.230.945	29.950.739.156
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	82.798.854.462	41.474.726.668
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	25.352.673.012	11.686.241.600
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	448.781.001.272	458.050.968.263
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	304.735.916.293	251.321.165.931
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	7.051.833.806	5.341.171.148
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.232.235.572	2.247.998.960
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.508.667.894	2.160.753.864
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	822.862.806	777.939.776
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	685.805.088	1.382.814.088
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	85.405.841.764	69.794.109.295
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.472.371.128	45.414.585.455
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.635.000.000	21.364.308.880
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.000.762.400	3.015.214.960
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	42.032.392.679	33.755.847.529
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.088.958.496	28.600.869.661

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	430.000.000	42.141.300
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	15.633.852.800	4.726.120.168
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	365.000.000	3.614.900
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	470.000.000	255.937.800
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	266.000.000	127.163.700
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.433.924.163.795	1.262.818.507.289
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	62.074.588.000	34.372.062.496
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000.000	32.882.998.694
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	38.000.000.000	1.109.025.700
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.600.000.000	176.010.100
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0	54.500.100
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	2.949.176.000	149.527.902
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.370.695.748	2.306.400.192
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.044.479.248	513.469.992
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	110.000.000	739.892.500
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	298.315.000	316.190.000
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	125.000.000	20.000.000

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	672.500.000	653.097.700
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	55.401.500	63.750.000
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	76.525.440.088	2.965.255.704
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.729.204.417	702.760.636
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.672.353.723	715.463.576
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	568.807.250	537.181.024
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	3.110.149.396	1.009.850.468
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	162.888.950	311.272.200
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	162.888.950	311.272.200
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	83.414.937.212	4.182.201.471
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	117.811.982.982	1.193.710.087
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	1.256.197.800	391.102.096
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.594.613.721	145.838.400
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.045.000.000	192.343.892
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.871.086.300	2.259.206.996
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.175.000.000	326.868.988

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.185.000.000	186.673.244
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	990.000.000	140.195.744
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.492.738.037	33.329.967.154
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.266.603.120	16.836.969.418
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	247.447.977	163.208.344
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.593.700.000	990.754.632
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9.384.986.940	15.339.034.760
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	864.320.232	603.494.588
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	864.320.232	603.494.588
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	63.107.848.481	48.498.555.226
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	170.996.602.270	23.677.659.937
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	82.634.112.108	23.051.884.461
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	7.000.000.000	1.010.768.040
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	4.750.000.000	758.242.788
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	251.257.120.950	454.479.788.507
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.838.179.950	19.648.083.009

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	42.157.941.000	26.455.837.080
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	186.261.000.000	408.375.868.418
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	33.499.595.086	32.498.517.374
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.271.275.875	16.816.619.008
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	718.700.000	275.064.140
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	302.500.000	49.999.800
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	261.161.029	118.552.496
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3.294.984.944	3.962.539.110
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.216.611.176	327.995.940
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.070.000.000	10.947.746.880
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.397.551.226	19.651.527.160
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.739.336.726	17.010.034.968
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	350.000.000	319.549.344
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	580.000.000	566.255.792
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.600.000.000	840.609.616
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	713.214.500	818.049.344
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	415.000.000	97.028.096

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100.431.400.000	25.141.076.403
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	10.871.400.000	3.471.199.600
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	86.560.000.000	21.169.876.803
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.000.000.000	500.000.000
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	827.369.000	773.511.440
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	827.369.000	773.511.440
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	618.450.000	1.154.914.696
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	618.450.000	1.154.914.696
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	670.704.220.785	600.935.842.574
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	241.481.502.948	55.481.074.350
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	41.415.177.822	70.158.487.248
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	18.666.575.328	884.750.200
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.629.053.660	117.634.800
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	6.222.113.570	902.713.036
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.376.021.023	2.000.000.000
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	541.695.257.241	469.391.182.940
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	717.052.284
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	717.052.284

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	570.198.832
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0	570.198.832
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	346.691.944.176	209.034.882.783
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	39.708.415.886	28.065.115.361
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.486.530.000	23.748.122.173
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.769.937.866	178.952.896
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.417.457.078	700.822.396
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.616.659.621	234.998.800
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000	42.101.400
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.401.505.586	3.160.117.696
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	28.945.000.000	15.151.817.368
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.000.000.000	13.159.074.684
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.325.000.000	602.476.980
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	7.910.000.000	555.588.532
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	750.000.000	264.380.192
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.960.000.000	570.296.980
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	140.720.630.883	92.650.653.662

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	290.916.817.668	51.606.575.294
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	136.250.444.007	27.051.417.008
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.358.628.723	1.319.824.232
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	12.430.964.998	8.026.603.524
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.935.700.575	4.307.471.268
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.064.800.000	338.762.336
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	100.359.233.591	41.896.350.384
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	353.435.948.946	41.636.181.140
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	24.534.867.000	122.507.596
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	981.646.600	137.661.648
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.268.447.992	1.036.141.800
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0	8.000.000
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	668.447.992	8.000.000
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	600.000.000	1.020.141.800
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	24.303.215.824	21.596.630.840
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.129.600.000	20.365.104.564

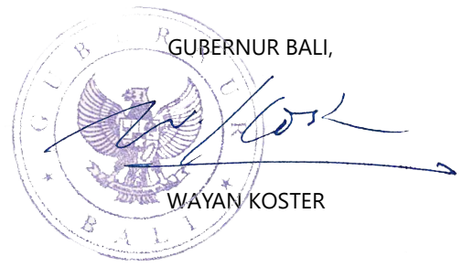
Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	506.916.022	263.962.088
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	93.500.000	111.485.500
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	275.000.000	14.629.700
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.000.000.000	793.063.540
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	186.999.802	48.385.448
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	33.451.800.000	8.578.014.368
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.064.800.000	250.284.596
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	22.400.000.000	8.056.153.372
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	187.000.000	271.576.400
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	60.159.000
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0	60.159.000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	660.072.830.949	474.284.065.599
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	433.939.830.949	229.081.014.264
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.405.335.790.178	162.716.541.716
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	695.693.020	967.599.996
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.850.000.000	1.790.033.828
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.500.000.000	46.154.077.136
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5.494.631.385	4.321.980.588
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.162.524.452	629.076.000

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7.862.011.630	12.426.645.000
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	485.672.099	75.060.000
4	02		SEKRETARIAT DPRD	226.133.000.000	245.203.051.335
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	88.436.574.023
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	127.630.000.000	156.766.477.312
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.993.007.712.129	2.074.345.552.740
5	01		PERENCANAAN	31.755.226.743	28.078.374.619
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.207.027.134	20.526.319.911
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.586.908.871	5.125.180.372
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.961.290.738	2.426.874.336
5	02		KEUANGAN	1.916.408.304.417	1.961.871.143.352
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.892.803.168.660	173.671.042.100
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.700.116.732.880	1.766.426.176.232
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	13.070.000.000	3.845.994.488
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	204.762.546.710	17.927.930.532
5	03		KEPEGAWAIAN	0	48.958.880.999
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	36.147.294.471

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	12.811.586.528
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	877.977.592
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	877.977.592
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	34.984.802.497	25.859.700.589
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.284.802.497	13.972.055.089
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.700.000.000	11.887.645.500
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.859.378.472	8.699.475.589
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.959.378.472	5.627.610.409
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.900.000.000	3.071.865.180
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	36.621.407.234	43.485.039.356
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	36.621.407.234	43.485.039.356
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.845.325.000	33.905.411.942
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.450.681.836	5.999.442.988
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.325.400.398	3.580.184.426
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	35.035.784.610	36.506.475.368
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.035.784.610	36.506.475.368
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.880.886.446	10.899.519.592
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.212.154.896	720.152.896

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	14.542.743.268	16.848.269.544
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.400.000.000	7.323.441.144
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.000.000.000	715.092.192

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DENGAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA DENGAN RANCANGAN APBD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.075.197.102.121	1.075.197.102.121	1.854.443.246.643
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.057.927.502.668	1.057.927.502.668	1.829.302.170.240
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.057.927.502.668	1.057.927.502.668	1.829.302.170.240
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	725.993.158.511	725.993.158.511	1.081.090.938.142
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.561.300	130.561.300	130.561.300
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.469.400	88.469.400	88.469.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.091.900	42.091.900	42.091.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	709.740.644.465	709.740.644.465	1.058.013.831.398
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	709.634.029.165	709.634.029.165	1.057.907.216.098
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.252.800	22.252.800	22.252.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	84.362.500	84.362.500	84.362.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.100.000	52.100.000	52.100.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	52.100.000	52.100.000	52.100.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.975.000	50.975.000	50.975.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.975.000	50.975.000	50.975.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.290.501.650	2.290.501.650	3.370.462.350
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.625.492.600	1.625.492.600	2.707.878.300
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.603.700	10.603.700	8.384.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.386.100	76.386.100	33.091.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250	31.526.250	31.526.250
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.493.000	546.493.000	589.582.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.320.582.230	2.320.582.230	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.320.582.230	2.320.582.230	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.897.946.466	8.897.946.466	10.793.473.714
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	716.785.650	716.785.650	716.785.650
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.181.160.816	8.181.160.816	10.076.688.064
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.509.847.400	2.509.847.400	8.679.534.380
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	812.667.400	812.667.400	916.028.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.990.000	12.990.000	14.410.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.246.000.000	1.246.000.000	7.160.906.180
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433.190.000	433.190.000	583.189.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	331.583.216.957	331.583.216.957	747.862.862.298
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	190.995.123.537	190.995.123.537	390.336.230.286
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	107.217.999.700	107.217.999.700	116.516.686.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	6.195.759.700	6.195.759.700	11.921.124.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	668.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	0	0	558.578.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	0	0	1.117.156.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	0	0	334.906.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	2.632.733.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0	0	6.851.357.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	365.255.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0	0	614.200.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0	0	614.200.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	0	0	381.582.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	497.892.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	1.528.580.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	1.782.000.000	1.782.000.000	1.942.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.176.587.675	2.176.587.675	2.121.899.750
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.229.998.800	2.229.998.800	6.104.998.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	8.451.750.000	8.451.750.000	8.339.250.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	564.999.500	564.999.500	554.737.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	114.947.800	114.947.800	114.824.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.034.980.450	1.034.980.450	1.077.887.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	56.497.421.012	56.497.421.012	53.236.970.036
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	310.000.000	310.000.000	292.540.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	3.305.790.000	3.305.790.000	410.816.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0	0	170.437.760.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	22.204.600	22.204.600	42.994.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	129.735.000	129.735.000	129.726.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	58	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	283.850.800	283.850.800	281.928.100
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	59	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	287.107.100	287.107.100	281.828.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	39.991.400	39.991.400	39.883.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	350.000.000	323.932.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	129.374.991.164	129.374.991.164	322.913.766.656
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	55.000.000.000	55.000.000.000	54.752.103.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.540.000.000	5.540.000.000	5.533.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0	0	8.391.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	665.000.000	665.000.000	1.105.808.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	625.000.000	625.000.000	3.090.716.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	225.000.000	225.000.000	225.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	1.565.400.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	1.350.000.000	1.350.000.000	2.475.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	13.823.038.600	13.823.038.600	12.740.636.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	12.768.434.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	377.000.000	377.000.000	366.887.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	150.000.000	150.000.000	142.451.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	91.349.100	91.349.100	968.912.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	49.610.810.064	49.610.810.064	46.949.982.256
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	795.000.000	795.000.000	748.663.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	93.149.100	93.149.100	550.682.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	169.551.590.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	118.659.200	118.659.200	118.635.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	51	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	245.747.300	245.747.300	237.391.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	52	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	275.237.800	275.237.800	270.457.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	40.000.000	40.000.000	37.083.100
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	350.000.000	350.000.000	323.932.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.213.102.256	11.213.102.256	34.612.865.356
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	10.126.957.200
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.725.000.000	1.725.000.000	1.733.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.850.000.000	1.850.000.000	2.972.042.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	529.363.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.025.799.800	1.025.799.800	1.031.672.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	241.733.600	241.733.600	239.560.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	287.250.000	287.250.000	512.250.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	139.481.000	139.481.000	123.582.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.000.000	200.000.000	467.217.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.551.968.156	5.551.968.156	5.551.968.156
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	95.988.900	95.988.900	259.215.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0	0	10.981.300.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	19.171.000	19.171.000	16.547.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	56.709.800	56.709.800	50.629.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20.000.000	20.000.000	17.559.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	209.722.900	209.722.900	207.016.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	182.112.300	182.112.300	179.548.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	134.689.500	134.689.500	132.307.900

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	47.422.800	47.422.800	47.240.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.610.600	27.610.600	27.467.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	27.610.600	27.610.600	27.467.700
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.263.900	62.263.900	62.262.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	62.263.900	62.263.900	62.262.900
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	31.763.000	31.763.000	31.762.500
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	30.500.900	30.500.900	30.500.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	79.140.400	79.140.400	79.090.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	79.140.400	79.140.400	79.090.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	79.140.400	79.140.400	79.090.400
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.269.599.453	17.269.599.453	25.141.076.403
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.269.599.453	17.269.599.453	25.141.076.403
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	3.471.199.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	3.471.199.600
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	100.000.000	100.000.000	2.571.199.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	800.000.000	800.000.000	799.999.800
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.019.599.453	16.019.599.453	21.169.876.803
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	9.969.599.453	9.969.599.453	13.019.876.803
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	9.969.599.453	9.969.599.453	13.019.876.803

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	6.050.000.000	6.050.000.000	8.150.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	0	0	0
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	6.050.000.000	6.050.000.000	8.150.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000	250.000.000	500.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000	250.000.000	500.000.000
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	250.000.000	250.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	542.570.920.638	542.570.920.638	651.237.033.614
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	542.570.920.638	542.570.920.638	651.237.033.614
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	542.570.920.638	542.570.920.638	651.237.033.614
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	519.161.185.922	519.161.185.922	573.159.466.824

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.952.800	65.952.800	65.952.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.004.000	44.004.000	44.004.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.948.800	21.948.800	21.948.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.867.772.776	181.867.772.776	229.823.996.834
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	181.816.383.476	181.816.383.476	229.772.607.934
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.389.300	51.389.300	51.388.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.130.582.900	4.130.582.900	4.594.596.348
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.701.154.600	1.701.154.600	1.964.382.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.429.428.300	2.429.428.300	2.630.213.648
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.351.574.000	1.351.574.000	1.351.574.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	103.124.000	103.124.000	103.124.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.248.450.000	1.248.450.000	1.248.450.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.693.130.546	98.693.130.546	99.928.153.842

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.523.110.402	7.523.110.402	7.523.110.402
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.170.020.144	91.170.020.144	92.405.043.440
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.121.172.900	4.121.172.900	4.533.725.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	629.775.000	629.775.000	521.775.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286.968.800	286.968.800	265.500.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	737.833.400	737.833.400	725.560.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.466.595.700	2.466.595.700	3.020.889.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	228.931.000.000	228.931.000.000	232.861.467.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	228.931.000.000	228.931.000.000	232.861.467.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	22.951.792.016	22.951.792.016	74.474.837.290
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.533.500.900	3.533.500.900	41.277.922.894
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	2.000.000.900	2.000.000.900	1.955.822.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	51.500.000	51.500.000	247.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	0	27.611.996.794
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.482.000.000	1.482.000.000	315.459.862
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	11.147.643.638
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19.275.909.316	19.275.909.316	32.447.595.296
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	59.280.000	59.280.000	2.779.162.080
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000	100.000.000	910.780.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	50.000.000	50.000.000	822.475.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	50.000.000	470.062.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37.742.000	37.742.000	37.730.580

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	631.244.900	631.244.900	638.440.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	872.273.836	872.273.836	3.646.584.536
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.339.789.480	17.339.789.480	23.009.387.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	35.579.100	35.579.100	33.701.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	50.000.000	50.000.000	49.270.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	42.768.000	42.768.000	42.768.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	42.768.000	42.768.000	42.768.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	99.613.800	99.613.800	706.551.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	49.640.000	49.640.000	49.636.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	49.973.800	49.973.800	656.915.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	263.442.700	263.442.700	2.021.509.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.497.500	12.497.500	12.494.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.497.500	12.497.500	12.494.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	250.945.200	250.945.200	2.009.015.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	201.142.400	201.142.400	1.871.629.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	49.802.800	49.802.800	137.385.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100.000.000	100.000.000	728.589.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	50.000.000	50.000.000	324.497.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	50.000.000	50.000.000	324.497.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	50.000.000	50.000.000	404.091.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	50.000.000	50.000.000	404.091.400

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	94.500.000	94.500.000	852.631.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	603.785.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	0	603.785.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	94.500.000	94.500.000	248.846.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	94.500.000	94.500.000	248.846.000
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	383.857.474.011	383.857.474.011	838.140.637.301
1.03.1.04.2.10.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	383.546.201.811	383.546.201.811	837.829.365.101
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	381.382.897.947	381.382.897.947	835.668.611.237
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.166.751.634	33.166.751.634	35.595.599.511
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	836.553.366	836.553.366	836.553.366
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	448.699.780	448.699.780	448.699.780
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.853.586	387.853.586	387.853.586
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.376.948.636	25.376.948.636	27.811.918.513
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.376.948.636	25.376.948.636	27.811.918.513
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	865.479.930	865.479.930	849.741.930

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.176.800	36.176.800	36.176.800
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.897.230	87.897.230	63.159.230
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000	90.000.000	90.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.125.900	90.125.900	90.125.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	37.520.000	37.520.000	37.520.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.500.000	46.500.000	55.500.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	477.260.000	477.260.000	477.260.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	687.464.100	687.464.100	682.364.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	687.464.100	687.464.100	682.364.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.168.448	1.152.168.448	1.152.166.448
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.092.000	4.092.000	4.090.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.850.000	549.850.000	549.850.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.226.448	398.226.448	398.226.448
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.248.137.154	4.248.137.154	4.262.855.154
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.930.000.988	1.930.000.988	1.945.228.988
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.808.452	317.808.452	317.808.452
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.327.714	2.000.327.714	1.999.817.714
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.699.057.156	8.699.057.156	29.950.739.156
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.371.768.736	4.371.768.736	4.370.238.736
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.019.602.236	1.019.602.236	1.018.072.236
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	3.113.542.300	3.113.542.300	3.113.542.300
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	238.624.200	238.624.200	238.624.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.327.288.420	4.327.288.420	25.580.500.420

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	904.081.936	904.081.936	1.914.769.936
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	308.400.688	308.400.688	20.551.944.688
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.114.805.796	3.114.805.796	3.113.785.796
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	31.840.746.668	31.840.746.668	41.474.726.668
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	31.840.746.668	31.840.746.668	41.474.726.668
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.498.519.732	1.498.519.732	2.272.499.732
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	185.432.900	185.432.900	535.432.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	754.682.600	754.682.600	9.264.682.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.141.218.100	1.141.218.100	1.141.218.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	28.260.893.336	28.260.893.336	28.260.893.336
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.712.406.900	7.712.406.900	11.686.241.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	7.712.406.900	7.712.406.900	11.686.241.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	107.522.100	107.522.100	307.012.100

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	1.042.332.600
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	0	0	232.012.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	7.604.884.800	7.604.884.800	10.104.884.800
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	268.434.974.400	268.434.974.400	458.050.968.263
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	268.434.974.400	268.434.974.400	458.050.968.263
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.102.331.100	3.102.331.100	1.178.251.100
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	7.517.093.300	7.517.093.300	3.743.783.300
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	257.815.550.000	257.815.550.000	453.128.933.863
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	23.937.751.081	23.937.751.081	251.321.165.931
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	23.937.751.081	23.937.751.081	251.321.165.931
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	681.964.200	681.964.200	1.706.964.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.303.414.000	1.303.414.000	1.728.414.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	0	0	65.300.139.850
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	519.859.432	519.859.432	85.860.253.672
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	0	0	68.987.253.391
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.482.579.026	17.482.579.026	19.781.835.767
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	3.655.712.183	3.655.712.183	3.642.452.183
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	294.222.240	294.222.240	4.313.852.868
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.341.681.148	5.341.681.148	5.341.171.148
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	924.324.840	924.324.840
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	924.324.840	924.324.840	924.324.840
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	737.821.880	737.821.880	737.311.880
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	737.821.880	737.821.880	737.311.880
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	3.679.534.428	3.679.534.428	3.679.534.428
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3.679.534.428	3.679.534.428	3.679.534.428
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.249.528.960	2.249.528.960	2.247.998.960
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	864.815.332	864.815.332	863.795.332
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	864.815.332	864.815.332	863.795.332
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	611.417.740	611.417.740	610.907.740

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	611.417.740	611.417.740	610.907.740
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	773.295.888	773.295.888	773.295.888
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	577.499.492	577.499.492	577.499.492
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	195.796.396	195.796.396	195.796.396
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.163.303.864	2.163.303.864	2.160.753.864
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	859.469.776	859.469.776	777.939.776
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	436.212.688	436.212.688	355.192.688
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	27.533.700	27.533.700	27.533.700
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	408.678.988	408.678.988	327.658.988
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	423.257.088	423.257.088	422.747.088
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	423.257.088	423.257.088	422.747.088
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.303.834.088	1.303.834.088	1.382.814.088
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.303.834.088	1.303.834.088	1.382.814.088
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	223.115.100	223.115.100	302.095.100

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.062.492.088	1.062.492.088	1.062.492.088
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	18.226.900	18.226.900	18.226.900
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	311.272.200	311.272.200	311.272.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	311.272.200	311.272.200	311.272.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	311.272.200	311.272.200	311.272.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	311.272.200	311.272.200	311.272.200
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	0	0	0
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	311.272.200	311.272.200	311.272.200
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	43.117.901.899	43.117.901.899	44.839.275.749
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	43.117.901.899	43.117.901.899	44.839.275.749
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	43.117.901.899	43.117.901.899	44.839.275.749
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.266.933.755	22.266.933.755	23.474.966.869
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	17.000.000	17.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	14.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.199.501.743	19.199.501.743	20.433.726.487
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.199.501.743	19.199.501.743	20.433.726.487
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.978.140	366.978.140	357.786.510
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.378.140	29.378.140	37.043.310
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.857.000	188.857.000	180.364.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.400.000	60.400.000	60.400.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.948.000	33.948.000	25.584.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.395.000	54.395.000	54.395.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.473.824	1.088.473.824	1.088.473.824
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	2.970.000	2.970.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142.000.000	142.000.000	142.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.310.000	56.310.000	56.310.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	887.193.824	887.193.824	887.193.824

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.594.980.048	1.594.980.048	1.577.980.048
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.379.980.048	1.379.980.048	1.379.980.048
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000	215.000.000	198.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.850.968.144	20.850.968.144	21.364.308.880
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	20.550.049.548	20.550.049.548	20.812.245.084
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.434.983.272	3.434.983.272	3.697.318.408
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	206.475.500	206.475.500	206.475.300
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37.476.448	37.476.448	37.476.448

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	37.476.448	37.476.448	37.476.448
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37.476.448	37.476.448	37.476.448
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.796.161.432	16.796.161.432	16.796.022.032
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	168.518.596	168.518.596	419.663.796
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0	0	0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	168.518.596	168.518.596	419.663.796
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	132.400.000	132.400.000	132.400.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	132.400.000	132.400.000	132.400.000
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.702.291.764	19.702.291.764	24.954.833.546
1.05.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.702.291.764	19.702.291.764	24.954.833.546

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.702.291.764	19.702.291.764	24.954.833.546
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.701.910.564	17.701.910.564	21.939.618.586
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.790.700	4.790.700	29.680.700
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.554.700	2.554.700	2.554.700
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.236.000	2.236.000	27.126.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.890.422.298	11.890.422.298	13.330.947.180
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.890.422.298	11.890.422.298	13.330.947.180
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.338.400	103.338.400	112.972.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.118.700	12.118.700	21.983.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.169.400	14.169.400	13.939.100
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.050.300	2.050.300	2.050.300
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.760.000	13.760.000	734.638.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.760.000	13.760.000	734.638.600

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.829.882	689.829.882	1.126.048.382
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.000.750	334.000.750	334.000.750
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.829.132	355.829.132	792.047.632
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.999.769.284	4.999.769.284	6.605.331.124
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.934.114.284	4.934.114.284	6.335.111.124
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.655.000	65.655.000	270.220.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.000.381.200	2.000.381.200	3.015.214.960
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	426.624.000	426.624.000	458.734.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	426.624.000	426.624.000	458.734.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	525.393.200	525.393.200	782.616.960
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	525.393.200	525.393.200	782.616.960

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.048.364.000	1.048.364.000	1.773.864.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.020.000.000	1.020.000.000	1.745.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	28.364.000	28.364.000	28.364.000
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	30.211.059.576	30.211.059.576	36.062.247.721
1.06.2.08.0.00.06.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.028.448.984	29.028.448.984	33.755.847.529
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	29.028.448.984	29.028.448.984	33.755.847.529

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.821.761.816	23.821.761.816	28.600.869.661
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.080.400	27.080.400	27.315.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.355.400	18.355.400	18.591.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.603.000	3.603.000	3.603.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.122.000	5.122.000	5.121.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.038.988.214	18.038.988.214	19.501.001.824
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.038.988.214	18.038.988.214	19.501.001.824
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.470.198	396.470.198	463.899.098
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.827.900	19.827.900	19.500.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.653.198	49.653.198	112.779.198
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	260.925.000	260.925.000	260.925.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.082.100	9.082.100	8.287.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.555.000	3.555.000	3.660.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.427.000	53.427.000	58.747.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.500.000	27.500.000	27.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.847.840	599.847.840	590.704.840
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.243.000	1.243.000	500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	389.500.000	389.500.000	381.100.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.104.840	209.104.840	209.104.840
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.731.875.164	4.731.875.164	7.990.447.999
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.271.816.712	1.271.816.712	1.281.316.912
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.107.166.720	1.107.166.720	4.351.364.555
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.352.891.732	2.352.891.732	2.357.766.532
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	42.149.700	42.149.700	42.141.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.530.000	3.530.000	3.530.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.530.000	3.530.000	3.530.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	38.619.700	38.619.700	38.611.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	38.619.700	38.619.700	38.611.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.777.630.668	4.777.630.668	4.726.120.168
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	56.624.400	56.624.400	56.624.300
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	28.959.700	28.959.700	28.699.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	27.664.700	27.664.700	27.924.600
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	1.358.225.668	1.358.225.668	1.307.314.568
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	613.986.000	613.986.000	583.986.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	77.250.000	77.250.000	89.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	20.000.000	20.000.000	10.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.250.000	236.250.000	272.950.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	57.124.000	57.124.000	47.914.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	260.340.668	260.340.668	208.840.668
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.480.000	17.480.000	17.480.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	35.795.000	35.795.000	36.393.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	971.133.000	971.133.000	970.534.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	465.000.000	465.000.000	465.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	109.798.800	109.798.800	109.798.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	192.600.000	192.600.000	192.001.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	143.734.200	143.734.200	143.734.200
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	2.384.398.100	2.384.398.100	2.384.397.800

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	2.384.398.100	2.384.398.100	2.384.397.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.249.500	7.249.500	7.249.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	7.249.500	7.249.500	7.249.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.805.200	3.805.200	3.614.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.805.200	3.805.200	3.614.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.805.200	3.805.200	3.614.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	255.937.800	255.937.800	255.937.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	255.937.800	255.937.800	255.937.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	255.937.800	255.937.800	255.937.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	127.163.800	127.163.800	127.163.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.800	127.163.800	127.163.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	127.163.800	127.163.800	127.163.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.182.610.592	1.182.610.592	2.306.400.192
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.182.610.592	1.182.610.592	2.306.400.192
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	511.578.992	511.578.992	513.469.992

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.338.200	2.338.200	2.338.200
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.537.400	1.537.400	1.537.400
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	800.800	800.800	800.800
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504.240.792	504.240.792	506.131.792
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.537.096	114.537.096	118.938.696
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.767.648	38.767.648	38.767.648
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.936.048	350.936.048	348.425.448
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11.100.100	11.100.100	739.892.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	11.100.100	11.100.100	739.892.500
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	11.100.100	11.100.100	439.973.600

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	0	0	299.918.900
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	6.831.000	6.831.000	316.190.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	93.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0	0	93.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.831.000	6.831.000	222.440.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6.831.000	6.831.000	4.940.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	0	217.500.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	0	20.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0	0	20.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	20.000.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	653.100.500	653.100.500	653.097.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.100.500	653.100.500	653.097.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	653.100.500	653.100.500	653.097.700
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	0	63.750.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	63.750.000
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	0	63.750.000
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	29.914.410.352	29.914.410.352	35.468.363.296
2.07.3.29.3.32.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	29.875.268.552	29.875.268.552	34.372.062.496
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	29.875.268.552	29.875.268.552	34.372.062.496
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29.383.362.350	29.383.362.350	32.882.998.694
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.692.568.174	24.692.568.174	28.148.776.822
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.692.568.174	24.692.568.174	28.148.776.822
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.355.100	471.355.100	351.462.200
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.162.200	22.162.200	22.162.200
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.884.500	194.884.500	90.649.600

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.450.000	91.450.000	91.450.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.271.400	55.271.400	37.513.400
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.945.000	3.945.000	3.945.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.442.000	99.442.000	101.542.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73.751.000	73.751.000	73.751.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.751.000	73.751.000	73.751.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.484.089.120	1.484.089.120	1.480.767.320
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000	2.750.000	2.740.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	612.600.000	612.600.000	612.600.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868.739.120	868.739.120	865.427.320
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.661.598.956	2.661.598.956	2.828.241.352
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.122.542.720	1.122.542.720	1.122.542.720

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	307.712.392	307.712.392	294.712.392
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.231.343.844	1.231.343.844	1.410.986.240
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	150.148.100	150.148.100	1.109.025.700
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	125.150.500	1.078.028.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	125.150.500	125.150.500	1.078.028.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	24.997.600	24.997.600	30.997.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	24.997.600	24.997.600	30.997.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	176.010.100	176.010.100	176.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	173.010.100	173.010.100	173.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	173.010.100	173.010.100	173.010.100
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	16.220.100	16.220.100	54.500.100

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	6.747.500	6.747.500
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	6.747.500	6.747.500	6.747.500
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	9.472.600	9.472.600	47.752.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	6.911.600	6.911.600	45.191.600
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	2.561.000	2.561.000	2.561.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	149.527.902	149.527.902	149.527.902
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	149.527.902	149.527.902	149.527.902
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	11.279.900	11.279.900	11.279.900
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	138.248.002	138.248.002	138.248.002
2.07.3.29.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.141.800	39.141.800	1.096.300.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	36.141.800	36.141.800	1.036.141.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000	8.000.000	8.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	20.141.800	20.141.800	1.020.141.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	0	0	0
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	20.141.800	20.141.800	1.020.141.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	20.141.800	20.141.800	1.020.141.800
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3.000.000	3.000.000	60.159.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.000.000	3.000.000	60.159.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.000.000	3.000.000	60.159.000
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	3.000.000	3.000.000	60.159.000
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.685.591.627	24.685.591.627	34.260.330.730

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.685.591.627	24.685.591.627	34.260.330.730
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	326.868.988	326.868.988	326.868.988
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	186.673.244	186.673.244	186.673.244
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	186.673.244	186.673.244	186.673.244
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	186.673.244	186.673.244	186.673.244
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	140.195.744	140.195.744	140.195.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	140.195.744	140.195.744	140.195.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	140.195.744	140.195.744	140.195.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.755.227.303	23.755.227.303	33.329.967.154
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.262.110.811	13.262.110.811	16.836.969.418
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	268.836.044	268.836.044	271.383.044
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.188.300	14.188.300	14.188.300
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254.647.744	254.647.744	257.194.744
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.796.284.763	10.796.284.763	14.367.342.508
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.661.270.519	10.661.270.519	14.236.963.864
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135.014.244	135.014.244	130.378.644
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.865.100	232.865.100	282.718.962

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.481.500	5.481.500	5.481.500
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.319.900	89.319.900	101.657.762
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.500.000	75.500.000	75.500.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.648.700	5.648.700	5.648.700
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.575.000	7.575.000	12.255.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.140.000	45.140.000	77.976.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.340.000	7.340.000	7.340.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.340.000	7.340.000	7.340.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.385.176	611.385.176	616.785.176
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	132.000.000	137.400.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.385.176	479.385.176	479.385.176

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.345.399.728	1.345.399.728	1.291.399.728
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.306.799.728	1.306.799.728	1.252.799.728
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.600.000	38.600.000	38.600.000
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	125.732.196	125.732.196	163.208.344
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	125.732.196	125.732.196	163.208.344
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	125.732.196	125.732.196	163.208.344
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	953.309.784	953.309.784	990.754.632
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	953.309.784	953.309.784	990.754.632
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	513.318.792	513.318.792	513.318.792
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	439.990.992	439.990.992	477.435.840
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9.414.074.512	9.414.074.512	15.339.034.760
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.414.074.512	9.414.074.512	15.339.034.760
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	247.835.892	247.835.892	247.835.892
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	877.999.492	877.999.492	877.999.292
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	583.427.544	583.427.544	583.427.544
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7.704.811.584	7.704.811.584	13.629.772.032
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	603.495.336	603.495.336	603.494.588
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	603.495.336	603.495.336	603.494.588

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.495.336	603.495.336	603.494.588
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	603.495.336	603.495.336	603.494.588
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	34.714.270.811	34.714.270.811	48.498.555.226
2.15.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34.714.270.811	34.714.270.811	48.498.555.226
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	34.714.270.811	34.714.270.811	48.498.555.226
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.362.838.788	23.362.838.788	23.677.659.937
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.012.300	85.012.300	58.463.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.452.200	35.452.200	26.265.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.061.000	12.061.000	9.631.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.499.800	4.499.800	2.162.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.499.700	7.499.700	3.709.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.699.800	3.699.800	1.776.800

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.799.900	6.799.900	5.276.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.900	14.999.900	9.642.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.740.236.000	17.740.236.000	17.805.735.001
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.710.236.000	17.710.236.000	17.778.679.801
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.000.000	30.000.000	27.055.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.393.272.080	1.393.272.080	1.482.840.380
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.883.000	6.883.000	6.883.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	486.223.100	486.223.100	563.653.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.278.100	138.278.100	138.277.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.688.600	7.688.600	7.688.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000	23.000.000	23.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.199.280	731.199.280	743.337.280
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	922.573.100	922.573.100	896.360.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	685.500.000	685.500.000	635.500.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	194.243.000	194.243.000	220.647.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.830.100	42.830.100	40.213.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.290.128	726.290.128	725.740.128
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.250.000	8.250.000	7.700.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.360.000	250.360.000	250.360.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.680.128	467.680.128	467.680.128
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.495.455.180	2.495.455.180	2.708.519.728
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.542.396	224.542.396	213.413.096
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.149.394.480	1.149.394.480	1.332.101.880
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.750.000	81.750.000	85.760.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.039.768.304	1.039.768.304	1.077.244.752
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.582.255.995	9.582.255.995	23.051.884.461
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.780.200.639	1.780.200.639	1.780.669.897
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.083.707.782	1.083.707.782	1.083.409.142
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	696.492.857	696.492.857	697.260.755
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.701.418.988	2.701.418.988	2.441.762.188
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	662.311.584	662.311.584	662.311.584

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	700.000.000	700.000.000	694.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1.235.076.704	1.235.076.704	981.698.404
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	104.030.700	104.030.700	103.752.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	38.815.400	38.815.400	38.598.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	19.243.500	19.243.500	19.127.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	19.571.900	19.571.900	19.470.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	852.812.728	852.812.728	833.990.728
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	852.812.728	852.812.728	833.990.728
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.959.999.540	3.959.999.540	17.709.770.648
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.959.999.540	3.959.999.540	17.709.770.648
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	57.946.900	57.946.900	56.207.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	57.946.900	57.946.900	56.207.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	191.061.800	191.061.800	190.885.700

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	191.061.800	191.061.800	190.885.700
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.010.798.040	1.010.798.040	1.010.768.040
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.718.040	1.000.718.040	1.000.688.040
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1.000.718.040	1.000.718.040	1.000.688.040
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	10.080.000	10.080.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10.080.000	10.080.000	10.080.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	758.377.988	758.377.988	758.242.788
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	758.377.988	758.377.988	758.242.788
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	758.377.988	758.377.988	758.242.788
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	390.430.509.865	390.430.509.865	456.408.214.643
2.16.2.20.2.21.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	390.430.509.865	390.430.509.865	456.408.214.643
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	388.595.327.281	388.595.327.281	454.479.788.507
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.838.243.312	18.838.243.312	19.648.083.009

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.138.800	50.138.800	29.990.400
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.939.400	23.939.400	18.384.200
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.572.400	15.572.400	5.437.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.627.000	10.627.000	6.168.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.905.527.364	13.905.527.364	14.782.929.713
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.051.317.964	13.051.317.964	13.429.264.313
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	854.209.400	854.209.400	1.353.665.400
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	658.173.900	658.173.900	604.124.400
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.244.600	5.244.600	5.244.600
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.553.000	315.553.000	254.892.500
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	87.500.000	87.500.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.161.300	25.161.300	22.247.300
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.900.000	39.900.000	39.900.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.815.000	184.815.000	194.340.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.825.400	208.825.400	85.410.800
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	104.180.000	104.180.000	28.160.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.645.400	104.645.400	57.250.800
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.865.000	420.865.000	486.989.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.355.000	3.355.000	3.355.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	282.000.000	282.000.000	348.634.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.510.000	135.510.000	135.000.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.594.712.848	3.594.712.848	3.658.638.696
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.895.944.272	1.895.944.272	1.848.366.568
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	7.120.000	7.120.000	7.120.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.890.000	172.890.000	172.890.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.406.628.576	1.406.628.576	1.519.152.128
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.130.000	112.130.000	111.110.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	23.844.967.536	23.844.967.536	26.455.837.080

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	23.844.967.536	23.844.967.536	26.455.837.080
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2.101.515.388	2.101.515.388	2.137.971.336
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12.547.640.140	12.547.640.140	12.547.640.140
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	2.068.356.688	2.068.356.688	4.568.356.588
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	3.341.774.928	3.341.774.928	3.341.745.728
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.085.684.092	2.085.684.092	2.160.636.988
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.699.996.300	1.699.996.300	1.699.486.300
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	345.912.116.433	345.912.116.433	408.375.868.418
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	345.912.116.433	345.912.116.433	408.375.868.418
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	326.653.749.468	326.653.749.468	381.256.875.549
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	9.413.234.869	9.413.234.869	15.848.234.821
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	9.845.132.096	9.845.132.096	11.270.758.048
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	810.988.888	810.988.888	773.511.440
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	810.988.888	810.988.888	773.511.440
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	810.988.888	810.988.888	773.511.440
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	308.349.396	308.349.396	270.872.848

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	275.848.996	275.848.996	275.848.396
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	226.790.496	226.790.496	226.790.196
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.024.193.696	1.024.193.696	1.154.914.696
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.024.193.696	1.024.193.696	1.154.914.696
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	518.467.848	518.467.848	670.323.048
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	333.949.448	333.949.448	338.188.048
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	184.518.400	184.518.400	332.135.000
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	505.725.848	505.725.848	484.591.648
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	505.725.848	505.725.848	484.591.648
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.891.871.992	27.891.871.992	32.498.517.374
2.17.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.891.871.992	27.891.871.992	32.498.517.374
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	27.891.871.992	27.891.871.992	32.498.517.374
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.365.397.440	16.365.397.440	16.816.619.008

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.172.896	86.172.896	86.172.896
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.809.396	80.809.396	80.809.396
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.363.500	5.363.500	5.363.500
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.371.905.680	13.371.905.680	13.823.127.248
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.371.905.680	13.371.905.680	13.823.127.248
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.568.000	288.568.000	256.354.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.665.500	10.665.500	10.665.500
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.237.800	54.237.800	47.024.600
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	105.000.000	80.000.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.187.700	13.187.700	13.187.700
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.977.000	100.977.000	100.977.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.950.800	56.950.800	56.950.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.950.800	56.950.800	56.950.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.449.474.492	1.449.474.492	1.449.474.492

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.992.000	2.992.000	2.992.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.700.000	319.700.000	319.700.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.782.492	1.126.782.492	1.126.782.492
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.112.325.572	1.112.325.572	1.144.538.772
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	813.030.384	813.030.384	845.243.584
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.850.000	52.850.000	52.850.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.445.188	246.445.188	246.445.188
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	275.064.140	275.064.140	275.064.140
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	27.956.000	27.956.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.956.000	27.956.000	27.956.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	247.108.140	247.108.140
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	247.108.140	247.108.140	247.108.140

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	49.999.800	49.999.800	49.999.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19.999.800	19.999.800	19.999.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	19.999.800	19.999.800	19.999.800
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	118.552.496	118.552.496	118.552.496
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.496	118.552.496	118.552.496
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	118.552.496	118.552.496	118.552.496

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	114.947.296	114.947.296	3.962.539.110
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	114.947.296	114.947.296	3.962.539.110
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	114.947.296	114.947.296	3.962.539.110
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	327.995.940	327.995.940	327.995.940
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	327.995.940	327.995.940	327.995.940
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	204.997.544	204.997.544	204.997.544
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	122.998.396	122.998.396	122.998.396
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.639.914.880	10.639.914.880	10.947.746.880
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	0	0
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	10.639.914.880	10.639.914.880	10.947.746.880
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	10.639.914.880	10.639.914.880	10.947.746.880
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.750.572.678	18.750.572.678	19.651.527.160
2.18.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.750.572.678	18.750.572.678	19.651.527.160
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	18.750.572.678	18.750.572.678	19.651.527.160
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.608.567.830	16.608.567.830	17.010.034.968
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.600.174.934	13.600.174.934	13.558.209.816
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.600.174.934	13.600.174.934	13.558.209.816
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.803.400	227.803.400	586.880.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.993.200	14.993.200	21.048.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.926.400	71.926.400	49.424.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.700.000	62.700.000	76.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.406.800	15.406.800	23.005.800
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.777.000	62.777.000	417.402.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	428.911.400	428.911.400	609.410.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	428.911.400	428.911.400	609.410.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.416.201.856	1.416.201.856	1.380.052.512
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.520.000	3.520.000	4.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.000.000	178.000.000	178.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.234.681.856	1.234.681.856	1.198.052.512
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.476.240	935.476.240	875.482.240
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	897.698.840	897.698.840	831.482.240
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.777.400	37.777.400	44.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	272.472.996	272.472.996	319.549.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	82.354.996	82.354.996	112.429.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	82.354.996	82.354.996	112.429.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	190.118.000	190.118.000	207.120.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	190.118.000	190.118.000	207.120.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	317.952.896	317.952.896	566.255.792
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	317.952.896	317.952.896	566.255.792
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	146.750.000	146.750.000	122.320.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	171.202.896	171.202.896	443.935.792
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.183.373.268	1.183.373.268	840.609.616
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.183.373.268	1.183.373.268	840.609.616
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.024.669.972	1.024.669.972	670.770.272
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	158.703.296	158.703.296	169.839.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	167.252.792	167.252.792	818.049.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	167.252.792	167.252.792	818.049.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.252.792	167.252.792	121.549.344
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	559.091.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	137.409.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	200.952.896	200.952.896	97.028.096
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	200.952.896	200.952.896	97.028.096

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	200.952.896	200.952.896	97.028.096
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	98.797.021.445	98.797.021.445	116.047.565.671
2.22.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	98.797.021.445	98.797.021.445	116.047.565.671
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	98.797.021.445	98.797.021.445	116.047.565.671
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.020.886.117	37.020.886.117	39.983.980.387
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.182.946	185.182.946	170.397.746
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	159.869.096	159.869.096	150.908.596
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.313.850	25.313.850	19.489.150
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.397.163.647	21.397.163.647	23.085.567.129
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.944.922.719	20.944.922.719	22.595.849.753
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	442.240.928	442.240.928	479.717.376
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.636.860.340	1.636.860.340	1.736.555.640
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	366.619.340	366.619.340	366.619.340
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	574.206.200	574.206.200	570.295.900
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.500.000	305.500.000	312.500.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.811.900	67.811.900	66.118.500
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.985.900	43.985.900	43.985.900

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.737.000	263.737.000	362.036.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.218.400	302.218.400	302.218.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.858.400	49.858.400	49.858.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.360.000	252.360.000	252.360.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.788.667.912	7.788.667.912	7.813.619.712
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.978.000	15.978.000	14.893.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.952.850.000	1.952.850.000	1.952.850.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	665.402.500	665.402.500	658.360.500
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.154.437.412	5.154.437.412	5.187.516.212
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.710.792.872	5.710.792.872	6.875.621.760
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.241.188.688	1.241.188.688	1.579.872.888
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	368.015.000	368.015.000	367.945.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.101.589.184	4.101.589.184	4.927.803.872
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	59.311.058.972	59.311.058.972	70.158.487.248
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.609.063.792	32.609.063.792	33.842.686.392

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	4.887.414.288	4.887.414.288	4.719.707.688
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	27.721.649.504	27.721.649.504	29.122.978.704
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	17.569.999.600	17.569.999.600	17.976.319.276
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	16.000.000.000	16.000.000.000	16.229.823.136
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.569.999.600	1.569.999.600	1.746.496.140
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.131.995.580	9.131.995.580	18.339.481.580
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	9.131.995.580	9.131.995.580	18.339.481.580
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.360.448.416	1.360.448.416	884.750.200
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.360.448.416	1.360.448.416	884.750.200
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	510.000.000	510.000.000	496.429.600
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	850.448.416	850.448.416	388.320.600
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	135.815.800	135.815.800	117.634.800
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	135.815.800	135.815.800	117.634.800
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	135.815.800	135.815.800	117.634.800

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	968.812.140	968.812.140	902.713.036
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	487.382.240	487.382.240	423.452.840
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	487.382.240	487.382.240	423.452.840
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	481.429.900	481.429.900	479.260.196
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	200.000.000	200.000.000	247.008.696
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	150.000.000	150.000.000	121.038.400
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	131.429.900	131.429.900	111.213.100
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	0	4.000.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	0	0	4.000.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	0	0	1.287.424.600
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0	0	2.102.670.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0	0	609.905.400
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	482.458.724.083	482.458.724.083	484.888.276.903
2.22.0.00.0.00.05.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	482.458.724.083	482.458.724.083	484.888.276.903
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	482.458.724.083	482.458.724.083	484.888.276.903
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.737.789.843	15.737.789.843	15.497.093.963
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.224.800	23.224.800	23.224.800
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.160.200	18.160.200	18.160.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	5.064.600	5.064.600
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.402.928.139	9.402.928.139	10.335.459.359

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.402.928.139	9.402.928.139	10.335.459.359
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.201.497.500	1.201.497.500	668.699.400
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.195.500	26.195.500	6.432.900
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.732.800	62.732.800	34.303.800
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.309.200	17.309.200	5.095.700
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.095.260.000	1.095.260.000	622.867.000
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.181.876.900	1.181.876.900	1.172.704.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.181.876.900	1.181.876.900	1.172.704.200
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	964.949.780	964.949.780	550.278.380
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.949.780	964.949.780	550.278.380
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.312.724	2.963.312.724	2.746.727.824

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	888.924.696	888.924.696	816.923.896
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.074.388.028	2.074.388.028	1.929.803.928
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	466.720.934.240	466.720.934.240	469.391.182.940
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.03		Penyelenggaraan Desa Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	0	0	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	462.064.091.360	462.064.091.360	467.923.363.960
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	461.737.410.816	461.737.410.816	467.521.683.416
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	326.680.544	326.680.544	401.680.544
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	474.858.988	474.858.988	889.435.088
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	117.839.000	117.839.000	444.049.500
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	357.019.988	357.019.988	445.385.588
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	431.983.892	431.983.892	578.383.892
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	431.983.892	431.983.892	578.383.892

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia	3.750.000.000	3.750.000.000	0
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	3.750.000.000	3.750.000.000	0
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	22.943.661.409	22.943.661.409	28.065.115.361
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.943.661.409	22.943.661.409	28.065.115.361
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	22.943.661.409	22.943.661.409	28.065.115.361
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.701.667.721	21.701.667.721	23.748.122.173
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.045.100	40.045.100	40.045.100
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.689.600	19.689.600	19.689.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.955.500	14.955.500	14.955.500
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.566.131.889	18.566.131.889	20.089.377.096
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.566.131.889	18.566.131.889	20.089.377.096
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.443.900	152.443.900	150.908.200
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.007.400	10.007.400	6.219.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.436.500	142.436.500	144.688.600
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.943.046.832	2.943.046.832	3.467.791.777
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	479.896.584	479.896.584	436.757.384

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	391.757.392	391.757.392	420.048.592
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.071.392.856	2.071.392.856	2.610.985.801
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	178.952.896	178.952.896	178.952.896
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	78.952.896	78.952.896
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	78.952.896	78.952.896	78.952.896
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	425.822.896	425.822.896	700.822.396
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	349.822.896	349.822.896	624.822.396
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	349.822.896	349.822.896	624.822.396
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	76.000.000	76.000.000	76.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	76.000.000	76.000.000	76.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	234.998.800	234.998.800	234.998.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	234.998.800	234.998.800	234.998.800
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.998.800	234.998.800	234.998.800

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	42.101.400	42.101.400	42.101.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	42.101.400	42.101.400	42.101.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	24.000.000	24.000.000	24.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	18.101.400	18.101.400	18.101.400
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	360.117.696	360.117.696	3.160.117.696
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	360.117.696	360.117.696	3.160.117.696
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	355.617.696	355.617.696	3.155.617.696
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	13.619.884.954	13.619.884.954	15.151.817.368
3.26.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	13.619.884.954	13.619.884.954	15.151.817.368
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.619.884.954	13.619.884.954	15.151.817.368
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.026.021.202	12.026.021.202	13.159.074.684
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.616.944	114.616.944	118.205.094
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.244.048	39.244.048	40.666.848

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.372.896	75.372.896	77.538.246
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.212.144.446	10.212.144.446	11.181.934.940
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.212.144.446	10.212.144.446	11.181.934.940
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.147.800	229.147.800	171.330.350
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.000	3.992.000	5.112.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.963.100	80.963.100	18.886.050
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.400.000	67.400.000	63.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.175.700	9.175.700	9.174.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.397.000	65.397.000	72.938.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.332.000	373.332.000	406.350.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.332.000	2.332.000	2.350.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000	116.000.000	116.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.000.000	255.000.000	288.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.096.780.012	1.096.780.012	1.281.254.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.127.500	362.127.500	321.743.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	712.052.512	712.052.512	936.911.200
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.600.000	22.600.000	22.600.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	493.243.984	493.243.984	602.476.980
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	41.138.200	41.138.200	47.715.600
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	41.138.200	41.138.200	47.715.600
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	339.199.888	339.199.888	428.022.184
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	339.199.888	339.199.888	428.022.184
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	112.905.896	112.905.896	126.739.196
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	96.915.896	96.915.896	108.040.396
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	15.990.000	15.990.000	18.698.800

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	436.051.688	436.051.688	555.588.532
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	436.051.688	436.051.688	555.588.532
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	145.662.896	145.662.896	184.913.244
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	93.735.896	93.735.896	170.527.792
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	196.652.896	196.652.896	200.147.496
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	181.213.096	181.213.096	264.380.192
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	95.108.448	95.108.448	137.623.196
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	30.080.000	30.080.000	31.823.200
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	65.028.448	65.028.448	105.799.996
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	86.104.648	86.104.648	126.756.996
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	86.104.648	86.104.648	126.756.996
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	483.354.984	483.354.984	570.296.980
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	483.354.984	483.354.984	570.296.980
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	172.529.344	172.529.344	176.049.944

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	135.481.896	135.481.896	175.663.144
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	175.343.744	175.343.744	218.583.892
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.273.521.768	72.273.521.768	95.615.909.366
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.850.835.300	2.850.835.300	2.965.255.704
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.850.835.300	2.850.835.300	2.965.255.704
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	756.308.188	756.308.188	702.760.636
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.216.200	60.216.200	60.216.200
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.016.600	5.016.600	5.016.600
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.508.800	13.508.800	13.508.800
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	32.500.000	32.500.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.190.800	9.190.800	9.190.800
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.462.644	320.462.644	320.462.644
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.224.000	202.224.000	202.224.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.238.644	118.238.644	118.238.644
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.629.344	375.629.344	322.081.792
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.296.448	161.296.448	198.772.896

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	8.976.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.332.896	114.332.896	114.332.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	746.649.576	746.649.576	715.463.576
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	746.649.576	746.649.576	715.463.576
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	746.649.576	746.649.576	715.463.576
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	537.196.924	537.196.924	537.181.024
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	212.385.340	212.385.340	212.369.440
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	212.385.340	212.385.340	212.369.440
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	324.811.584	324.811.584	324.811.584
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	324.811.584	324.811.584	324.811.584
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	810.680.612	810.680.612	1.009.850.468
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	810.680.612	810.680.612	1.009.850.468

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	137.436.444	137.436.444	155.166.444
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	411.351.580	411.351.580	667.744.332
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	261.892.588	261.892.588	186.939.692
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	69.422.686.468	69.422.686.468	92.650.653.662
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	69.422.686.468	69.422.686.468	92.650.653.662
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.279.383.350	52.279.383.350	51.606.575.294
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	646.181.068	646.181.068	701.484.668
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	323.340.084	323.340.084	320.239.284
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	322.840.984	322.840.984	381.245.384
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.007.799.062	45.007.799.062	44.067.867.866
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.609.930.382	44.609.930.382	43.669.999.186
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	397.868.680	397.868.680	397.868.680
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.631.300	377.631.300	368.176.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.498.300	56.498.300	56.498.300
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.496.100	77.496.100	68.551.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.000.000	205.000.000	205.000.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.636.900	38.636.900	38.126.700
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.814.106.756	1.814.106.756	1.927.736.100
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	941.976.000	941.976.000	941.976.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.130.756	872.130.756	985.760.100
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.433.665.164	4.433.665.164	4.541.310.660
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.528.906.452	2.528.906.452	2.524.632.604
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.634.010.816	1.634.010.816	1.745.240.160
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.747.896	270.747.896	271.437.896
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.664.893.158	12.664.893.158	27.051.417.008
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	336.297.040	336.297.040	10.434.636.890
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	336.297.040	336.297.040	10.434.636.890
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.416.676.300	5.416.676.300	8.486.357.208
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	682.099.416	682.099.416	2.359.748.116
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	840.571.268	840.571.268	2.257.556.372
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.333.306.152	1.333.306.152	1.333.306.152
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.560.699.464	2.560.699.464	2.535.746.568

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1.288.314.530	1.288.314.530	1.288.314.530
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.288.314.530	1.288.314.530	1.288.314.530
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.623.605.288	5.623.605.288	6.842.108.380
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.453.674.632	3.453.674.632	4.430.748.380
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.169.930.656	2.169.930.656	2.411.360.000
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.319.824.232	1.319.824.232	1.319.824.232
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.319.824.232	1.319.824.232	1.319.824.232
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.123.328.992	1.123.328.992	1.123.328.992
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	196.495.240	196.495.240	196.495.240
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.137.352.124	1.137.352.124	8.026.603.524
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	334.862.196	334.862.196	7.341.410.244
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	334.862.196	334.862.196	7.341.410.244

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	711.106.832	711.106.832	632.106.832
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	332.553.840	332.553.840	296.553.840
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	378.552.992	378.552.992	335.552.992
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	91.383.096	91.383.096	53.086.448
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	91.383.096	91.383.096	53.086.448
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.682.471.268	1.682.471.268	4.307.471.268
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.682.471.268	1.682.471.268	4.307.471.268
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	511.922.076	511.922.076	3.136.922.076
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	712.954.464	712.954.464	712.954.464
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	457.594.728	457.594.728	457.594.728
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	338.762.336	338.762.336	338.762.336
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	338.762.336	338.762.336	338.762.336
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	0	0	0
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	338.762.336	338.762.336	338.762.336
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45.159.934.449	45.159.934.449	46.078.551.855
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.663.206.761	3.663.206.761	4.182.201.471

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.663.206.761	3.663.206.761	4.182.201.471
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	893.714.377	893.714.377	1.193.710.087
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.553.100	87.553.100	76.392.900
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.492.000	5.492.000	5.492.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.811.900	27.811.900	16.651.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.400.000	45.400.000	45.400.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.849.200	8.849.200	8.849.200
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147.868.949	147.868.949	448.653.659
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.868.949	147.868.949	448.653.659
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	658.292.328	658.292.328	668.663.528
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314.520.088	314.520.088	323.941.288
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	343.772.240	343.772.240	344.722.240

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	172.102.296	172.102.296	391.102.096
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	172.102.296	172.102.296	391.102.096
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	172.102.296	172.102.296	391.102.096
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	145.838.400	145.838.400	145.838.400
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	145.838.400	145.838.400	145.838.400
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	37.392.200	37.392.200	37.392.200
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	108.446.200	108.446.200	108.446.200
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.344.292	192.344.292	192.343.892
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	192.344.292	192.344.292	192.343.892
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	192.344.292	192.344.292	192.343.892
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.259.207.396	2.259.207.396	2.259.206.996
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.259.207.396	2.259.207.396	2.259.206.996
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	2.259.207.396	2.259.207.396	2.259.206.996

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	41.496.727.688	41.496.727.688	41.896.350.384
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	41.496.727.688	41.496.727.688	41.896.350.384
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.186.558.444	41.186.558.444	41.636.181.140
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.827.300	35.827.300	35.827.300
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.827.300	35.827.300	35.827.300
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.316.954.302	35.316.954.302	35.511.646.002
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.275.424.902	35.275.424.902	35.470.116.602
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.529.400	41.529.400	41.529.400
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	847.551.500	847.551.500	746.892.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.910.500	29.910.500	29.910.500
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.105.800	135.105.800	105.441.600

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.250.000	303.250.000	233.250.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.753.200	48.753.200	47.818.600
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.150.000	78.150.000	78.150.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.382.000	252.382.000	252.322.000
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	340.253.000	340.253.000	367.248.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.253.000	340.253.000	367.248.700
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	922.627.530	922.627.530	926.627.530
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.644.758	265.644.758	269.644.758
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.982.772	656.982.772	656.982.772
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.723.344.812	3.723.344.812	4.047.938.908
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.034.727.164	2.034.727.164	2.141.058.364
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.680.000	345.680.000	345.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.342.937.648	1.342.937.648	1.561.880.544
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	122.507.596	122.507.596	122.507.596
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	122.507.596	122.507.596	122.507.596
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	122.507.596	122.507.596	122.507.596

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.08	01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.08	02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	187.661.648	187.661.648	137.661.648
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	187.661.648	187.661.648	137.661.648
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	187.661.648	187.661.648	137.661.648
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0	0	0
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.621.325.210	28.621.325.210	30.174.645.208
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.621.325.210	28.621.325.210	30.174.645.208
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	22.809.561.386	22.809.561.386	21.596.630.840
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.078.021.110	19.078.021.110	20.365.104.564
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.079.300	105.079.300	105.079.300
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.079.300	105.079.300	105.079.300
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.202.017.398	15.202.017.398	16.232.479.704
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.202.017.398	15.202.017.398	16.232.479.704
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.065.900	1.200.065.900	1.261.780.750
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.396.500	18.396.500	18.396.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	804.264.100	804.264.100	789.202.950

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.500.000	117.500.000	117.500.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.251.300	22.251.300	22.254.300
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.840.000	5.840.000	5.840.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.814.000	231.814.000	308.587.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	100.000.000	62.043.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	62.043.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.510.928	934.510.928	1.067.967.328
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.000.000	222.000.000	322.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	512.510.928	512.510.928	512.510.928
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	200.000.000	233.456.400
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.536.347.584	1.536.347.584	1.635.754.482
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.199.394.688	1.199.394.688	1.189.201.586

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	336.952.896	336.952.896	446.552.896
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	263.962.088	263.962.088	263.962.088
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	263.962.088	263.962.088	263.962.088
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	263.962.088	263.962.088	263.962.088
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.498.000	111.498.000	111.485.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	111.498.000	111.498.000	111.485.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	111.498.000	111.498.000	111.485.500
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	14.630.200	14.630.200	14.629.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	14.630.200	14.630.200	14.629.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	14.630.200	14.630.200	14.629.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	793.064.540	793.064.540	793.063.540
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	499.556.448	499.556.448	499.555.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000	456.000.000	456.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	43.556.448	43.556.448	43.555.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	219.456.244	219.456.244	219.456.244
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	219.456.244	219.456.244	219.456.244
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	74.051.848	74.051.848	74.051.848

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	74.051.848	74.051.848	74.051.848
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.548.385.448	2.548.385.448	48.385.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2.548.385.448	2.548.385.448	48.385.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	2.548.385.448	2.548.385.448	48.385.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.811.763.824	5.811.763.824	8.578.014.368
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	250.285.196	250.285.196	250.284.596
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.302.300	94.302.300	95.641.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.642.300	83.642.300	84.981.700
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.560.000	4.560.000	4.560.000
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.506.448	53.506.448	52.166.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.506.448	53.506.448	52.166.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.476.448	102.476.448	102.476.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.476.448	102.476.448	102.476.448
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.286.220.228	5.286.220.228	8.056.153.372
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	0	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	5.286.220.228	5.286.220.228	8.056.153.372
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	20.975.200	20.975.200	0
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	141.054.400	141.054.400	269.057.048
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.124.190.628	5.124.190.628	7.787.096.324
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	275.258.400	275.258.400	271.576.400
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	275.258.400	275.258.400	271.576.400
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	275.258.400	275.258.400	271.576.400
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	159.092.475.784	159.092.475.784	230.368.265.380
4.01.2.23.2.24.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	797.186.196	797.186.196	1.287.251.116
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	542.052.800	542.052.800	717.052.284
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	542.052.800	542.052.800	717.052.284
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	397.702.936	397.702.936	572.702.536
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	49.849.648	49.849.648	49.849.648
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	89.976.548	89.976.548	89.976.148
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	220.400.292	220.400.292	220.400.292
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	37.476.448	37.476.448	212.476.448
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	144.349.864	144.349.864	144.349.748
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	144.349.864	144.349.864	144.349.748
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	255.133.396	255.133.396	570.198.832
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	255.133.396	255.133.396	570.198.832
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	87.458.400	87.458.400	262.363.992

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	87.458.400	87.458.400	262.363.992
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	167.674.996	167.674.996	307.834.840
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	39.260.000	39.260.000	40.758.200
4.01.2.23.2.24.01.0000	2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	128.414.996	128.414.996	267.076.640
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	158.295.289.588	158.295.289.588	229.081.014.264
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	158.295.289.588	158.295.289.588	229.081.014.264
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	125.887.359.828	125.887.359.828	162.716.541.716
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.082.103.800	1.082.103.800	1.083.473.190
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.082.103.800	1.082.103.800	1.083.473.190
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.758.088.783	67.758.088.783	66.127.088.681
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	67.097.207.867	67.097.207.867	65.391.314.469
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	660.880.916	660.880.916	735.774.212
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	392.225.580	392.225.580	504.654.924
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	392.225.580	392.225.580	504.654.924
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.729.800	7.729.800	4.383.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.729.800	7.729.800	4.383.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.141.344.635	14.141.344.635	21.795.706.856
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	372.997.600	372.997.600	714.618.800
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.405.149.983	4.405.149.983	5.330.377.024
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114.715.300	114.715.300	109.715.500
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.075.678.000	4.075.678.000	6.931.628.980
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.558.377.880	4.558.377.880	8.094.946.280
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	614.425.872	614.425.872	614.420.272
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.043.272.607	11.043.272.607	22.234.400.907
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.793.924.999	1.793.924.999	2.011.354.999
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.278.648.000	4.278.648.000	15.252.346.500
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.970.699.608	4.970.699.608	4.970.699.408
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.656.921.267	11.656.921.267	15.901.842.925
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.194.164.940	2.194.164.940	2.435.620.888

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.348.554.070	7.348.554.070	7.861.106.038
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.560.000	349.560.000	344.540.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.714.642.257	1.714.642.257	5.195.575.999
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	60.000.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.747.349.060	4.747.349.060	7.344.477.833
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	247.349.060	247.349.060	247.349.060
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	7.097.128.773
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12.572.992.000	12.572.992.000	24.548.756.752
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	9.130.251.000	9.130.251.000	17.718.485.145
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	3.169.241.000	3.169.241.000	6.520.771.607
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	273.500.000	273.500.000	309.500.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	469.974.600	469.974.600	721.914.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	469.974.600	469.974.600	721.914.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.015.357.696	2.015.357.696	2.449.841.248
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.015.357.696	2.015.357.696	2.449.841.248
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	585.483.596	585.483.596	967.599.996
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	287.234.648	287.234.648	409.917.448

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	53.440.700	53.440.700	90.668.100
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	65.473.800	65.473.800	85.640.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	168.320.148	168.320.148	233.609.348
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	298.248.948	298.248.948	557.682.548
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	87.088.000	87.088.000	189.218.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	64.966.900	64.966.900	127.751.300
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.807.400	11.807.400	23.192.600
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	39.944.900	39.944.900	87.524.900
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	94.441.748	94.441.748	129.995.748
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.664.571.280	1.664.571.280	1.790.033.828
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	624.722.788	624.722.788	650.186.136
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	424.724.988	424.724.988	462.201.436
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	199.997.800	199.997.800	187.984.700
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	274.943.200	274.943.200	374.943.300
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	199.943.400	199.943.400	199.943.400
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	74.999.800	74.999.800	174.999.900
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	764.905.292	764.905.292	764.904.392
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.492	349.905.492	349.905.292
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	414.999.800	414.999.800	414.999.100
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	24.700.733.248	24.700.733.248	46.154.077.136
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	6.536.992.808	6.536.992.808	17.249.908.952
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	5.824.659.072	5.824.659.072	16.549.576.216
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	712.333.736	712.333.736	700.332.736

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	18.163.740.440	18.163.740.440	28.904.168.184
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	18.163.740.440	18.163.740.440	28.904.168.184
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	4.266.987.636	4.266.987.636	4.321.980.588
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.078.626.552	2.078.626.552	2.133.619.504
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.276.804.392	1.276.804.392	1.276.799.392
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	199.032.240	199.032.240	161.550.792
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	238.508.488	238.508.488	238.508.388
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	364.281.432	364.281.432	456.760.932
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.188.361.084	2.188.361.084	2.188.361.084
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.962.905.792	1.962.905.792	1.962.905.792
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	225.455.292	225.455.292	225.455.292
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	629.076.000	629.076.000	629.076.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	74.814.000	74.814.000	74.814.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	74.814.000	74.814.000	74.814.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	482.510.000	482.510.000	482.510.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	482.510.000	482.510.000	482.510.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	71.752.000	71.752.000	71.752.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	71.752.000	71.752.000	71.752.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	486.018.000	486.018.000	12.426.645.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	124.784.000	124.784.000	11.989.783.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.760.000	24.760.000	24.760.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	75.344.000	75.344.000	11.940.343.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	24.680.000	24.680.000	24.680.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	99.608.000	99.608.000	99.608.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	0	0	0
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	50.062.000	50.062.000	50.062.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	49.546.000	49.546.000	49.546.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	261.626.000	261.626.000	337.254.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	149.662.000	149.662.000	149.662.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	24.960.000	24.960.000	24.960.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	87.004.000	87.004.000	162.632.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75.060.000	75.060.000	75.060.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.100.000	25.100.000	25.100.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	25.100.000	25.100.000	25.100.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	49.960.000	49.960.000
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.960.000	49.960.000	49.960.000
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	222.960.370.687	222.960.370.687	245.203.051.335
4.02.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	222.960.370.687	222.960.370.687	245.203.051.335
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	222.960.370.687	222.960.370.687	245.203.051.335
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.772.965.523	88.772.965.523	88.436.574.023
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	315.493.296	315.493.296	273.534.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	189.406.948	189.406.948	156.122.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	126.086.348	126.086.348	117.412.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.750.590.396	10.750.590.396	10.047.632.768
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.511.900.000	10.511.900.000	9.826.825.372
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.444.148	118.444.148	110.662.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	120.246.248	120.246.248	110.144.948
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.737.615.244	7.737.615.244	8.190.497.044
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.178.700	132.178.700	132.178.700
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.695.700	490.695.700	964.176.800
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.348.620.000	1.348.620.000	1.348.620.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	136.597.500	136.597.500	135.494.200
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	954.480.000	954.480.000	954.480.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.675.043.344	4.675.043.344	4.655.547.344
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.227.835.000	1.227.835.000	761.591.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.227.835.000	1.227.835.000	761.591.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.425.479.532	2.425.479.532	2.587.479.532
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000	900.000.000	900.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.515.479.532	1.515.479.532	1.677.479.532

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.031.870.696	4.031.870.696	4.270.461.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.181.800.696	3.181.800.696	3.413.751.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	172.000.000	172.000.000	178.640.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	678.070.000	678.070.000	678.070.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.311.647.651	60.311.647.651	60.382.611.479
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.593.103.603	58.593.103.603	58.289.033.531
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.435.474.500	1.435.474.500	1.820.224.500
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	283.069.548	283.069.548	273.353.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	1.972.433.708	1.972.433.708	1.922.765.408
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	234.910.540	234.910.540	209.882.240
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.737.523.168	1.737.523.168	1.712.883.168
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	134.187.405.164	134.187.405.164	156.766.477.312
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	35.151.938.536	35.151.938.536	46.300.359.136
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.865.901.396	1.865.901.396	1.861.127.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	14.974.874.944	14.974.874.944	14.952.807.344
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	17.442.253.900	17.442.253.900	28.620.375.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	868.908.296	868.908.296	866.048.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.438.459.440	8.438.459.440	8.272.642.240
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	1.699.641.448	1.699.641.448	1.649.216.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.678.846.248	1.678.846.248	1.655.856.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.689.309.348	1.689.309.348	1.655.856.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.685.277.448	1.685.277.448	1.655.856.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.685.384.948	1.685.384.948	1.655.856.448
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	35.168.503.384	35.168.503.384	35.074.081.584
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8.459.613.292	8.459.613.292	8.443.432.792
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	8.225.285.000	8.225.285.000	8.203.947.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.455.545.896	8.455.545.896	8.448.064.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.375.810.196	8.375.810.196	8.360.256.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.652.249.000	1.652.249.000	1.618.380.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	14.268.472.376	14.268.472.376	14.206.353.976
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	0	0	0
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	3.726.650.144	3.726.650.144	3.946.975.344
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.632.176.136	3.632.176.136	3.394.891.736
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.251.028.000	3.251.028.000	3.240.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	905.824.000	905.824.000	900.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.752.794.096	2.752.794.096	2.724.486.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	27.655.137.140	27.655.137.140	39.424.297.240
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.304.899.096	3.304.899.096	3.285.401.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.799.325.500	1.799.325.500	1.748.616.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	22.550.912.544	22.550.912.544	34.390.279.344
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	825.356.896	825.356.896	817.218.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	825.356.896	825.356.896	817.218.896
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	12.679.537.392	12.679.537.392	12.671.524.240
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.254.911.944	10.254.911.944	10.228.871.344
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.424.625.448	2.424.625.448	2.442.652.896
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.733.789.850	27.733.789.850	28.078.374.619
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	27.733.789.850	27.733.789.850	28.078.374.619
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	27.733.789.850	27.733.789.850	28.078.374.619
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.913.645.242	19.913.645.242	20.526.319.911
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	354.479.892	354.479.892	370.053.940
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	206.553.892	206.553.892	238.824.240
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.636.200	15.636.200	13.028.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.636.200	15.636.200	13.028.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.054.400	14.054.400	12.137.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.993.800	12.993.800	9.485.600
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.554.500	41.554.500	40.457.700

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.050.900	48.050.900	43.093.400
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.907.568.524	13.907.568.524	13.973.912.997
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.587.267.040	13.587.267.040	13.653.611.913
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	198.840.740	198.840.740	196.113.540
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	121.460.744	121.460.744	124.187.544
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.333.736	1.308.333.736	1.600.924.736
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.411.148	47.411.148	47.411.148
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	453.950.048	453.950.048	597.109.048
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.911.248	104.911.248	114.766.248
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.461.948	70.461.948	69.429.948
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	74.916.448	74.916.448	74.916.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.476.448	73.476.448	103.476.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	483.206.448	483.206.448	593.815.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.476.448	90.476.448	90.476.448

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	43.000.000	43.000.000	43.000.000
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.476.448	47.476.448	47.476.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	953.139.216	953.139.216	960.327.916
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.468.448	40.468.448	40.466.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.076.448	337.076.448	337.076.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	575.594.320	575.594.320	582.785.020
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.299.647.426	3.299.647.426	3.530.623.874
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	812.564.480	812.564.480	812.564.480
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.626.448	163.626.448	168.126.448
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.323.456.498	2.323.456.498	2.549.932.946
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.386.905.872	5.386.905.872	5.125.180.372
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.779.999.840	2.779.999.840	2.603.064.240
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	72.749.600	72.749.600	85.343.500
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	118.899.600	118.899.600	85.140.900
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.588.350.640	2.588.350.640	2.432.579.840
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	748.474.244	748.474.244	744.624.244

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	722.682.444	722.682.444	720.582.444
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	25.791.800	25.791.800	24.041.800
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.547.607.740	1.547.607.740	1.467.417.840
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	542.456.100	542.456.100	532.405.200
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	699.657.240	699.657.240	649.658.240
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	305.494.400	305.494.400	285.354.400
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.824.048	310.824.048	310.074.048
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	310.824.048	310.824.048	310.074.048
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.433.238.736	2.433.238.736	2.426.874.336
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	902.876.728	902.876.728	823.391.428
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	129.383.996	129.383.996	106.406.796
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	105.356.796	105.356.796	86.756.396
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	418.518.244	418.518.244	418.518.244

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	249.617.692	249.617.692	211.709.992
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	796.354.480	796.354.480	869.580.780
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.838.544	196.838.544	196.838.544
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	279.891.392	279.891.392	279.870.192
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	95.231.748	95.231.748	95.231.748
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	224.392.796	224.392.796	297.640.296
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	734.007.528	734.007.528	733.902.128
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.300.388	305.300.388	305.300.388
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	80.441.700	80.441.700	80.429.100
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	267.823.640	267.823.640	266.186.440
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	80.441.800	80.441.800	81.986.200
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.719.836.421.762	1.532.336.421.762	1.794.724.850.634

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.719.836.421.762	1.532.336.421.762	1.794.724.850.634
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	1.719.836.421.762	1.532.336.421.762	1.794.724.850.634
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.354.849.660	23.354.849.660	24.547.580.814
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.049.800	35.049.800	35.049.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.049.800	35.049.800	35.049.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.328.267.976	19.328.267.976	19.363.298.334
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.086.669.076	19.086.669.076	19.121.709.534
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	241.598.900	241.598.900	241.588.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.404.953.480	1.404.953.480	1.521.329.628
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.528.100	17.528.100	17.372.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	440.459.200	440.459.200	459.273.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	622.471.780	622.471.780	684.786.328
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.837.400	31.837.400	31.179.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.200.000	17.200.000	17.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	124.995.000	124.995.000	62.385.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.462.000	150.462.000	249.133.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.300.000	399.300.000	336.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000	4.300.000	4.200.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	395.000.000	395.000.000	332.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.187.278.404	2.187.278.404	3.291.703.452
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	699.616.796	699.616.796	781.378.644
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.648.800	171.648.800	158.337.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.306.012.808	1.306.012.808	2.341.987.708
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.692.844.595.374	1.505.344.595.374	1.766.331.275.332
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.823.982.792	1.823.982.792	1.866.178.792
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	51.617.800	51.617.800	51.617.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	43.240.000	43.240.000	43.240.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	37.338.400	37.338.400	347.363.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	14.450.300	14.450.300	80.598.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	877.726.296	877.726.296	691.430.696
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	799.609.996	799.609.996	651.928.196
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	891.997.600	891.997.600	823.865.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	171.561.500	171.561.500	153.315.500

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	171.684.500	171.684.500	141.674.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	171.451.100	171.451.100	156.031.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	377.300.500	377.300.500	372.844.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	276.710.300	276.710.300	299.997.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	276.710.300	276.710.300	299.997.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	456.544.944	456.544.944	716.462.940
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	385.811.944	385.811.944	645.759.640
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	70.733.000	70.733.000	70.703.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.688.199.625.938	1.500.699.625.938	1.761.472.252.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	190.275.000.000	2.775.000.000	2.775.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	298.312.703.508	298.312.703.508	521.974.803.508

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1.149.611.922.430	1.149.611.922.430	1.186.722.448.892
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.195.733.800	1.195.733.800	1.152.517.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.195.733.800	1.195.733.800	1.152.517.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.636.976.728	3.636.976.728	3.845.994.488
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.636.976.728	3.636.976.728	3.845.994.488
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	262.109.200	262.109.200	217.599.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	317.688.800	317.688.800	517.668.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.414.002.300	2.414.002.300	2.349.085.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	643.176.428	643.176.428	761.640.588
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	163.290.173.050	163.290.173.050	167.146.292.718
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	163.290.173.050	163.290.173.050	167.146.292.718
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	163.290.173.050	163.290.173.050	167.146.292.718
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	146.247.876.530	146.247.876.530	149.123.461.286
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.442.900	37.442.900	37.913.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.372.600	18.372.600	18.867.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.070.300	19.070.300	19.045.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.421.514.295	116.421.514.295	119.490.088.012
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116.421.514.295	116.421.514.295	119.490.088.012
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.020.170.440	5.020.170.440	5.059.537.770
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.714.890	81.714.890	81.437.890
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.775.282.150	1.775.282.150	1.693.716.980
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.515.361.400	1.515.361.400	1.602.357.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.696.000	60.696.000	55.497.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	191.247.000	191.247.000	178.353.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.095.869.000	1.095.869.000	1.148.175.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.833.923.000	2.833.923.000	3.424.636.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.614.000	559.614.000	559.614.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.097.889.000	1.097.889.000	1.123.829.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.176.420.000	1.176.420.000	1.741.193.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.587.393.200	4.587.393.200	4.685.718.903
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.147.000	25.147.000	14.656.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.633.326.200	2.633.326.200	2.620.759.304

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.928.920.000	1.928.920.000	2.050.303.599
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.297.432.695	17.297.432.695	16.375.567.201
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.024.148	490.024.148	535.718.348
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.480.423.468	2.480.423.468	2.651.416.668
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816.157.376	816.157.376	1.076.565.408
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.882.552.607	11.882.552.607	10.468.945.881
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.628.275.096	1.628.275.096	1.642.920.896
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	95.327.300	95.327.300	94.900.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	95.327.300	95.327.300	94.900.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	95.327.300	95.327.300	94.900.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.946.969.220	16.946.969.220	17.927.930.532
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16.946.969.220	16.946.969.220	17.927.930.532
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	148.708.700	148.708.700	506.755.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	355.727.800	355.727.800	385.828.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	141.625.000	141.625.000	141.625.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10.114.750.288	10.114.750.288	10.178.576.728
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	5.934.584.032	5.934.584.032	6.465.124.304

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	213.116.600	213.116.600	213.116.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	38.456.800	38.456.800	36.903.500
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.945.000.094	42.945.000.094	49.836.858.591
5.03.5.04.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	42.945.000.094	42.945.000.094	49.836.858.591
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	41.727.759.802	41.727.759.802	48.958.880.999
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.438.971.822	33.438.971.822	36.147.294.471
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.923.500	74.923.500	74.923.500
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.250.000	5.250.000	5.250.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.168.300	3.168.300	3.168.300
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	231.600	231.600	231.600
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	231.600	231.600	231.600
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.292.000	35.292.000	35.292.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.500.000	28.500.000	28.500.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.722.475.212	22.722.475.212	24.470.189.305
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.722.475.212	22.722.475.212	24.470.189.305

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	349.476.104
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	349.476.104
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	770.907.350	770.907.350	794.840.350
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.717.500	12.717.500	12.717.500
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.457.050	163.457.050	163.090.050
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.475.000	98.475.000	98.475.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.677.800	20.677.800	20.677.800
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	22.500.000	22.500.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.080.000	453.080.000	477.380.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	806.160.000	806.160.000	314.058.900
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	806.160.000	806.160.000	314.058.900
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.572.807.584	1.572.807.584	1.532.331.136
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3.300.000	3.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000	259.000.000	259.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.310.507.584	1.310.507.584	1.270.331.136
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.652.033.176	1.652.033.176	1.651.643.176
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.142.594.176	1.142.594.176	1.142.204.176
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	221.119.000	221.119.000	221.119.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	138.320.000	138.320.000	138.320.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	5.839.665.000	5.839.665.000	6.959.832.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.839.665.000	5.839.665.000	6.959.832.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.288.787.980	8.288.787.980	12.811.586.528
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6.441.595.056	6.441.595.056	6.363.294.904
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	8.072.000	8.072.000	8.072.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	6.148.058.168	6.148.058.168	6.032.281.568
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	143.236.544	143.236.544	143.236.544
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	142.228.344	142.228.344	179.704.792
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	360.166.044	360.166.044	5.324.193.044
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	82.783.148	82.783.148	82.773.148
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	109.176.448	109.176.448	109.176.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	168.206.448	168.206.448	5.132.243.448

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	965.379.692	965.379.692	598.499.692
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	392.447.900	392.447.900	321.477.900
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	115.838.896	115.838.896	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	376.070.448	376.070.448	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0	0	113.558.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	81.022.448	81.022.448	163.462.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	521.647.188	521.647.188	525.598.888
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	212.531.344	212.531.344	212.495.344
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	180.734.948	180.734.948	184.742.648
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	109.952.896	109.952.896	109.952.896
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	18.428.000	18.428.000	18.408.000
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.217.240.292	1.217.240.292	877.977.592
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.217.240.292	1.217.240.292	877.977.592
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.217.240.292	1.217.240.292	877.977.592
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	106.081.448	106.081.448	94.092.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	513.395.148	513.395.148	355.699.448
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	0	0	0
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	597.763.696	597.763.696	428.185.696
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.430.419.849	25.430.419.849	25.859.700.589
5.05.0.00.0.00.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25.430.419.849	25.430.419.849	25.859.700.589
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.430.419.849	25.430.419.849	25.859.700.589
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.502.772.549	14.502.772.549	13.972.055.089

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.271.800	56.271.800	56.271.800
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.259.700	45.259.700	45.259.700
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.012.100	11.012.100	11.012.100
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.641.005.185	10.641.005.185	10.110.306.125
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.624.746.285	10.624.746.285	10.094.047.225
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.592.200	7.592.200	7.592.200
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.199.600	5.199.600	5.199.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.467.100	3.467.100	3.467.100
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	512.465.400	512.465.400	462.451.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.959.400	21.959.400	21.958.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.750.000	54.750.000	54.749.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	157.500.000	157.500.000	107.495.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.424.000	20.424.000	20.424.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.832.000	242.832.000	242.825.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	552.180.000	552.180.000	602.180.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	15.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537.180.000	537.180.000	587.180.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.014.036	550.014.036	550.009.436
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.000.000	226.000.000	226.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.014.036	324.014.036	324.009.436
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.190.836.128	2.190.836.128	2.190.836.128
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.232.032	837.232.032	837.232.032
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.353.604.096	1.353.604.096	1.353.604.096
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.927.647.300	10.927.647.300	11.887.645.500
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	9.127.647.900	9.127.647.900	9.787.646.500
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	7.810.000.000	7.810.000.000	8.170.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	850.000.000	850.000.000	850.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	379.335.600	379.335.600	379.334.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	88.312.300	88.312.300	388.311.900
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	950.000.000	950.000.000	1.250.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000	150.000.000	102.295.400
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	500.000.000	500.000.000	500.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	300.000.000	300.000.000	300.000.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	0	347.704.600
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	0	0	0
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	849.999.400	849.999.400	849.999.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	300.000.000	300.000.000	300.000.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	219.999.400	219.999.400	219.999.000
5.05.0.00.0.00.02.0000	5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	330.000.000	330.000.000	330.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	7.998.976.679	7.998.976.679	8.699.475.589
5.07.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.998.976.679	7.998.976.679	8.699.475.589
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	7.998.976.679	7.998.976.679	8.699.475.589
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.705.311.499	6.705.311.499	5.627.610.409
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.877.200	4.877.200	4.877.200
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.877.200	4.877.200	4.877.200
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.354.985.847	4.354.985.847	3.047.299.557
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.354.985.847	4.354.985.847	3.047.299.557
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.789.100	188.789.100	188.774.300
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.190.500	10.190.500	10.190.500
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.672.300	30.672.300	30.670.500
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	80.000.000	80.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.425.300	8.425.300	8.425.300

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.501.000	59.501.000	59.488.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.820.100	132.820.100	144.820.100
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.820.100	132.820.100	144.820.100
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.787.508	1.078.787.508	1.078.787.508
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.990.000	6.990.000	6.990.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.000.000	205.000.000	205.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.797.508	866.797.508	866.797.508
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	945.051.744	945.051.744	1.163.051.744
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	803.759.628	803.759.628	791.759.628
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	280.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.292.116	91.292.116	91.292.116
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.293.665.180	1.293.665.180	3.071.865.180
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.293.665.180	1.293.665.180	3.071.865.180

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	45.569.600	45.569.600	220.569.600
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	239.617.116	239.617.116	239.617.116
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	0	0	0
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.008.478.464	1.008.478.464	2.611.678.464
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	27.084.604.376	27.084.604.376	43.485.039.356
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	27.084.604.376	27.084.604.376	43.485.039.356
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	27.084.604.376	27.084.604.376	43.485.039.356
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.550.898.832	23.550.898.832	33.905.411.942
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.488.600	13.488.600	83.757.200
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.099.800	7.099.800	55.777.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.388.800	6.388.800	27.979.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.024.569.778	21.024.569.778	20.467.540.274
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.024.569.778	21.024.569.778	20.467.540.274
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.437.290	515.437.290	1.284.979.040
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.850.440	25.850.440	25.992.540
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.747.650	77.747.650	76.499.100
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.715.400	102.715.400	149.990.400

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.999.800	14.999.800	25.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.000.000	44.000.000	44.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.300.000	14.300.000	75.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.824.000	235.824.000	888.497.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.766.000	75.766.000	3.697.093.301
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.766.000	75.766.000	3.697.093.301
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.997.588	571.997.588	3.058.398.988
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	250.000.000	275.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.997.588	319.997.588	2.778.398.988
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.349.639.576	1.349.639.576	5.313.643.139
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	894.990.232	894.990.232	2.590.703.139
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.000.000	320.000.000	2.372.940.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.649.344	134.649.344	350.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.499.486.964	2.499.486.964	5.999.442.988
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.521.654.616	1.521.654.616	3.899.443.658
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.887.096	150.887.096	599.999.992
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	359.442.592	359.442.592	384.500.396

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	80.307.550	80.307.550	199.999.650
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	134.999.396	134.999.396	400.000.048
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	450.982.896	450.982.896	1.024.944.096
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	179.420.000	179.420.000	739.999.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	165.615.086	165.615.086	549.999.976
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	977.832.348	977.832.348	2.099.999.330
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	137.476.056	137.476.056	149.999.586
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	840.356.292	840.356.292	1.949.999.744
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.034.218.580	1.034.218.580	3.580.184.426
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	377.240.584	377.240.584	1.630.311.832
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	217.240.992	217.240.992	530.311.944
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	159.999.592	159.999.592	1.099.999.888
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	656.977.996	656.977.996	1.949.872.594
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	269.990.248	269.990.248	649.877.394
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	81.987.900	81.987.900	349.995.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	230.000.000	230.000.000	799.999.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	74.999.848	74.999.848	149.999.900
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.935.470.678	27.935.470.678	36.506.475.368

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	27.935.470.678	27.935.470.678	36.506.475.368
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.935.470.678	27.935.470.678	36.506.475.368
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.075.516.303	10.075.516.303	10.899.519.592
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.973.200	10.973.200	11.754.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.936.400	6.936.400	7.717.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.036.800	4.036.800	4.036.800
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.677.806.287	8.677.806.287	9.055.633.324
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.677.806.287	8.677.806.287	9.055.633.324
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.664.700	223.664.700	305.530.800
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.683.300	1.683.300	5.120.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.995.600	50.995.600	112.494.200
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	75.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.115.800	25.115.800	18.142.600
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.870.000	65.870.000	89.774.000

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.602.500	42.602.500	82.896.500
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.602.500	42.602.500	82.896.500
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.299.616	774.299.616	807.823.168
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	2.200.000	2.200.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	110.000.000	110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.099.616	662.099.616	695.623.168
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.170.000	346.170.000	635.881.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	309.200.000	309.200.000	449.036.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000	17.040.000	17.040.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	149.875.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.930.000	19.930.000	19.930.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	644.952.896	644.952.896	720.152.896
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	644.952.896	644.952.896	720.152.896

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	644.952.896	644.952.896	720.152.896
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	16.757.419.744	16.757.419.744	16.848.269.544
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	16.757.419.744	16.757.419.744	16.848.269.544
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	16.757.419.744	16.757.419.744	16.848.269.544

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	173.169.344	173.169.344	7.323.441.144
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	173.169.344	173.169.344	7.323.441.144
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	173.169.344	173.169.344	7.323.441.144
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	284.412.391	284.412.391	715.092.192
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	284.412.391	284.412.391	715.092.192

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	284.412.391	284.412.391	715.092.192
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.016.600	0	0	0	5.016.600	100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	715.463.576	0	0	0	715.463.576	100
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	212.369.440	0	0	0	212.369.440	100
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	155.166.444	0	0	0	155.166.444	100
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	163.208.344	0	0	0	163.208.344	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	247.835.892	0	0	0	247.835.892	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.001.000	0	0	0	1.001.000	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.956.000	0	0	0	27.956.000	100
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.999.800	0	0	0	19.999.800	100
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	118.552.496	0	0	0	118.552.496	100
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.962.539.110	0	0	0	3.962.539.110	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	122.998.396	0	0	0	122.998.396	100
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.947.746.880	0	0	0	10.947.746.880	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Kelautan dan Perikanan	1.350.000	0	0	0	1.350.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
			Dinas Kelautan dan Perikanan	234.998.800	0	0	0	234.998.800	100
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
			Dinas Kelautan dan Perikanan	18.101.400	0	0	0	18.101.400	100
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
			Dinas Kelautan dan Perikanan	4.500.000	0	0	0	4.500.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pariwisata	2.220.000	0	0	0	2.220.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Pariwisata	18.698.800	0	0	0	18.698.800	100
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
			Dinas Pariwisata	170.527.792	0	0	0	170.527.792	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
			Dinas Pariwisata	31.823.200	0	0	0	31.823.200	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
			Dinas Pariwisata	175.663.144	0	0	0	175.663.144	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.869.000	0	0	0	4.869.000	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	469.557.232	20.000.000	0	0	489.557.232	100
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	196.495.240	0	0	0	196.495.240	100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	53.086.448	0	0	0	53.086.448	100
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	457.594.728	0	0	0	457.594.728	100
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							
			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	338.762.336	0	0	0	338.762.336	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	520.141.800	500.000.000	0	0	1.020.141.800	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.232.479.704	0	0	0	16.232.479.704	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	263.962.088	0	0	0	263.962.088	100
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	48.385.448	0	0	0	48.385.448	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.476.448	0	0	0	102.476.448	100
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.057.048	0	0	0	269.057.048	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	271.576.400	0	0	0	271.576.400	100
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**								
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	477.435.840	0	0	0	477.435.840	6.585
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	42.091.900	0	0	0	42.091.900	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	10.080.000	519.283.800	0	0	529.363.800	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA							
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	79.090.400	0	0	0	79.090.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Kesehatan	121.600	64.250.400	0	0	64.372.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Kesehatan	2.730.580	35.000.000	0	0	37.730.580	100
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
			Dinas Kesehatan	12.494.400	0	0	0	12.494.400	100
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
			Dinas Kesehatan	324.497.600	0	0	0	324.497.600	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
			Dinas Kesehatan	248.846.000	0	0	0	248.846.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3.603.000	0	0	0	3.603.000	100
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	255.937.800	0	0	0	255.937.800	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.997.600	0	0	0	30.997.600	100
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	11.279.900	0	0	0	11.279.900	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	38.767.648	0	0	0	38.767.648	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.940.000	0	0	0	4.940.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	20.000.000	0	0	0	20.000.000	100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	653.097.700	0	0	0	653.097.700	100
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	63.750.000	0	0	0	63.750.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.150.000.000	0	0	0	8.150.000.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000	0	0	0	500.000.000	100
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	60.159.000	0	0	0	60.159.000	100
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	5.095.700	0	0	0	5.095.700	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
			Dinas Kebudayaan	18.339.481.580	0	0	0	18.339.481.580	100
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Kebudayaan	117.634.800	0	0	0	117.634.800	100
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
			Dinas Kebudayaan	423.452.840	0	0	0	423.452.840	100
		PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI							
			Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	444.049.500	0	0	0	444.049.500	100
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.323.441.144	0	0	0	7.323.441.144	100
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.100.000	0	0	0	1.100.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	53.542.300	3.060.000.000	0	0	3.113.542.300	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	88.682.600	9.176.000.000	0	0	9.264.682.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.012.100	225.000.000	0	0	232.012.100	100
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	428.251.100	750.000.000	0	0	1.178.251.100	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.200.000	68.972.053.391	0	0	68.987.253.391	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	737.311.880	0	0	0	737.311.880	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	195.796.396	0	0	0	195.796.396	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	27.533.700	0	0	0	27.533.700	100
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.226.900	0	0	0	18.226.900	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Satuan Polisi Pamong Praja	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
			Satuan Polisi Pamong Praja	132.400.000	0	0	0	132.400.000	100
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							
			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	311.272.200	0	0	0	311.272.200	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Perhubungan	600.000	0	0	0	600.000	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
			Dinas Perhubungan	19.127.500	0	0	0	19.127.500	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
			Dinas Perhubungan	10.080.000	0	0	0	10.080.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
			Dinas Perhubungan	758.242.788	0	0	0	758.242.788	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.437.600	0	0	0	5.437.600	100
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.487.836.300	211.650.000	0	0	1.699.486.300	100
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.050.300	0	0	0	2.050.300	100
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.364.000	0	0	0	28.364.000	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.492.000	0	0	0	5.492.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000	0	0	0	8.000.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA							
			Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000	0	0	0	8.000.000	100
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**								
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	186.673.244	0	0	0	186.673.244	100
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.195.744	0	0	0	140.195.744	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.188.300	0	0	0	14.188.300	100
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
			Sekretariat Daerah	37.476.448	175.000.000	0	0	212.476.448	100
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
			Sekretariat Daerah	262.363.992	0	0	0	262.363.992	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	105.079.300	0	0	0	105.079.300	100
			Sekretariat Daerah	13.624.000	0	0	0	13.624.000	100
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI							
			Sekretariat Daerah	70.640.000	15.000.000	0	0	85.640.000	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
			Sekretariat Daerah	187.984.700	0	0	0	187.984.700	100
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT							
			Sekretariat Daerah	700.332.736	0	0	0	700.332.736	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.485.600	0	0	0	9.485.600	100
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.041.800	0	0	0	24.041.800	100
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.429.100	0	0	0	80.429.100	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Pendapatan Daerah	2.437.800	0	0	0	2.437.800	100
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.240.000	0	0	0	43.240.000	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
			Badan Pendapatan Daerah	36.903.500	0	0	0	36.903.500	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.717.500	0	0	0	12.717.500	100
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.072.000	0	0	0	8.072.000	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.092.448	0	0	0	94.092.448	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.467.100	0	0	0	3.467.100	100
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
			Badan Riset dan Inovasi Daerah	102.295.400	0	0	0	102.295.400	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Penghubung	4.877.200	0	0	0	4.877.200	100

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG							
			Badan Penghubung	45.569.600	175.000.000	0	0	220.569.600	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Inspektorat	27.979.700	0	0	0	27.979.700	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
			Inspektorat	149.999.586	0	0	0	149.999.586	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.036.800	0	0	0	4.036.800	100

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan IV/e	1					4			**5**
Golongan IV/d		8				18			**26**
Golongan IV/c		19	1			170			**190**
Golongan IV/b		8	115			1,309	3		**1,435**
Golongan IV/a			74	71		1,324	36		**1,505**
JUMLAH GOLONGAN IV	**1**	**35**	**190**	**71**	**0**	**2,825**	**39**	**0**	**3,161**
Golongan III/e									**0**
Golongan III/d			11	129		1,202	399		**1,741**
Golongan III/c				27		713	326		**1,066**
Golongan III/b						582	656		**1,238**
Golongan III/a						516	795		**1,311**
JUMLAH GOLONGAN III	**0**	**0**	**11**	**156**	**0**	**3,013**	**2,176**	**0**	**5,356**
Golongan II/e									**0**
Golongan II/d						153	453		**606**
Golongan II/c						58	394		**452**
Golongan II/b						1	171		**172**
Golongan II/a							12		**12**

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
JUMLAH GOLONGAN II	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212**	**1,030**	**0**	**1,242**
GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan I/e									**0**
Golongan I/d							26		**26**
Golongan I/c							2		**2**
Golongan I/b							7		**7**
Golongan I/a									**0**
JUMLAH GOLONGAN I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**0**	**35**
Golongan IX								920	**920**
JUMLAH GOLONGAN IX	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920**	**920**
Golongan VIII								1	1
JUMLAH GOLONGAN VIII	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
TOTAL	**1**	**35**	**201**	**227**	**0**	**6,050**	**3,280**	**921**	**10,715**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2021	Perkiraan Penambahan Tahun 2022	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2022	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		**27.168.286.627,00**	**29.508.677.523,00**	**26.562.107.027,00**	**30.114.857.123,00**
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor		302.995.700,00	-	79.311.600,00	223.684.100,00
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		439.530.500,00	-	57.035.000,00	382.495.500,00
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		26.173.418.555,00	29.246.503.267,00	26.173.418.555,00	29.246.503.267,00
	d. Piutang Pajak Air Permukaan		252.341.872,00	262.174.256,00	252.341.872,00	262.174.256,00
	e. Piutang Pajak Rokok		-	-		-
2	Piutang Retribusi		153.220.000,00	150.840.000,00	68.012.000,00	236.048.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		951.680.759,70	-	-	951.680.759,70
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		65.293.716.530,16	53.840.040.614,00	31.683.528.023,00	87.450.229.121,16
5	Piutang Lainnya		5.131.107.671,82	88.746.671.213,00	1.305.503.035,82	92.572.275.849,00
Jumlah			**98.698.011.588,68**	**172.246.229.350,00**	**59.619.150.085,82**	**211.325.090.852,86**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2004	PT. BPD Bali	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp644.912.000.000,00	Rp614.912.000.000,00	Rp30.000.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp110.000.000.000,00	Rp158.436.630.618,70		
2	2010	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali • Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp135.000.000.000,00	Rp120.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp1.279.822.630,00		

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
3	1974	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	• Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp5.282.769.658,00	Rp5.282.769.658,00		Rp5.282.769.658,00				
4	2003	PT. Puri Raharja	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp8.736.000.000,00	Rp8.736.000.000,00		Rp8.736.000.000,00		Rp823.182.430,00		
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp1.150.000.000,00	Rp1.150.000.000,00		Rp1.150.000.000,00		Rp173.054.110,00		
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tol	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00		Rp100.000.000.000,00				
7	2022	PT. Perseroda Pariwisata Digital	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahan Umum Daerah Kerti Bali Santhi	Uang	Rp20.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00			
8	2022	PT. Perseroda PKB		Uang						Rp650.000.000.000,00		
Jumlah					**Rp915.080.769.658,00**	**Rp855.080.769.658,00**	**Rp55.000.000.000,00**	**Rp1.419.992.769.658,00**	**Rp130.000.000.000,00**	**Rp810.712.689.788,70**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2021	Perkiraan Penambahan Tahun 2022	Perkiraan Pengurangan Tahun 2022	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Aset Tetap Rusak Berat	Aset Lainnya	45.844.960.627,45	6.941.324.798,04	2.762.464.812,00	50.023.820.613,49
2	Aset Tetap Yang Akan Di Hibahkan	Aset Lainnya	207.928.119.999,00	-	-	207.928.119.999,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Aset Lainnya	7.036.713.791,61	-	-	7.036.713.791,61
Jumlah			**260.809.794.418,06**	**6.941.324.798,04**	**2.762.464.812,00**	**264.988.654.404,10**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XIV

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN YANG DIRENCANAKAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

1) Tahun Pertama

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
Jumlah								

2) Tahun Kedua

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mendanai kegiatan Pemilihan Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024	250.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	100.000.000.000,00	150.000.000.000,00
Jumlah			**250.000.000.000,00**	**-**	**100.000.000.000,00**	**-**	**100.000.000.000,00**	**150.000.000.000,00**

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

PROVINSI BALI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman /Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur	- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tentang. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - PMK Nomor 43/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah.E21	28 Desember 2020	1.493.501.960.600,00	8 Tahun dengan grace period 2 Tahun	0,00%	Pemulihan Ekonomi Daerah, dalam rangka pembangunan Pusat Kesenian Bali	187.500.000.000,00	0,00%	1.306.001.960.600,00	0,00%
Jumlah											

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER